



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Batasan Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah Kabupaten Pangandaran.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Pangandaran.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Pangandaran, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
20. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan RKPD; dan
  - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
  - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; dan
  - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan

- b. dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

- BAB I : Pendahuluan;  
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;  
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;  
BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;  
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;  
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;  
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;  
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan  
BAB IX : Penutup.

### BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 4/118 /2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan telah terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021 hingga 2026, maka sesuai dengan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4  
    Cukup Jelas  
Pasal 5  
    Cukup Jelas  
Pasal 6  
    Cukup Jelas  
Pasal 7  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4



# RP JMD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

2021-2026



H. Jeje Wiradinata

H. Ujang Endin Indrawan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dapat diselesaikan. RPJMD adalah



H. JEJE WIRADINATA  
BUPATI PANGANDARAN

H. UJANG ENDIN INDRAWAN  
WAKIL BUPATI PANGANDARAN

penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati kepada Warga Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD bertujuan untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Pangandaran selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 merupakan pedoman dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memenuhi harapan warga Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan Visi, **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama- sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Pangandaran secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, Insya Allah apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.

**BUPATI PANGANDARAN,**

ttd

**H. JEJE WIRADINATA**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud Dan Tujuan .....	I-11
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-42
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-57
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-115
2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-121
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-16
3.3 Kerangka Pendanaan .....	III-22
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU</b>	
<b>STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	VI-1
4.2 Isu Strategis .....	VI-65
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Visi .....	V-2
5.2 Misi .....	V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-8
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-20
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN</b>	
<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b>	
<b>DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1 Kaidah Pelaksanaan .....	IX-1
9.2 Pedoman Transisi.....	IX-2



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .....	II-3
Tabel 2. 2	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran.....	II-4
Tabel 2. 3	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran ... ..	II-6
Tabel 2. 4	Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran .....	II-12
Tabel 2. 5	Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran.....	II-13
Tabel 2. 6	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran .....	II-14
Tabel 2. 7	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....	II-18
Tabel 2. 8	Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran .....	II-21
Tabel 2. 9	Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran... ..	II-21
Tabel 2.10	Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran .....	II-22
Tabel 2. 11	Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran .....	II-24
Tabel 2. 12	Jumlah Penduduk, dan Jumlah KK di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	II-25
Tabel 2. 13	Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	II-26
Tabel 2. 14	Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	II-27
Tabel 2. 15	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	II-28
Tabel 2. 16	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran 2020.....	II-31
Tabel 2. 17	Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	II-33
Tabel 2. 18	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	II-35
Tabel 2. 19	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 .....	II-36
Tabel 2. 20	Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran .....	II-40
Tabel 2. 21	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2. 22	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020.....	II-47
Tabel 2. 23	Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran .....	II-52
Tabel 2. 24	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	II-54
Tabel 2. 25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran 2016-2020.....	II-55
Tabel 2. 26	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-56



Tabel 2. 27 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-57
Tabel 2. 28 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-58
Tabel 2. 29 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-61
Tabel 2. 30 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2. 31 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-68
Tabel 2. 32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-70
Tabel 2. 33 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-71
Tabel 2. 34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-74
Tabel 2. 35 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-75
Tabel 2. 36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-76
Tabel 2. 37 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-78
Tabel 2. 38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-79
Tabel 2. 39 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 .....	II-81
Tabel 2. 40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-82
Tabel 2. 41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-85
Tabel 2. 43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-86
Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-90
Tabel 2. 47 Jumlah Publikasi Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-91
Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-91
Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-93





Tabel 2. 50	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-95
Tabel 2. 51	Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2. 52	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perikanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 ..	II-98
Tabel 2. 53	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 ..	II-99
Tabel 2. 54	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020...	II-101
Tabel 2. 55	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2. 56	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-104
Tabel 2. 57	Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-105
Tabel 2. 58	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-106
Tabel 2. 59	Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-107
Tabel 2. 60	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-108
Tabel 2. 61	Hasil Capaian Kinerja Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-109
Tabel 2. 62	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2. 63	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2. 64	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2. 65	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran .....	II-113
Tabel 2. 66	Hasil Kinerja Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-114
Tabel 2. 67	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-116
Tabel 2. 68	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020.....	II-117
Tabel 2. 69	Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020 .....	II-119
Tabel 2. 70	Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2016 – 2020 ..	II-120



Tabel 2. 71	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandandaran Tahun 2016 – 2020	II-121
Tabel 2. 72	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020.....	II-123
Tabel 2. 73	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran .....	II-126
Tabel 3. 1	T-C.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangandaran .....	III-5
Tabel 3. 2.	T-C.3. Neraca Daerah Kabupaten Pangandaran....	III-15
Tabel 3. 3	T-C.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangandaran ....	III-18
Tabel 3. 4	T-C.5. Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pangandaran .....	III-20
Tabel 3. 5	T-C.6. Komposisi Penutup Rill Defisit Anggaran Kabupaten Pangandaran .....	III-20
Tabel 3. 6	T-C.7. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pangandaran .....	III-21
Tabel 3. 7	T-C.8. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026.....	III-23
Tabel 3. 8	T-C.9. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran .....	III-29
Tabel 3. 9	T-C.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah .....	III-31
Tabel 4. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-3
Tabel 4. 2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Pangandaran .....	IV-27
Tabel 4. 3	Keterkaitan Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran .....	IV-66
Tabel 4. 4	Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Kabupaten Pangandaran .....	IV-67
Tabel 4. 5	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran .....	IV-69
Tabel 4. 6	Penjabaran Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran .....	IV-74
Tabel 4. 7	Skor Kreteria Penentuan Isu-Isu Strategis .....	IV-76
Tabel 4. 8	Skor Kriteria Rata-rata .....	IV-77
Tabel 4. 9	Hasil Pembobotan Skor.....	IV-79
Tabel 4. 10	Urutan Isu Strategis Berdasarkan Urgensi.....	IV-80
Tabel 5. 1	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran .....	V-2
Tabel 5. 2	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.....	V-4
Tabel 5. 3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran 2021-2026.....	V-12
Tabel 5. 4	Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih.....	V-15
Tabel 6. 1	Analisis SWOT dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran .....	VI-2
Tabel 6. 2	T-C.12. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pangandaran .....	VI-16



Tabel 6. 3	Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026.....	VI-21
Tabel 6. 4	T-C,13. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangandaran .....	VI-26
Tabel 6. 5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangandaran.....	VI-27
Tabel 7. 1	T.C-15 Kerangka Pendanaan Daerah 2022-2026 Kabupaten Pangandaran .....	VII-2
Tabel 8. 1	T.C-17 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran .....	VIII-2
Tabel 8. 2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran .....	VIII-4
Tabel 8. 3	Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .....	VIII-16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-11
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Pangandaran .....	II-1
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran.....	II-2
Gambar 2. 3	Peta Topografi Kecamatan Pangandaran .....	II-8
Gambar 2. 4	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran .....	II-9
Gambar 2. 5	Peta Geologi Kabupaten Pangandaran.....	II-10
Gambar 2. 6	Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran .....	II-12
Gambar 2. 7	Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran.....	II-15
Gambar 2. 8	Peta Curah Hujan .....	II-17
Gambar 2. 9	Peta Penggunaan Lahan.....	II-19
Gambar 2. 10	Peta Rawan Gempa .....	II-20
Gambar 2. 11	Peta Rawan Tsunami .....	II-22
Gambar 2. 12	Peta Pergerakan Tanah .....	II-23
Gambar 2. 13	Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran .....	II-38
Gambar 2. 14	Peta Rencana Struktur Ruang.....	II-38
Gambar 2. 15	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran .....	II-41
Gambar 2. 16	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran .....	II-41
Gambar 2. 17	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020 .....	II-43
Gambar 2. 18	Gini Rasio Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020.....	II-46
Gambar 2. 19	Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020 .....	II-49
Gambar 2. 20	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran 2016-2020.....	II-51
Gambar 4. 1	Korelasi CSF dengan SWOT .....	IV-25

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB I

---

# PENDAHULUAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus menggunakan konsep SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, and Continuously Improve*).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menerapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1, yang ditegaskan kembali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 7, menyatakan bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Penyusunan dokumen RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan utamanya gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan yang mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Rencana RPJMD, melalui tahapan:



1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa perodesasi RPJMD.

Output dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 akan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran. Proses penerjemahan visi dan misi kepala daerah yang terpilih merupakan aspek utama dalam proses administratif penyusunan dokumen RPJMD.

Implementasi perencanaan pembangunan pada RPJMD, akan berhasil sesuai target apabila asumsi-asumsi yang tersaji berjalan dalam keadaan normal. Pada akhir periode RPJMD 2016-

2021, pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menyerang hampir seluruh dunia memiliki dampak cukup signifikan bagi daerah termasuk Kabupaten Pangandaran. Hal ini mempengaruhi capaian target kinerja RPJMD. Oleh karena itu dalam dokumen ini akan dijabarkan strategi dan tahapan mitigasi untuk bangkit dari dampak pandemi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



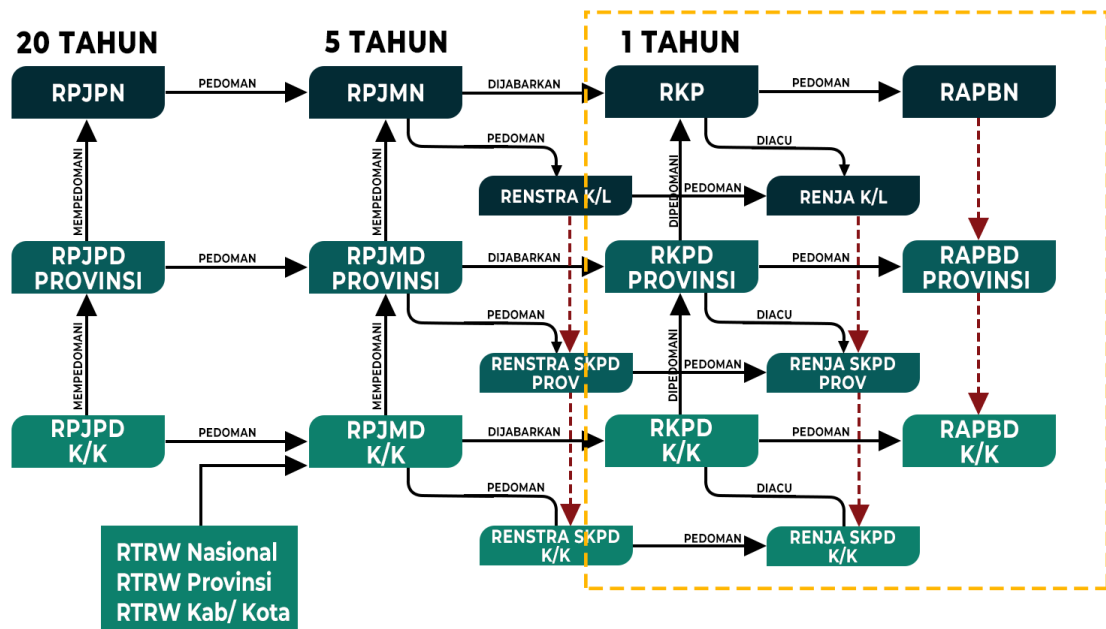
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Program Nawacita melalui RPJM Nasional 2020-2024 sesuai dengan urusan daerah, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Agar RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan

pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaah juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



(Sumber : Data Diolah, 2021)

**Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### 1.4 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 disusun untuk menjabarkan gambaran umum, potensi, permasalahan, isu strategis, Rencana visi misi serta kebijakan dan strategi Kabupaten Pangandaran melalui kerangka berpikir ilmiah.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap perangkat daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui



kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisis sehingga menghasilkan isu-isu strategis sebagai pijakan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang akan dijabarkan menjadi Strategi, Arah Kebijakan dan Program prioritas.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menunjukkan satu kesatuan logika perencanaan yang utuh dan konsisten.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX PENUTUP**

Pada bagian penutup akan disajikan dua bagan penting, yaitu Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, yang memberikan petunjuk bagaimana masa peralihan dokumen ini di waktu yang akan datang, serta keterkaitannya dengan dokumen lainnya seperti RKPD dan Renstra.

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB II

---

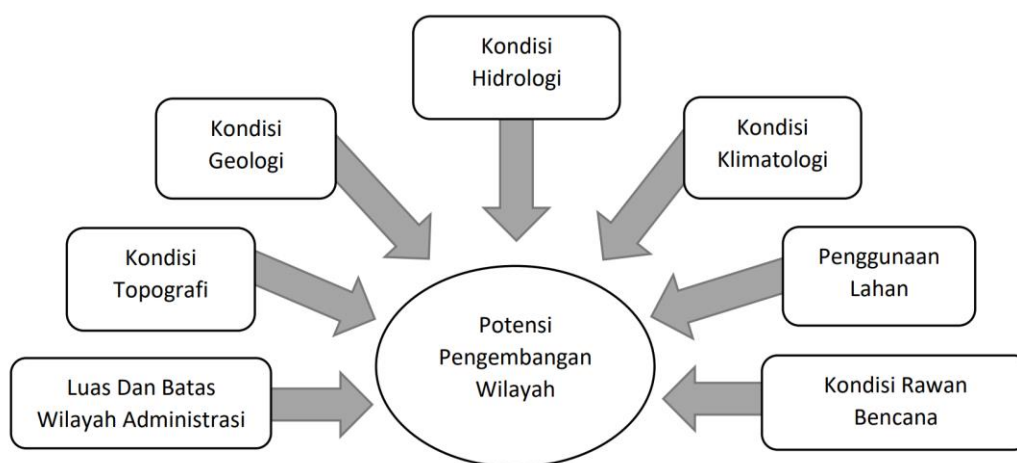
GAMBARAN UMUM  
KONDISI DAERAH

## BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan secara rinci mengenai informasi kondisi umum daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu gambaran umum daerah ini bisa dijadikan acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting kedepannya. Data yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD ini adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi umum daerah yang terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek demografi dan potensi pengembangan wilayah. Penjelasan dibawah ini adalah untuk menginformasikan mengenai keadaan Kabupaten Pangandaran secara umum. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi wilayah existing, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini:



(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Pangandaran**

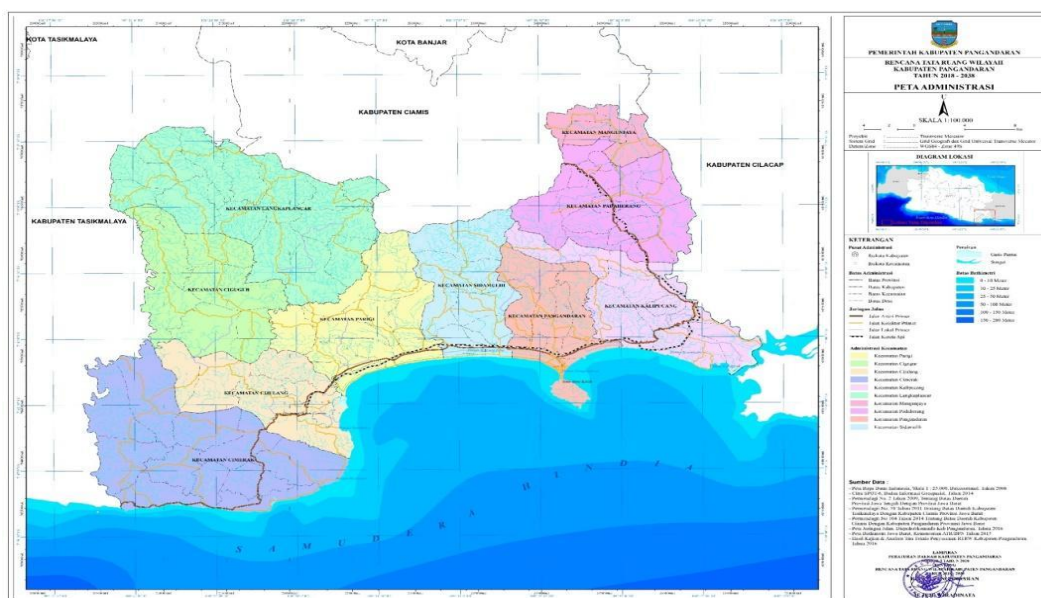
#### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi yang mempengaruhi potensi kawasan Kabupaten Pangandaran meliputi luas dan batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi daerah rawan bencana. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 2.1.1.1 Luas dan batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada  $108^{\circ}8'0''$  sampai dengan  $108^{\circ}50'0''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}24'0''$  sampai dengan  $7^{\circ}54'20''$  Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km<sup>2</sup>. Pembagian luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,23	10	53	122	399
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cimerak	190,22	11	51	99	357
4	Cigugur	117,82	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
6	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
7	Padaherang	112,76	14	60	142	443
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
10	Sidamulih	90,47	7	33	68	263
<b>Jumlah</b>		<b>1.134,23</b>	<b>93</b>	<b>430</b>	<b>917</b>	<b>3.196</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

### 2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran**

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur.</li><li>• Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.</li></ul>
2	Cijulang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li><li>• Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.</li></ul>
3	Cigugur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi.</li><li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.</li></ul>
4	Langkaplancar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran.</li><li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.</li></ul>
5	Parigi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl</li><li>• Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.</li></ul>
6	Sidamulih	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li></ul>

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.</li></ul>
7	Pangandaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi.</li><li>• Ketinggian: 3-500 mdpl.</li></ul>
8	Kalipucang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl).</li><li>• Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.</li></ul>
9	Padaherang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah ini bukan pesisir.</li><li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl.</li><li>• Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl).</li><li>• Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.</li></ul>
10	Mangunjaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir.</li><li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.</li></ul>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Jika dilihat dari kondisi atau tingkat kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran**

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.</li></ul>

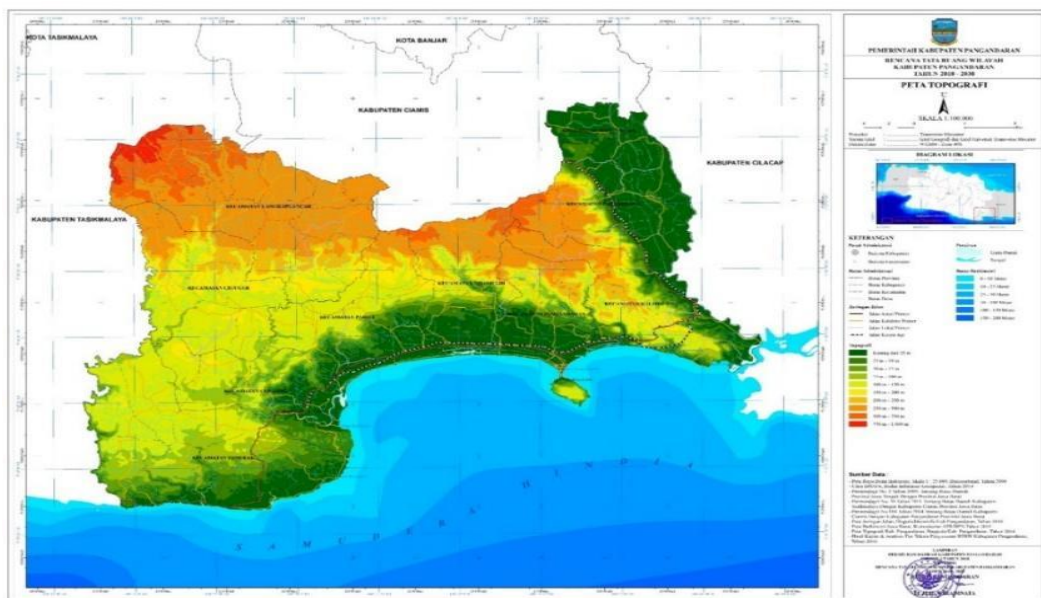


No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
2	Cijulang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.</li><li>• Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15%-25%.</li></ul>
3	Cigugur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.</li></ul>
4	Langkaplancar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.</li></ul>
5	Parigi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.</li></ul>
6	Sidamulih	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.</li></ul>
7	Pangandaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.</li></ul>
8	Kalipucang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%.</li><li>• Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggian.</li></ul>
9	Padaherang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng bervariasi antara 0%-40%.</li><li>• Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%.</li><li>• Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.</li></ul>
10	Mangunjaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.</li></ul>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

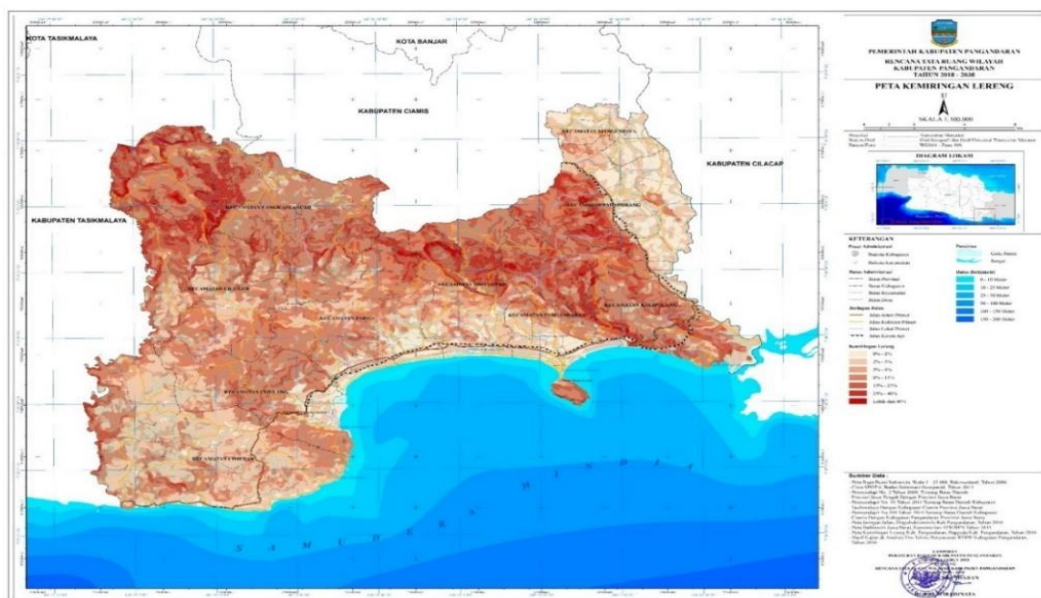
Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dipertahankan tanaman tegakannya, karena jika ditebang akan berpotensi

menimbulkan bencana longsor apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran

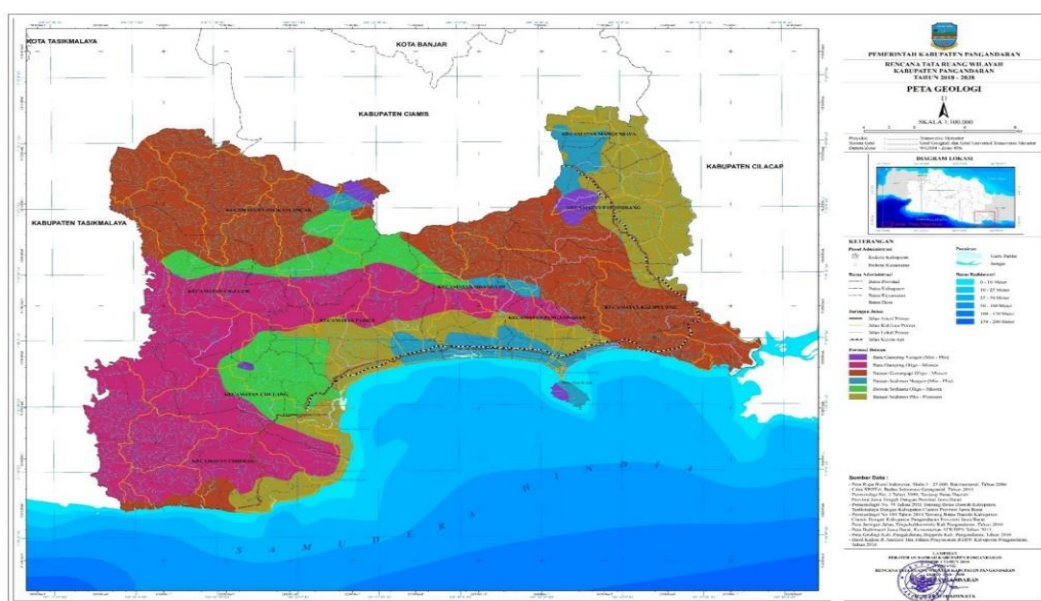


(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran**

### 2.1.1.3 Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara - barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat



berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran**

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng  $< 5\%$ . Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan air laut. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng  $> 25\%$ , ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya

Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.

a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang

- 1) Tanah lapukan berupa lempung pasir-an-kerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <math>< 5 \text{ l/detik}</math>. Mata air debit <math>< 10 \text{ l/detik}</math>. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
- 2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

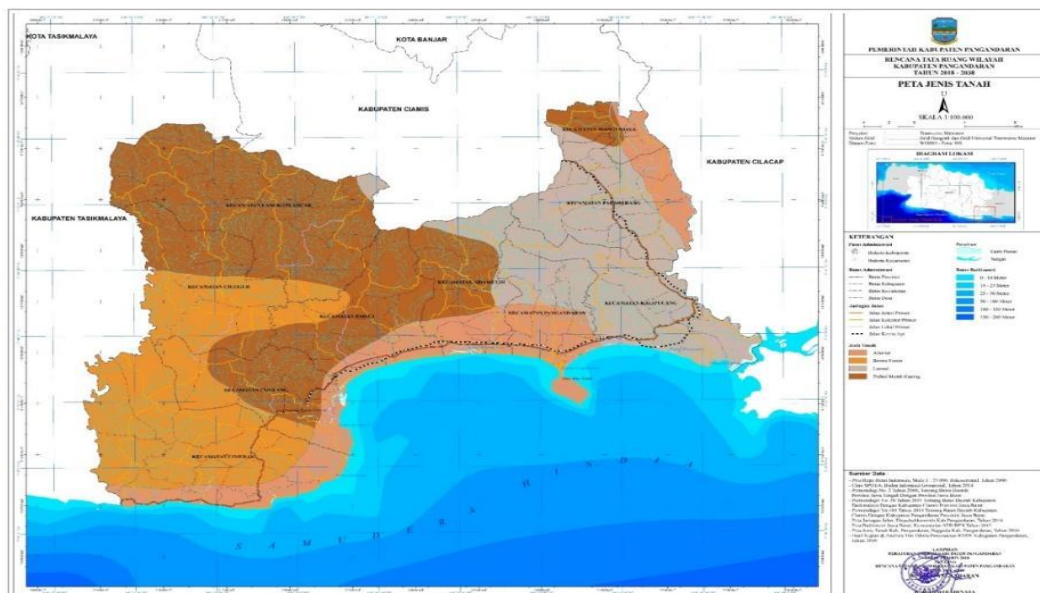
3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir-an, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran- Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air <math>> 50 \text{ l/detik}</math>. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat

subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran**

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo - Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	20.358,12
<b>Total</b>		<b>113.324,15</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.6 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran**

Pada Kabupaten Pangandaran terdapat 4 jenis tanah yang berbeda, antara lain alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah alluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium,

tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smearly*), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuff vulkanik.

Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran**

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	17.789,60
2	Brown Forest	26.458,61
3	Latosol	25.848,21
4	Podsol Merah Kuning	43.228,93
<b>Total</b>		<b>113.325,35</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

#### 2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran**

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	<b>Jumlah</b>	<b>113.325,11</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Gambar 2.7 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.

2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat ada isiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik.

Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

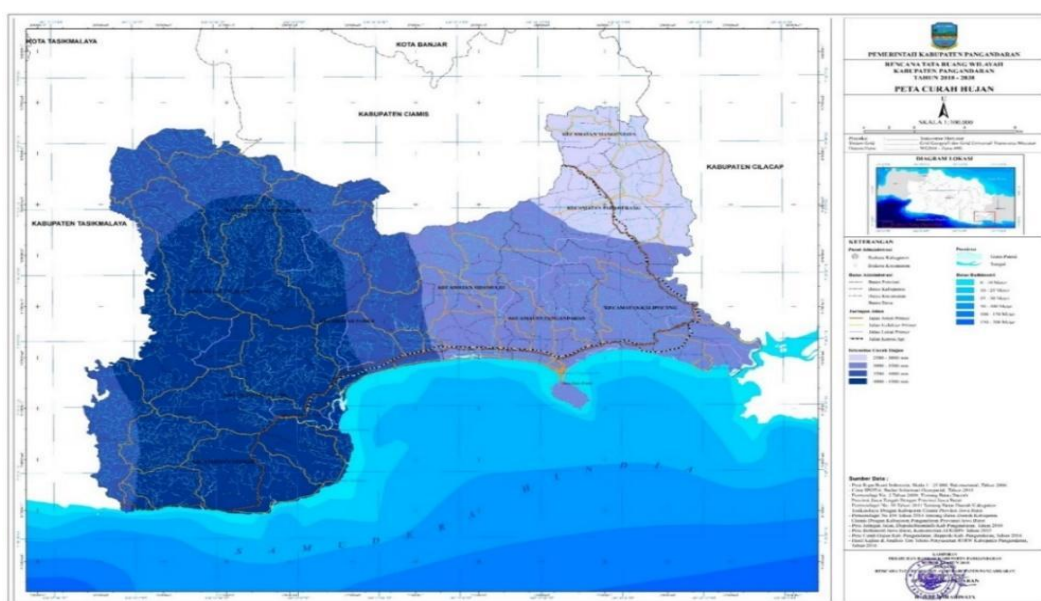
#### **2.1.1.5 Kondisi Klimatologi**

Secara umum Kabupaten Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30° C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.



Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim barat angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di



bawah ini.

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

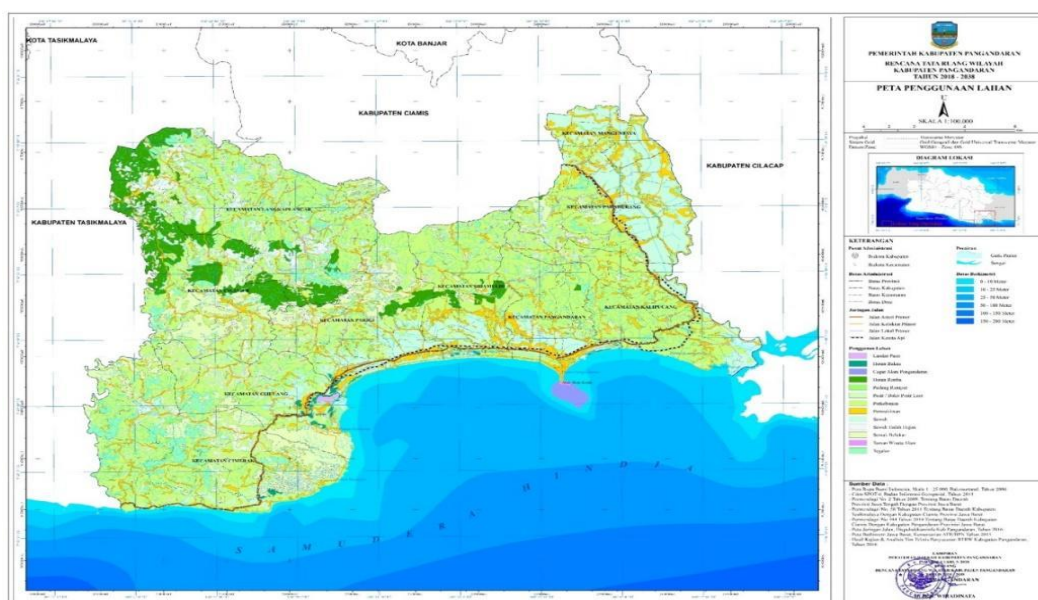
### 2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04, kedua untuk lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35 ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	9.651,00
2	Irigasi setengah teknis	3.578,98
3	Irigasi sederhana PU	1.950,00
4	Irigasi sederhana Non PU	
5	Tadah hujan	8.906,00
6	Pasang surut	9,00
7	Lebak	607,00
8	Rawa	-
9	Pekarangan dan bangunan	24.678,00
10	Tegal/kebun/ladang/huma	24.917,00
11	Penggembalaan/padang rumput	1.758,00
12	Sementara tidak diusahakan	9.031,00
13	Hutan Rakyat	30.202,04
14	Hutan Negara	17.047,56
15	Hutan Mangrove	310,00
16	Perkebunan negara/swasta	4.342,35
17	Rawa yang ditanami	-
18	Tambak	-
19	Kolam/empang	13.272,00
20	Lain-lain	-
<b>Grand Total</b>		<b>150.259,93</b>

(Sumber: LKPJ Kab. Pangandaran, 2020)



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

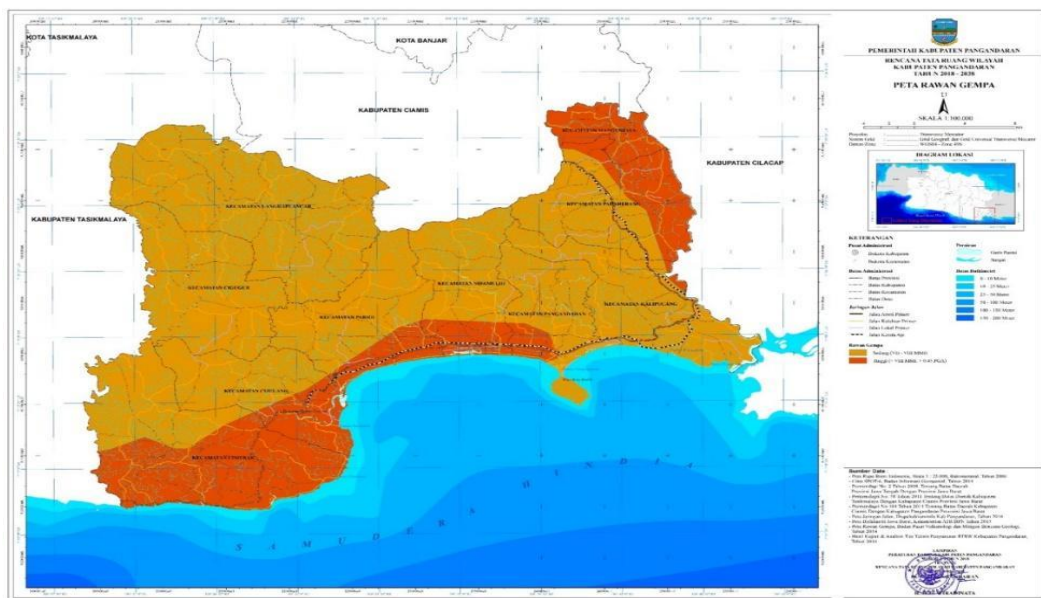
**Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan**

### 2.1.1.7 Kondisi Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

## 1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Di bagian tengah-timur Pangandaran terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

### Gambar 2.10 Peta Rawan Gempa

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantong tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami. Berikut tabel luasan potensi gempa dan tsunami di Kabupaten Pangandaran:

**Tabel 2.8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran**

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII – VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
<b>Total</b>		<b>113.325,10</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

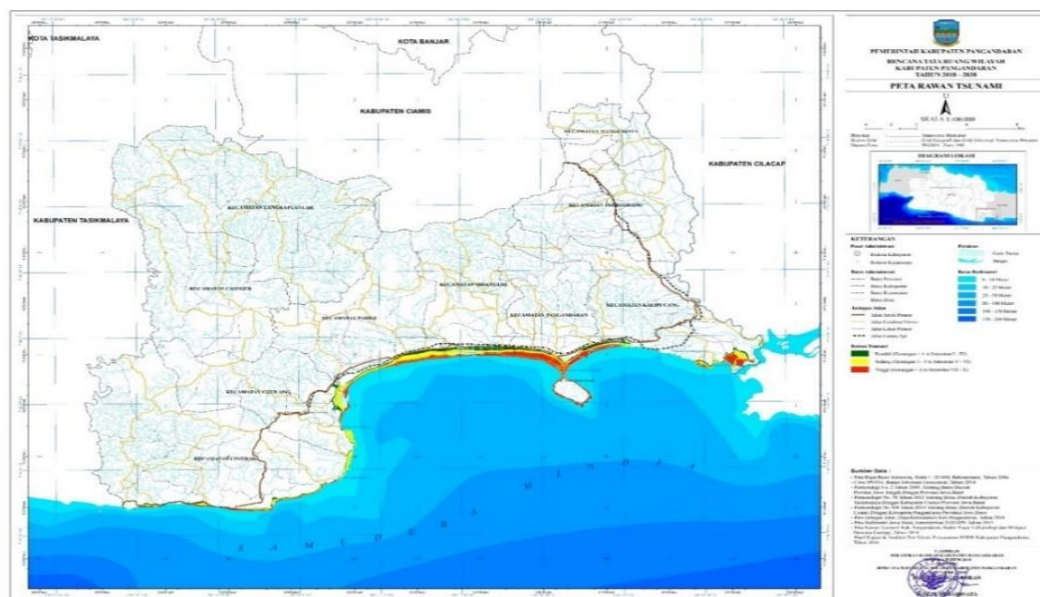
Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi terbesar gempa di Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI. > VII.

**Tabel 2.9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran**

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
<b>Total</b>		<b>3.265,12</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Tabel diatas menunjukkan bahwa total luasan potensi tsunami di Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi



tsunami ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar 1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

### Gambar 2.11 Peta Rawan Tsunami

## 2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

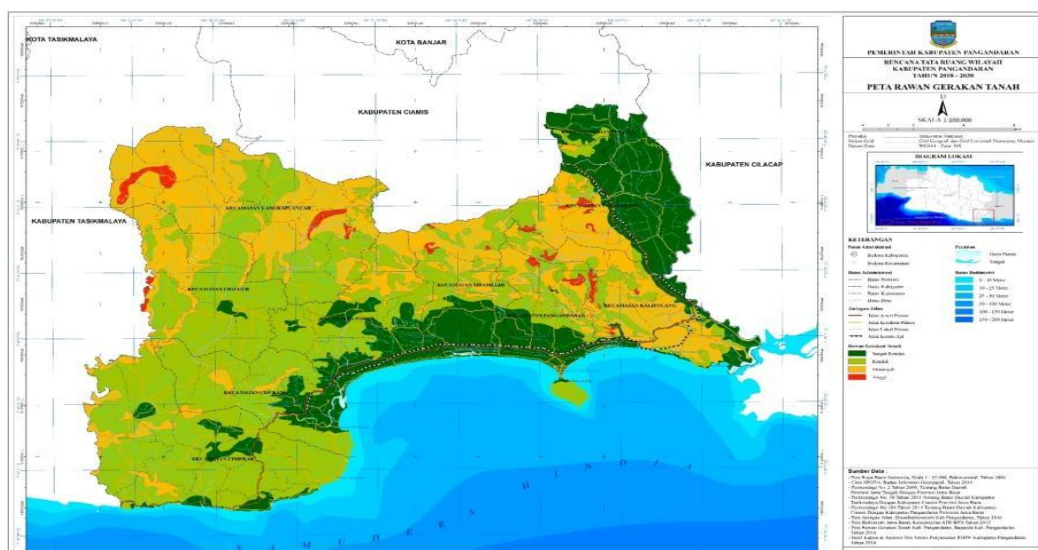
Kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar mengakibatkan daerah perbukitan Pangandaran rawan bencana gerakan tanah. Curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi gerakan tanah. Daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang besar sebaiknya dikelola dan dikonservasi dengan baik. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran**

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
<b>Total</b>		<b>113.325,11</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total luasan potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran sebesar 113.325,11 Ha. Hampir separuh dari luas total tersebut Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat kerawanan gerakan tanah yang rendah yakni sebesar 51.309,74 Ha dan tingkat yang sangat rendah sebesar 25.774,32 Ha.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

### Gambar 2.12 Peta Pergerakan Tanah

### 3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir.

**Tabel 2.11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran**

No	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
<b>Total</b>		<b>113.325,33</b>

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Meskipun sedikit namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.

#### 2.1.2 Aspek Demografi

Pada sub bab aspek demografi akan menjelaskan secara umum keadaan demografi di Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah penduduk, kepadatan

penduduk, komposisi penduduk, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang bekerja.

Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji betul-betul langsung salah satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang dapat diakibatkan tidak diupdatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

### 2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 yaitu 426.483 jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi penduduk laki-laki dan perempuan terlihat hampir seimbang yaitu 212.910 dan 213.573 jiwa.

Berdasarkan KK, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Padaherang dengan KK sebanyak 25.435 KK, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Cigugur dengan KK sebanyak 8.391 KK. Kecamatan Parigi sebagai ibukota kabupaten memiliki penduduk dengan KK sebanyak 17.730 KK. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk, kepadatan, dan jumlah KK di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020.

**Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, dan Jumlah KK di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Parigi	22.954	23.385	46.339	17.541
2	Cijulang	13.751	14.163	27.914	10.596
3	Cimerak	24.849	24.684	49.533	17.780
4	Cigugur	11.712	11.357	23.069	8.273
5	Langkaplancar	26.087	25.495	51.582	17.972
6	Mangunjaya	16.524	16.521	33.045	11.705
7	Padaherang	34.653	34.485	69.138	24.740
8	Kalipucang	19.603	19.386	38.989	13.887
9	Pangandaran	29.586	29.290	58.876	20.674
10	Sidamulih	14.822	14.935	29.757	11.191
<b>Jumlah</b>		<b>214.541</b>	<b>213.701</b>	<b>428.242</b>	<b>154.359</b>

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

### 2.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2020, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 194,07 jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 117,82 kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 250,23 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.036,73 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 766,34 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 57.913 jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

**Tabel 2. 13 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
			(Jiwa)	(Jiwa)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Parigi	111,23	46.339	416,61
2	Cijulang	94,37	27.914	295,79
3	Cimerak	190,22	49.533	260,40
4	Cigugur	117,82	23.069	195,80
5	Langkaplancar	205,54	51.582	250,96
6	Mangunjaya	31,98	33.045	1.033,30
7	Padaherang	112,76	69.138	613,14
8	Kalipucang	104,27	38.989	373,92
9	Pangandaran	75,57	58.876	779,09
10	Sidamulih	90,47	29.757	328,92
<b>Jumlah</b>		<b>1.134,23</b>	<b>428.242</b>	<b>377,56</b>

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

### 2.1.2.3 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan



tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal tersebut dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.14 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	14.095	13.170	27.265
2	05-09	16.564	15.368	31.932
3	10-14	17.457	16.326	33.783
4	15-19	15.977	15.555	31.532
5	20-24	17.777	16.800	34.577
6	25-29	16.626	15.739	32.365
7	30-34	14.536	13.988	28.524
8	35-39	14.961	15.169	30.130
9	40-44	14.297	15.115	29.412
10	45-49	14.752	15.837	30.589
11	50-54	14.264	15.479	29.743
12	55-59	12.990	13.886	26.876
13	60-64	11.392	11.892	23.284
14	65-69	8.228	7.585	15.813
15	70-74	4.938	5.173	10.111
16	75+	5.687	6.619	12.306
<b>Jumlah</b>		<b>214.541</b>	<b>213.701</b>	<b>428.242</b>

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan

pada segala bidang. Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk.

**Tabel 2.15 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif	Usia Tidak Produktif		Dependency Ratio
		(15 - 64)	0 - 14	65 +	
1	Laki-laki	147.572	48.116	18.853	48.129
2	Perempuan	149.460	44.864	19.377	44.877
<b>Jumlah</b>		297.032	92.980	38.230	92.993

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Tampak angka beban tanggungan telah kurang dari 50%. Hal ini berarti telah memasuki periode bonus demografi. Bila bonus demografi dimanfaatkan secara baik maka akan membuka *window of opportunity*. Kesempatan untuk mempercepat roda ekonomi menjadi lebih besar karena berlimpahnya penduduk usia produktif. Namun, bila periode bonus demografi tersebut tidak dimanfaatkan maka bukan *window of opportunity* yang diperoleh tetapi yang ada bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas bisa jadi meningkat. Bonus demografi yang disertai pembangunan manusia akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah. Usia produktif secara bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Tersedianya lapangan kerja akan mencegah sumber daya manusia berpendidikan tinggi mencari dan pindah ke Kabupaten lain. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas tinggal di daerahnya maka keberhasilan pembangunan manusia semakin kentara. Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

#### **2.1.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia

(IPM) karena salah satu faktor dalam IPM yaitu Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai Indeks Pendidikan.

Untuk lebih jelasnya kondisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran 2020**

NO	STATUS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/Blm Sekolah	53.281	49.846	103.127
2	Belum Tamat SD/Sederajat	15.694	14.360	30.054
3	Tamat SD/Sederajat	78.841	90.160	169.001
4	SLTP/Sederajat	34.467	32.801	67.268
5	SLTA/Sederajat	25.126	19.376	44.502
6	Diploma I/II	845	875	1.720
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.068	1.329	2.397
8	Diploma IV/Strata I	4.791	4.756	9.547
9	Strata-II	407	188	595
10	Strata-III	21	10	31
Jumlah		214.541	213.701	428.242

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan strata 1 sebanyak 9.169 orang, tingkat Diploma I dan II sebesar 1.765 orang, SLTA/Sederajat sebesar 43.869 orang dan SLTP/Sederajat sebesar 67.124 orang. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 96.524 orang. Dari capaian tersebut maka menghasilkan Indeks Pendidikan sebesar 59,33. Angka dimaksud masih rendah

apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat sehingga perlu ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak angka Indeks Pendidikan Kabupaten Pangandaran.

#### **2.1.2.5 Jumlah Penduduk yang Bekerja**

Dalam bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi dengan semakin banyaknya angka pengangguran yang tersalurkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

**Tabel 2.17 Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**



NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Belum/tidak bekerja	74.726	62.248	136.974
2.	Mengurus rumah tangga	30	89.982	90.012
3.	Pelajar/mahasiswa	15.052	12.146	27.198
4.	Pensiunan	1.492	662	2.154
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.253	1.767	4.020
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	152	1	153
7.	Kepolisian (Polri)	196	3	199
8.	Perdagangan	1.806	1.197	3.003
9.	Petani/pekebun	41.379	22.564	63.943
10.	Peternak	75	18	93
11.	Nelayan/perikanan	2.370	32	2.402
12.	Industri	115	13	128
13.	Konstruksi	24	3	27
14.	Transportasi	155	-	155
15.	Karyawan swasta	6.044	2.252	8.296
16.	Karyawan BUMN	328	47	375
17.	Karyawan BUMD	58	20	78
18.	Karyawan honorer	1.355	1.590	2.945
19.	Buruh harian lepas	13.469	1.972	15.441
20.	Buruh tani/perkebunan	14.243	6.347	20.590
21.	Buruh nelayan/perikanan	891	46	937
22.	Buruh peternakan	61	21	82
23.	Pembantu rumah tangga	4	374	378
24.	Tukang cukur	30	-	30
25.	Tukang listrik	24	1	25
26.	Tukang batu	144	2	146
27.	Tukang kayu	644	-	644
28.	Tukang sol sepatu	8	1	9
29.	Tukang las/pandai besi	89	1	90
30.	Tukang jahit	473	316	789
31.	Tukang gigi	4	-	4
32.	Penata rias	3	42	45
33.	Penata busana	-	2	2
34.	Penata rambut	5	6	11
35.	Mekanik	335	1	336
36.	Seniman	60	16	76
37.	Tabib	6	-	6
38.	Paraji	1	56	57
39.	Perancang busana	2	-	2
40.	Penerjemah	2	-	2
41.	Imam masjid	105	-	105
42.	Pendeta	2	1	3
43.	Pastor	-	-	-
44.	Wartawan	19	-	19
45.	Ustadz/mubaligh	269	37	306
46.	Juru masak	1	6	7
47.	Promotor acara	-	-	-
48.	Anggota DPR RI	-	-	-
49.	Anggota DPD RI	-	-	-
50.	Anggota BPK	-	-	-
51.	Presiden	-	-	-

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
52.	Wakil Presiden	-	-	-
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	-	-	-
54.	Anggota Kabinet Kementerian	-	-	-
55.	Duta Besar	-	-	-
56.	Gubernur	-	-	-
57.	Wakil Gubernur	-	-	-
58.	Bupati	1	-	1
59.	Wakil Bupati	1	-	1
60.	Walikota	-	-	-
61.	Wakil Wali Kota	-	-	-
62.	Anggota DPRD Provinsi.	2	-	2
63.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	32	8	41
64.	Dosen	18	13	31
65.	Guru	394	584	978
66.	Pilot	-	-	-
67.	Pengacara	4	-	4
68.	Notaris	3	1	4
69.	Arsitek	3	-	3
70.	Akuntan	1	-	1
71.	Konsultan	11	3	14
72.	Dokter	30	31	61
73.	Bidan	-	219	219
74.	Perawat	76	86	162
75.	Apoteker	6	12	18
76.	Psikiater/psikolog	-	-	-
77.	Penyiar televisi	-	-	-
78.	Penyiar radio	1	2	3
79.	Pelaut	44	-	44
80.	Peneliti	4	-	4
81.	Sopir	1.231	-	1.231
82.	Pialang	4	2	6
83.	Paranormal	1	-	1
84.	Pedagang	3.071	2.637	5.708
85.	Perangkat Desa	947	190	1.137
86.	Kepala Desa	76	1	77
87.	Biarawan/biarawati	-	-	-
88.	Wiraswasta	30.057	6.090	36.147
89.	Pekerjaan lainnya	19	28	47
Jumlah		<b>214.541</b>	<b>213.701</b>	<b>428.242</b>

(Sumber: Disdukcapil Kab. Pangandaran, Semester 2 Tahun 2020)

Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan oleh penduduk saat pengurusan KTP, sehingga ada kemungkinan tidak menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak adanya updating pekerjaan pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.

Berdasarkan Tabel 2.17, dapat disampaikan bahwa masih relatif tingginya jumlah yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan

kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 130,149 orang dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Adapun data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 2.18 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No	Item	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta dan Perangkat Daerah/PD lainnya)	260
2	Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruannya	9
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar(laki-laki dan perempuan)	1.833
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang bekerja	649
5	Jumlah pencari kerja yang bersertifikat	550
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam negeri dan luar negeri)	LN : 59 DN : 649
7	Data perusahaan penempatan migran indonesia(P2MI) dan sending dan organization(SO untuk negara tujuan)	14
8	Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	1
9	Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK	1.114
10	Data perusahaan yang mulai operasi Kembali	384
11	Angka perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan	5
12	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan	5
13	Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)	Ket :1078 Kes :3841

(Sumber : Disnakertrans Kabupaten Pangandaran Tahun, 2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran cukup baik yaitu ada 550 orang pencari kerja yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,

diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Masih rendahnya kesadaran warga untuk pemutakhiran data status pekerjaan juga dapat dilihat dari data jumlah penduduk dengan pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Tabel 2.19 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021**

Instansi	Pendidik		Tenaga Kependidikan		Kepsek	Jumlah
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS		
SD NEGERI	1171	949	8	217	220	2565
SD SWASTA	0	15	0	2	1	18
SMP NEGERI	587	315	18	181	28	1129
SMP SWASTA	0	150	0	14	14	178
<b>Total</b>						<b>3890</b>

(Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran per Bulan Juni Tahun 2021)

Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sektoral. Data diatas menunjukkan masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

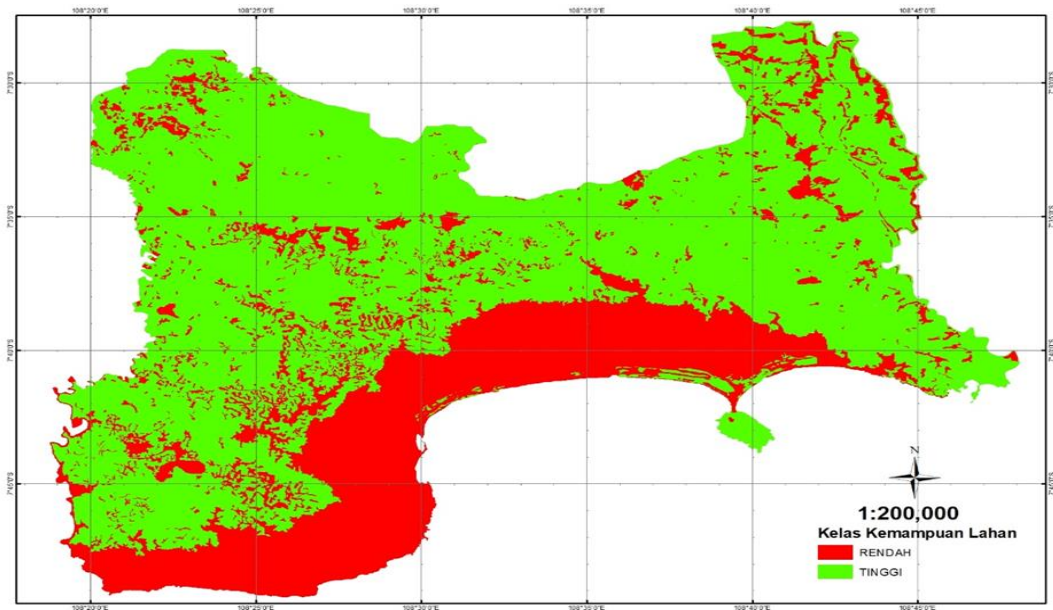
### 2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah didapatkan dari hasil analisis satuan kemampuan lahan (SKL). Inti dari analisis keseluruhan SKL ini merupakan analisis kemampuan lahan yang melihat daya dukung lahan yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan/perdesaan dengan intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu permukiman, pertanian, perkebunan dan aktivitas budidaya lainnya.

Dalam analisis SKL yang menghasilkan kemampuan pengembangan, lahan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas kemampuan pengembangan tinggi, untuk menjadi kawasan budidaya, sementara kawasan dengan kelas kemampuan pengembangan rendah hanya bisa digunakan untuk

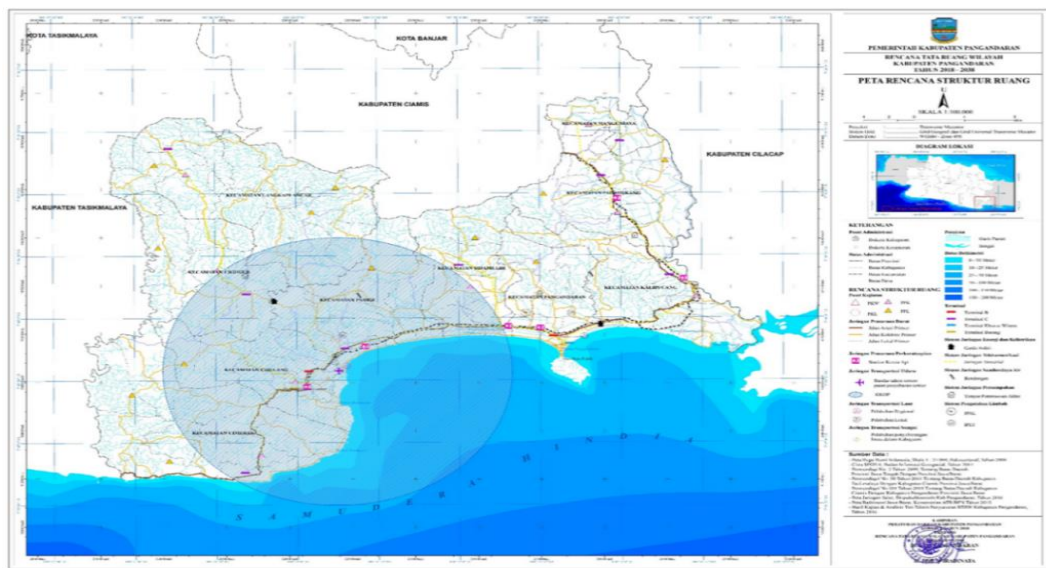


kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomr 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran**



Gambar 2. 1 Peta Rencana Struktur Ruang  
Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2. 14 Peta Rencana Struktur Ruang**

Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.

## 1. Kawasan Lindung

Pada rencana kawasan lindung terdapat kawasan resapan air sebesar 3,02% dari jumlah luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sempadan sungai sebesar 3,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan sekitar danau/situ/embung sebesar 0,03% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, cagar alam pananjung Pangandaran sebesar 0,40% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, cagar alam laut pananjung Pangandaran sebesar 0,41% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan pantai berhutan bakau sebesar 0,17% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, taman wisata alam pananjung sebesar 0,03% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan lindung geologi sebesar 13,95% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran.

## 2. Kawasan Budidaya

Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar 7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

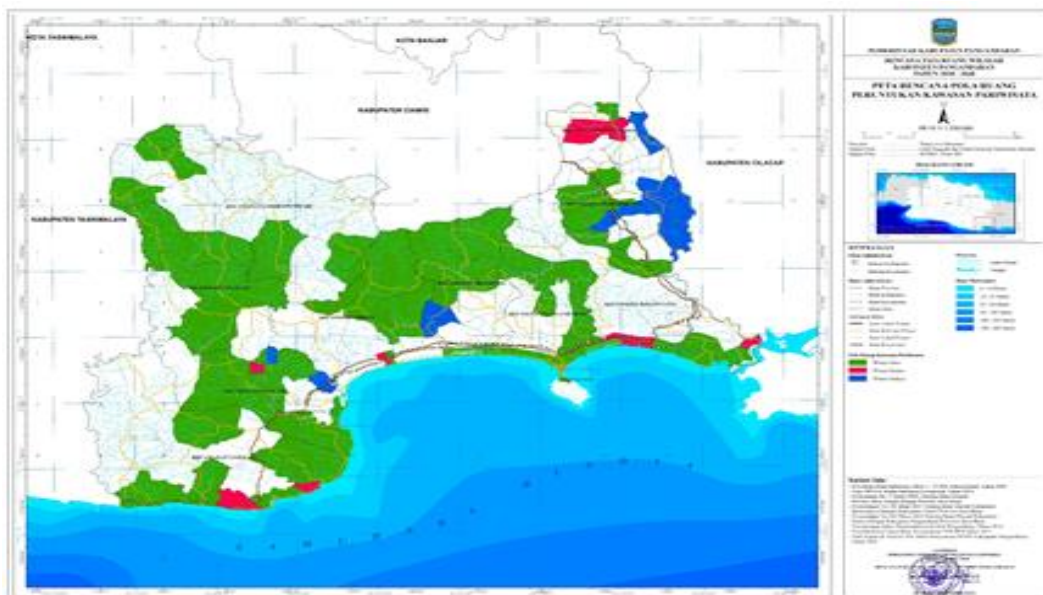
**Tabel 2.20 Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
----	--------------------	-----------	-----

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
<b>Rencana Kawasan Lindung</b>			
1	Kawasan Resapan Air	3.441,07	3,02 %
2	Kawasan Sempadan Pantai	636,60	0,56 %
3	Kawasan Sempadan Sungai	3.990,00	3,50 %
4	Kawasan Sekitar danau/situ/embung	33,06	0,03 %
5	Cagar Alam Pananjung Pangandaran	454,62	0,40 %
6	Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran	470	0,41 %
7	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	188,00	0,17 %
8	Taman Wisata Alam Pananjung	34,32	0,03 %
9	Kawasan Lindung Geologi	15.882,42	13,95 %
10	Kawasan Bencana Tsunami	674,00	0,59 %
<b>Jumlah</b>		<b>25.804,09</b>	<b>22,66 %</b>
<b>Rencana Kawasan Budidaya</b>			
1	Hutan Produksi	8.626,00	7,58 %
2	Hutan Produksi Terbatas	8.102	7,12 %
3	Pertanian Lahan Basah	15.125,00	13,28 %
4	Pertanian Lahan Kering	4.997,00	7,12 %
5	Perkebunan	29.894,00	26,26 %
6	Kawasan Industri	565,08	0,50 %
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.614,00	7,57 %
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.125,00	10,65 %
<b>Jumlah</b>		<b>88.046,87</b>	<b>77,34 %</b>
<b>Jumlah Total Kabupaten</b>		<b>113.850,98</b>	<b>100%</b>

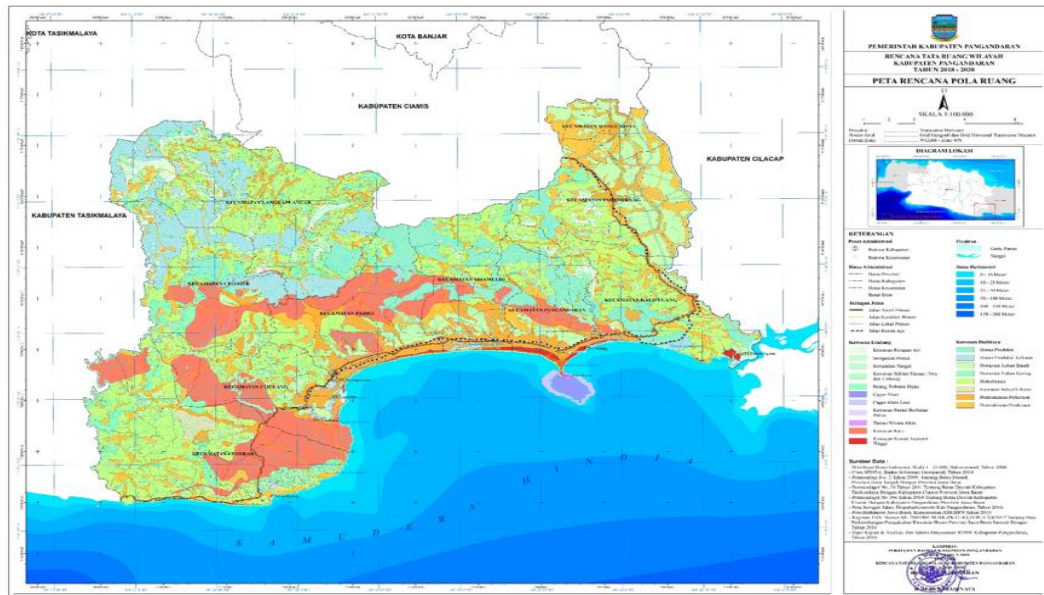
(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran.



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**



(Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

**Gambar 2.16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran**

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera terdapat beberapa aspek-aspek pembangunan yang penting dan harus diperhatikan, meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Analisis terhadap aspek tersebut dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi. Berikut adalah penjelasan secara rinci indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

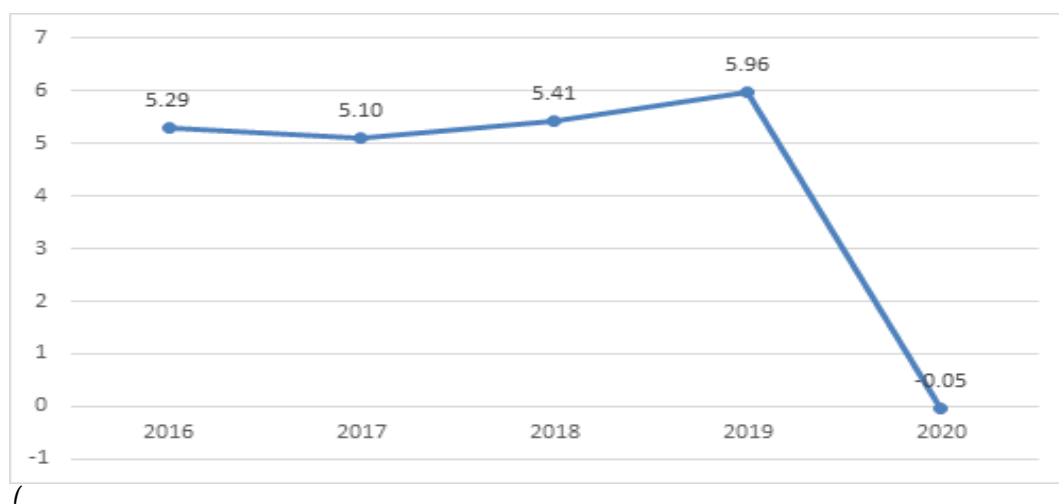
### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Penjabaran terkait indikator tersebut, sebagai berikut:

### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.



(Sumber: BPS Ciamis, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren positif dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Namun demikian tahun

2020 terkoreksi tinggal mencapai -0,05 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.21 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2016-2020**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 445,30	2 564,11	2 822,71	3 050,50	3 143, 79
B	Pertambangan dan Penggalian	62,84	60,72	62,74	62,34	64,07
C	Industri Pengolahan	425,18	455,73	501,95	542,22	549,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,40	7,14	7,58	7,96	8,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05	1,24	1,45	1,67	1,84
F	Konstruksi	727,32	800,97	893,88	1 004,70	928,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 767,24	1 919,31	2 085,53	2 281,84	2 243,97
H	Transportasi dan Pergudangan	1 052,90	1 144,39	1 234,67	1 318,35	1 330,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	732,52	823,30	932,14	1 060,12	1 091,41
J	Informasi dan Komunikasi	128,75	146,71	158,39	169,64	229,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	171,69	185,38	201,70	208,23	214,09
L	Real Estate	218,51	242,24	269,48	298,43	328,40
M,N	Jasa Perusahaan	80,,72	89,16	100,79	124,32	112,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285,63	297,23	314,16	316,30	318,26
P	Jasa Pendidikan	435,91	501,88	584,42	658,67	728,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,71	20,88	23,07	25,67	25,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	123,17	140,31	157,55	180,73	179,78
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>8 683,89</b>	<b>9 400,78</b>	<b>10 352,22</b>	<b>11 311,69</b>	<b>11 498,28</b>

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan output perkapita yang dilihat secara jangka panjang. Pengertian jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dalam peningkatan output perkapita yang secara bersamaan memberikan berbagai alternatif dalam hal konsumsi barang dan jasa serta beriringan pada peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan

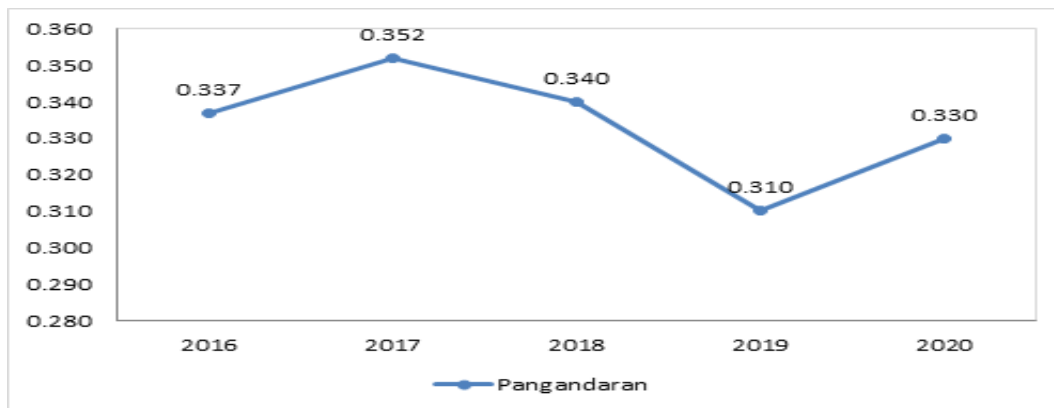
masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah/regional dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran kontribusi sektor lapangan usaha yang terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup stabil dan tidak terpengaruh oleh adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sektor-sektor yang berpengaruh terhadap kontribusi PDRB, tetap mengalami kenaikan. Hanya beberapa faktor saja yang mengalami penurunan, seperti sektor Konstruksi, Jasa perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa lainnya. Dengan demikian, beberapa sektor tersebut jangan dijadikan program unggulan.

#### **2.2.1.2 Indeks Gini**

Peningkatan akan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan penduduk pada suatu wilayah. Peningkatan pendapatan yang terjadi sudah seharusnya merata dan dapat dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat yang berarti bahwa dalam aspek pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang menjadi penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan dari hasil pembangunan suatu wilayah dalam hal ini yaitu Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan adanya ketimpangan pada hasil pembangunan mengarah pada timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat nantinya.



(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.18 Gini Rasio Kabupaten Pangandaran Tahun 2016–2020**

Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan/ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gini rasio Kabupaten Pangandaran menunjukkan angka yang tidak tetap atau fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2017 meningkat dengan sebesar 0,352%, pada tahun 2018 menurun 0.340%, kemudian pada tahun 2019 menurun hingga 0.310% yaitu 0.310% dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan menjadi 0.330%. Hal ini terjadi salah satunya akibat dampak Pandemi Covid-19.

### 2.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan sebuah proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Pada tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat dilihat dari tingkat konsumsi sebagai akibat adanya



peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk juga bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah telah berupaya melaksanakan berbagai macam kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

**Tabel 2.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (P0)	10,23	10,00	8,12	7,71	8,99
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	40,14	39,46	32,19	30,73	36,05

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

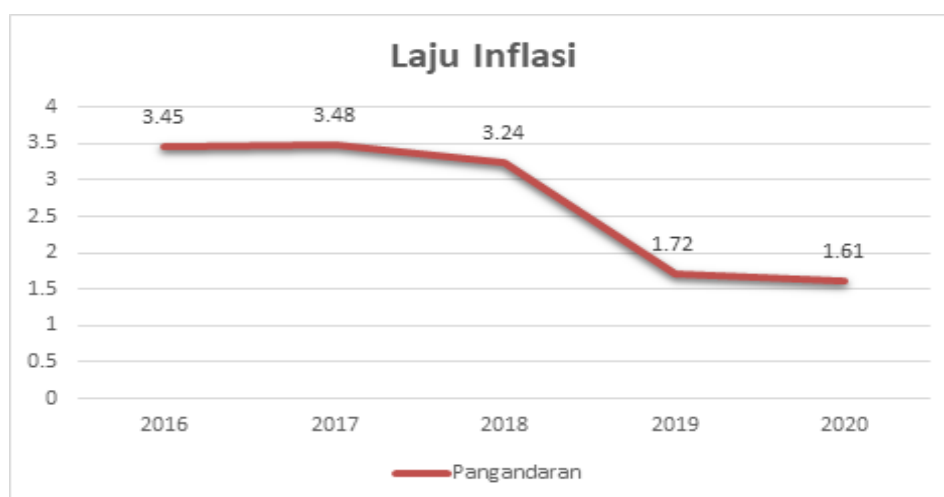
Capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016-2019 cukup berhasil yang ditunjukkan dengan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,28% yang salah satunya disebabkan oleh adanya wabah Pandemi Covid-19.

Jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara rata-rata. Penurunan dari tahun 2016-2019 menunjukkan usaha dari perangkat daerah terkait penurunan penduduk miskin cukup berhasil.

#### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga pada barang, jasa, maupun faktor produksi. Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas mencakup barang, jasa, atau faktor produksi yang lainnya. Inflasi mengakibatkan adanya penurunan pada daya beli masyarakat, yang diartikan bahwa pada tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami guncangan atau terganggu karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS. Oleh karena di Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip diantaranya Kota Tasikmalaya, walaupun pada kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, tapi diharapkan perbedaannya sedikit.



(Sumber: BPS Ciamis, 2021)

### **Gambar 2.19 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2020**

Pada tahun 2020, perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 2016-2020 inflasi secara umum telah mencapai 1,61%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,11%.

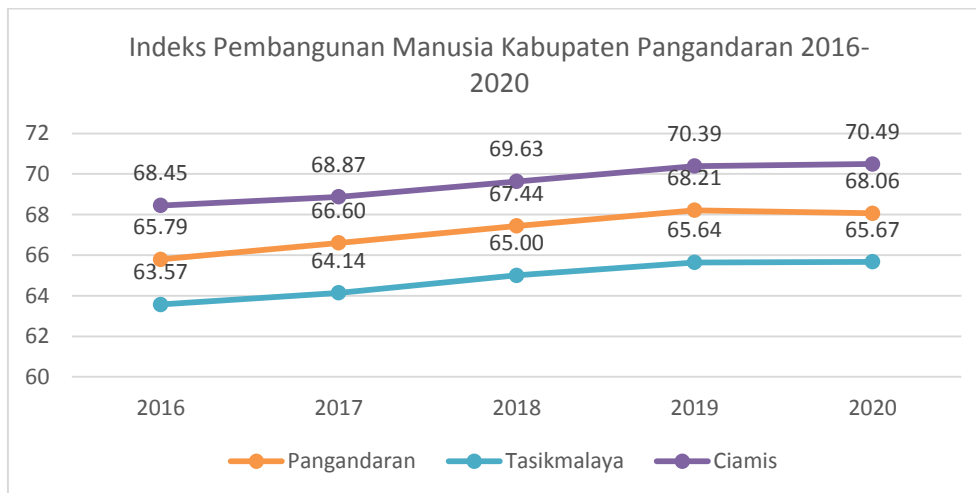
Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.

#### **2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kedalam negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam pengukuran peringkat negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) memeringkatkan semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia pada tiap-tiap negara tersebut.

IPM merupakan indikator komposit tunggal yang tidak dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu digunakan untuk mengukur tiga dimensi pokok dalam pembangunan manusia yang mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) masyarakat. Ketiga kemampuan

dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.



(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

**Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran 2016-2020**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan menurun pada kurun waktu tahun 2020, perkembangan angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan kualitas pada tahun 2020.

Kondisi ini menjadi indikasi adanya penurunan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan angka capaian tersebut walaupun mengalami penurunan di tahun 2020 namun telah melebihi angka target capaian akhir RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 67,42 poin. Menurut konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran masih dapat dikategorikan sedang, yaitu capaian IPM antara 60-70.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pada fokus kesejahteraan sosial merupakan fokus yang berupaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Fokus kesejahteraan sosial menganalisis kinerja terhadap beberapa indikator antara lain Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Indikator-indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### 2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

**Tabel 2.23 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran**

Kelompok Umur	2019	2020
15-24	N/A	99,46
15-44	N/A	99,69
15+	N/A	98,59
45+	N/A	97,47

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa data angka melek huruf pada tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran tidak tersedia. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 99,46 persen kelompok umur 15 tahun keatas dan sebanyak 97,47 persen kelompok umur 45 keatas sudah melek huruf. Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran melek huruf.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran melalui pendidikan dan usaha lain sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.

### 2.2.2.2 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. - Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

**Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI/Sederajat	95,19	95,76	99,55	102,81
SMP/MTs/Sederajat	84,72	84,62	94,64	95,72
SMA/SMK/MA/Sederajat	67,92	67,48	85,83	83,94

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2020 APM di Kabupaten Pangandaran cenderung turun kecuali untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat terdapat kenaikan. Sementara APK sebaliknya cenderung naik, kecuali jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat terdapat penurunan.

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu dukungan dari pihak yang lain juga membantu masyarakat dalam meningkatkan minat pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

### 2.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator terkait pengukuran ketenagakerjaan yang memberikan gambaran mengenai masyarakat di suatu wilayah yang aktif secara ekonomi dengan menghitung rasio antara Angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja) dengan total penduduk usia kerja pada kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran 2016-2020**

Indikator Capaian Tenaga Kerja	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	N/A	77,74	75,08	76,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.20	3.34	3,58	4,48	5,08
Jumlah Penduduk Usia Kerja	223.403	243.702	240.175	234.003	245.619

(Sumber: BPS Ciamis; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangandaran berfluktuatif namun cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari data tingkat pengangguran terbuka mulai naik dari 4,48 pada tahun 2019 menjadi 5,08 pada tahun 2020. Padahal data di tahun 2017 menunjukkan nilai 3,34.

Mayoritas data di tahun 2020 mengalami peningkatan. Salah satu faktornya adalah ketersediaan lapangan usaha yang belum memadai dibandingkan penduduk usia kerja. Apalagi pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, sehingga sangat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat pengangguran yang signifikan.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dan olahraga, maka terdapat beberapa indikator kinerja sebagai wujud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek budaya dan olahraga. Penjabaran indikator capaian tersebut, disajikan di bawah ini:

#### 2.2.3.1 Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang digambarkan dengan indikator meliputi penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.26 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator Urusan Kebudayaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	6	15	18	4	N/A
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	N/A	N/A	2	2	N/A
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	N/A	N/A	30	30	30

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Capaian dari Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kebudayaan cenderung stagnan dan berfluktuatif. Adapun penjabarannya adalah jumlah penyelenggaraan festival sangat berfluktuatif. Jumlah karya budaya yang dilestarikan juga stagnan. Hal ini juga diikuti dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan tetap pada 30 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020.

Data di tahun 2020 terkait jumlah cagar budaya signifikan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kegiatan pembatasan sosial yang berdampak pada kegiatan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran. Pembatasan sosial ini dimaksudkan untuk



mengurangi kerumuman dan mencegah penularan virus yang lebih luas.

### 2.2.3.2 Olahraga

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilakukan melalui berbagai pembinaan generasi muda dan olahraga. Pembangunan pemuda dan olahraga dilihat dari indikator capaian yang meliputi jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Adapun capaian fokus tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.27 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	127	127	127	127	146
Jumlah Gedung Olahraga	42	42	42	117	117

(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)

Capaian Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 146 klub pada tahun 2020. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah gedung olahraga yang berjumlah 117 pada tahun 2020.

Peningkatan jumlah klub olahraga di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa partisipasi olahraga di kabupaten ini cukup tinggi. Fasilitas gedung olahraga yang menunjukkan jumlah 117 gedung juga menjadi bukti bahwa olahraga di Kabupaten Pangandaran cukup digemari.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja Pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan.

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Dalam UU nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing urusan.

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten pangandaran didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.28 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Siswa PAUD	Orang	N/A	7220	7347	7181	8005
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	106,34	100,64	104,5	97,03	96
Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	105,75	98,2	98,82	99,29	98
Angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	60,29	63	0	0	0
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91	78	93	88	91
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	69	72	78	67	69
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	44,15	43	0	0	0
Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun	Orang	11.230	12.071	12.451	12.553	12.032
Jumlah gedung sekolah SD/MI	Unit	349	343	343	344	344
Rasio Sekolah / penduduk Usia 13-15	Rasio	1:356,37	1:366,54	1:363,26	1:361,75	1:377,06
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	36.069	37.689	37,555	40,211	39,991
Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	Unit	84	85	87	86	85
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	18,528	19,427	19,253	19,173	19,984

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS / penduduk Usia 7-12/3-15	Rasio	0,129166 667	0,13402 7778	0,25833 3333	0,1375	0,13819 4444
Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	Unit	433	428	430	430	429
Jumlah Penduduk Usia (7-12) + (13-15) thn	Orang	54,597	57,116	56,808	59,384	59,975
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	Rasio	79.31	74.94	75.69	72.41	N/A
Jumlah Guru SD/MI	Orang	3547	3613	3518	3539	1584
Jumlah Murid SD/MI	Orang	38357	37930	39246	39015	38,498
Rasio	Rasio	1:11,09	1:10,49	1:11,15	1:11,03	1:12,91
Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	1629	1607	1503	1547	680
Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	19593	19077	19026	19036	19,498
Rasio	Rasio	12:03	0.51875	0.54583	12:31	27
Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	5176	5220	5021	5086	2,264
Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	57950	57007	58272	58051	57,996
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	1:12,03	1:11,87	1:12,69	1:12,31	1:12,57
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Orang	2673	2283	2947	4527	4349
Jumlah Guru SDMI, SMPMTs, SMA/ SMK/ MA	Orang	5176	5220	5021	4627	4531

(Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)

Jumlah murid di Kabupaten Pangandaran didominasi oleh tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang jumlahnya mencapai 57,996 orang pada tahun 2020. Jika dilihat pada indikator Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan, faktor yang mempengaruhi menurunnya APM SD/MI dan SMP/MTS antara lain, yaitu masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sesuai umur masuk sekolah dan keterbatasan biaya.

Sedangkan pada indikator Angka Partisipasi Murni untuk Paket A dan Paket B cenderung berfluktuatif. Sedangkan APM untuk paket C menurun hingga 0% pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dari data yang disajikan terlihat bahwa kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup baik sehingga meningkatkan indikator kinerjanya seperti Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.

### 2.3.1.2 Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). Di Kabupaten Pangandaran, angka kematian bayi setiap tahunnya cenderung menurun. Dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 angka kematian bayi menurun menjadi 8,24 dan pada tahun 2020 menjadi 5,43. Selain itu, Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran pada Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 yaitu 148,91. Setiap tahunnya menurun hingga tahun 2020 menjadi 49,39.

**Tabel 2.29 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	10,15	8,93	8,24	5,4	5,43
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (%)	Rasio	148,91	50,75	9,91	49,08	49,39
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun	Rasio	11,68	10,59	8,73	6,55	5,6
Rasio Posyandu Per Seratus Balita	Rasio	3,18	2,93	2,31	1,83	1,88
Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1:27.046	1:27.268	1:27.838	1:28.319	1:28.432
Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Rasio	1:11.591	1:11.686	1:11.930	1:12.494	1:12.544
Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	1:67.614	1:19.477	1:20.024	1:20.228	1:20.309
Prevalensi Balita Stunting	%	4,8	3,7	4,1	3,3	3,94
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,4	70,56	70,84	71,12	71,4



Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu	Orang	9	5	3	3	5
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	Jumlah	6044	6191	6112	6074	6095
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	N/A	116,22	103,13	110,19	97,38
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Rasio	88,03	93	99,15	99,23	102,10
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92,47	93,55	86	88,17	87,1
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	93,7	98,1	100,5	102,8	101,5
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	0	0	0	0	0
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	%	100	37,38	N/A	34,39	N/A
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	51,1	61,7	59,2	59,2	40,1
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Angka	75,2	89,1	80,8	93,2	81,5
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Angka	0,9	0,3	0,2	0	0,23
Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	51,1	62	59	59	40
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	81,4	70,9	N/A	N/A	56,8
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita Diare Yang Ditangani	%	N/A	83,5	30,3	53,2	66,2
Angka Kejadian Malaria	Angka	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tingkat Kematian Akibat Malaria	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi anak balita	%	100	100	100	100	100



Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat						
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	N/A	0,41	1,18	1,04	0,27
Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Nifas	%	N/A	94,08	96,85	98,67	100
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	63	64,19	67,69	69,76	57,42
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	85,51	86,66	77,72	94,65	88,39
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	%	96,45	99	100	100	100
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100	100	100	100	100
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	%	100	100	100	100	100



Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
kesehatan sesuai standar (%)						
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	%	100	100	100	100	100
Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)	%	100	100	100	100	100
Nilai rata rata IKM Puskesmas	Nilai	N/A	N/A	N/A	86,37	100
Persentase puskesmas akreditasi minimal madya	%	N/A	20	53,3	93,3	93,3
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	1:426.483
Rasio tenaga dokter per100.000 penduduk	Rasio	4,48	3,67	5,62	10,78	12,42
Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk	Rasio	22,66	19,97	30,81	85,98	100,35
Jumlah Perawat	Orang	181	144	355	355	446
Jumlah Bidan	Orang	85	134	370	373	377
Jumlah Farmasi	Orang	10	10	14	48	136
Jumlah Ahli Gizi	Orang	9	11	12	20	20
Jumlah Dokter	Orang	0	0	0	0	0

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Spesialis						
Jumlah Dokter Gigi	Orang	7	7	7	9	12
Jumlah Dokter Umum	Orang	17	19	36	43	56
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	257	277	271	193	268
BBLR Dirujuk	Bayi	4	15	10	4	10
Gizi Buruk	Bayi	102,89	104,51	110,2	106,48	106,95
Ibu Hamil Kunjungan K1	%	N/A	92,08	90,19	90,51	92,82
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	N/A	92,08	90,19	90,15	92,82
Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	8,2	10,57	10	11,73	8,55
Kasus HIV	Orang	N/A	40	38	17	16
Angka kesakitan DBD	Orang	N/A	N/A	137	158	194
Angka kesakitan Diare	Orang	N/A	N/A	N/A	7873	4765
Angka kesakitan ISPA	Orang	N/A	1249	5582	293	227
Angka kesakitan Tuberculosis	Orang	N/A	N/A	389	357	387
Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	13,3	40	73,3	100	100
Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	13,3	40	73,3	100	100

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB). Di Kabupaten Pangandaran, angka kematian bayi setiap tahunnya cenderung menurun. Dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 angka kematian bayi menurun menjadi 8,24 dan pada tahun 2020 menjadi 5,43. Selain itu, Rasio Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran pada Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 yaitu 148,91. Setiap tahunnya menurun hingga tahun 2020 menjadi 49,39.

Angka kematian ibu juga mengalami penurunan dari 9 jiwa pada tahun 2016 menjadi 5 jiwa pada tahun 2020. Selain itu angka harapan hidup di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan dari 70,4 tahun di tahun 2016 menjadi 71,4 di tahun 2020. Peningkatan ini menjadi tanda bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran semakin membaik dan meningkatkan angka harapan hidup.



Kesehatan menjadi salah satu aspek penting dan menjadi komponen penyusunan indeks pembangunan manusia. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Pangandaran akan menjadi *multiplier effect* kepada aspek kehidupan masyarakat yang lain.

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya jalan, drainase, saluran irigasi, jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Berikut adalah capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.30 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	97.83	181	269.75	401.2	429,129
Panjang Jalan Seluruhnya	Km	500.24	504.31	504.31	504.31	504,31
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten (Km)	Km	500.24	504.31	504.31	504.31	504,31
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	%	52.86	52.86	63.58	63.58	67,57
Luas Areal Irigasi	ha	10.341,91	10.341,91	10.341,91	16.785,38	16.785,38
Persentase penduduk berakses air minum (%)	%	N/A	65	53	65	66
Panjang jalan yang terbangun	Km	0	0,98	0,98	0,98	5,94
Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	1	3	4	4	6
Persentase Jalan dalam kondisi mantap	%	31,98	47,72	60,09	83	85,09

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dilihat dari indikator panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 realisasi mencapai 401,20 km dan meningkat menjadi 429,12 km pada tahun 2020. Peningkatan ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat menuju dan di area kawasan Kabupaten Pangandaran.

Luas saluran irigasi juga meningkat dari 9.185 ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 16.785 ha pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pangandaran cukup masif dan mengakomodir kebutuhan air di kawasan Kabupaten Pangandaran. Semakin luas saluran irigasinya maka meningkatkan produktifitas pertanian dan mencukupi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selain itu jumlah jembatan yang terbangun juga meningkat dari 1 unit pada tahun 2016 menjadi 6 unit pada tahun 2020. Jembatan merupakan salah satu infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas Kabupaten Pangandaran dengan daerah lain. Diharapkan dengan dibangunnya infrastruktur pendukung ini dapat mempermudah akses dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berikut adalah

capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.31 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	%	N/A	N/A	35	27	35
Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	%	5,71	5,71	5,717	5,7	11,43
Persentase Rumah tangga bersanitasi	Rasio	N/A	54,62	N/A	N/A	N/A
Indeks risiko sanitasi	Nilai	N/A	N/A	41,31	38	32,39

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 realisasi pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan mencapai 11,43 persen. Di mana pada tahun sebelumnya hanya terealisasi 5,7 persen. Selain itu pada indikator Ketaatan terhadap RTRW juga terjadi peningkatan yang signifikan. Di mana, pada tahun 2020 realisasi mencapai 35 persen. Sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 27 persen. Sedangkan pada indikator Indeks Risiko Sanitasi, pada tahun 2020 tercatat sebesar 32,39.

Dengan demikian, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dioptimalkan kembali kinerjanya. Hal ini dikarenakan agar kawasan tata ruang permukiman dan perumahan rakyat di Kabupaten Pangandaran dapat lebih baik. Utamanya dalam hal ini adalah meningkatkan rumah tangga bersanitasi, sarana prasarana pemerintahan yang baik dan lain sebagainya.

### **2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan

ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum.

Salah satu indikator pada sektor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari pelanggaran K3 yang terselesaikan, kemudian dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. Indikator lainnya yaitu Kejadian kebakaran, yang diketahui dari berapa banyak jumlah kebakaran pada tahun tertentu di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan ketentraman dan ketentraman umum Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	Kasus	N/A	11	31	53	79
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Kasus	N/A	14	24	10	37
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Kasus	N/A	14	22	10	10
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	%	N/A	100	91.67	100	100
Petugas Linmas di Kabupaten/Kota	Orang	1856	1886	1908	1908	1913

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari hasil perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Pangandaran, selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka diatas 90% ke atas. Pada tahun 2017 terdapat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100%. Kemudian tahun berikutnya 91,67% dan di tahun 2019 dan 2020 sebesar 100%. Dari data ini dapat dilihat bahwa permasalahan K3 dapat diselesaikan dengan baik oleh Satpol PP.

Pada tahun 2017 terdapat 11 kejadian kebakaran, kemudian naik kembali di tahun 2018 menjadi 31 sampai pada tahun 2020 menjadi 79 kejadian kebakaran namun semuanya dapat dipadamkan dengan cepat.

Sehingga kinerja Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pangandaran sudah berkinerja dengan baik.

Selain itu terdapat kenaikan petugas Linmas dari 1.856 orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.913 orang pada tahun 2020. Penambahan Linmas ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat Kabupaten Pangandaran.

### 2.3.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan

lansia rawan sosial.

Dalam mengurangi angka penyandang disabilitas, diperlukan kerjasama dari semua pihak khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020, tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.33 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	N/A	52.634	48.272	45.944	116.458
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	N/A	53.121	57.096	50.817	116.458
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	Jiwa	N/A	52.634	48.272	45.944	116.458

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada	Jiwa	N/A	53.121	57.096	50.817	116.458
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberikan bantuan	Jiwa	N/A	52.634	48.272	45.944	116.458
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	N/A	53.121	57.096	50.817	116.458
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	N/A	99,01	84,54	90,41	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	N/A	3,78	6,08	5,81	6,71
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	N/A	N/A	N/A	N/A	1.427
Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	N/A	100	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	N/A	N/A	1,2	6.1	21,4
Jumlah Panti Sosial	Unit	N/A	21	21	23	22
Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	N/A	52.634	48.272	45.944	117.471
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	N/A	52.634	48.272	45.944	117.471

(Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan data di atas, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 yaitu 52.634 jiwa, dan menurun pada tahun 2018 menjadi 48.272 jiwa, serta terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 116.458 jiwa. Peningkatan ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak kepada masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

Sedangkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seharusnya memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 yaitu 53.121 jiwa. Pada tahun 2018 menjadi 57.096 jiwa dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 116.458 jiwa. Selain itu, Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 yaitu 99,01%. Menurun pada tahun 2018 menjadi 84,54% dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 100%.

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak kepada beberapa indikator capaian di urusan sosial. Namun pemerintah Kabupaten Pangandaran juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberian bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

Fokus layanan urusan wajib non dasar mencakup: usaha kecil mikro dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, yang disajikan sebagai berikut :

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

**Tabel 2.34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	N/A	0,98	0,98	0,98
Rasio penduduk yang bekerja	N/A	40	14	90	80
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	61	64	67	70	72

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 adalah 40 dan terus naik hingga 90 pada tahun 2019. Namun kembali turun menjadi 80 di tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19. Peningkatan terjadi pada indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang menunjukkan 61 pada tahun 2016 menjadi 72 pada tahun 2020. Sedangkan indikator persentase pencari kerja stagnan di angka 0,98 dari tahun 2018-2020.

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran adalah terjadinya kesenjangan antara pencari kerja terhadap kesempatan untuk bekerja. Apalagi setelah Pandemi Covid-19, tahun 2020 terjadi lonjakan kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran sehingga mempengaruhi rasio penduduk yang bekerja.

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Beberapa program dan kegiatan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Kabupaten Pangandaran dan berusaha memenuhi kebutuhan anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.35 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**



Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	N/A	89,30	89,68	90,02	89,78
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	N/A	65,45	69,20	74,56	74,57
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	N/A	27,17	26,49	26,11	24,70

(Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021)

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2020 terjadi pandemi virus Corona-19 sehingga salah satu dimensi tersebut, yaitu ekonomi mengalami penurunan yang akhirnya berdampak terhadap penurunan IPG Kabupaten Pangandaran.

IPG di Kabupaten Pangandaran meningkat dari 89,30 pada tahun 2017 menjadi 90,02 pada tahun 2019, namun menurun menjadi 89,78 pada tahun 2020. Selain itu indikator IDG mengalami peningkatan yang cukup baik dari 65,45 di tahun 2017 menjadi 74,57 pada tahun 2020. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami penurunan dari 27,17% di tahun 2017 menjadi 24,70% di tahun 2020.

### 2.3.2.3 Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut hasil capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020:

**Tabel 2.36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka kecukupan Protein perkapita	Gram/Kap /Hari	65,7	63,7	68,8	70,5	70,6
Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	13	11	10	9	8

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Total desa pangan lestari	Desa	N/A	N/A	18	3	3
Ketersediaan pangan utama (food availability)	Ton/Tahun	21887,73	32433,85	32576,42	61823,74	38727,46
Skor PPH Konsumsi	Skor	87,1	82	89,5	93,2	94,5
Angka ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2622,1	2896,2	3602	6460	5525,18
Angka Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	63,9	79,2	275,62	180,89	350,72
Skor PPH Ketersediaan	Skor	N/A	82	89,5	93,2	94.50
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	N/A	N/A	77,18	82,56	81,99

(Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari indikator skor PPH ketersediaan pada tahun 2017 mencapai 82 yang selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 93,2, dan terus naik pada tahun 2020 mencapai 94,5.

Selain itu juga terlihat dinamika penurunan dari capaian pada indikator total desa pangan lestari dari 18 desa pada tahun 2018 dan selanjutnya turun menjadi 3 desa tahun 2020. Naik turunnya indikator pada urusan pangan dipengaruhi oleh banyak hal seperti musim panen yang terpengaruh cuaca dan lain sebagainya.

#### 2.3.2.4 Pertanahan

Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan penambahan jumlah penduduk. Lemahnya administrasi pertanahan dan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat maupun aparat pemerintah juga mampu memicu konflik-konflik pertanahan di internal Kabupaten Pangandaran. Konflik tersebut dapat berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders* lain, seperti kalangan pengusaha pertambangan dan perkebunan. Berikut adalah capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.37 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	100	100

(Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan pertanahan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat stagnan. Di mana pada tahun 2019-2020 indikator persentase jumlah kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan telah terealisasi 100 persen.

### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> )	N/A	N/A	30.224 m <sup>3</sup>	52.954 m <sup>3</sup>	30.848 m <sup>3</sup>
Volume produksi sampah	N/A	N/A	167.025,2 m <sup>3</sup>	181.475,86 m <sup>3</sup>	183.136,82 m <sup>3</sup>
Persentase Penanganan sampah	N/A	N/A	18,10%	29,18%	16,84%
Indeks Kualitas Air	N/A	50	47.78	50	51.67
Indeks Kualitas Udara	N/A	85.76	84.30	85,68	77.79
Indeks Kualitas Vegetasi/ IKTL	N/A	52.28	52.28	52.28	65.25
Jumlah daya tampung TPS (m <sup>3</sup> )	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	210 m <sup>3</sup>
Jumlah ketaatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	N/A	N/A	N/A	8	6
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	8	16
Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	1	1	N/A	1	N/A
Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani	5	4	6	5	4
Total pengaduan masyarakat yang terregister	5	4	6	5	4
Total Timbunan Sampah	59.230	59.716	61.395	62.019	62.266,52
Jumlah Sampah 3R	-	-	-	2.211,90	2.573,25
Total Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten (Ton)	57,327.78	58,522.06	59,716.34	60,910.66	62,128.88
Luas area Kabupaten	10,296	13,392	14,922	12.680,10	14.497,80
	61.245.718	61.733.336	63.412.752	62.019	62.266,52

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan bidang lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 volume sampah yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran sebanyak 247,16 ton. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 150,13 ton.

Selain itu persentase penanganan sampah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase penanganan sampah hanya 29,18%. Sedangkan tahun 2020 persentase penanganan sampah sebesar 16,84%. Selain itu jumlah sampah 3R juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 hanya sebesar

2.211,90 ton. Sedangkan tahun 2020 jumlah sampah 3R sebanyak 2.573,25 ton.

Peningkatan kinerja urusan lingkungan hidup akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Timbunan sampah yang menumpuk dan tidak tertangani berdampak pada munculnya penyakit dan kuman yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas masyarakat, diantaranya adalah saat pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah. Berikut adalah capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.39 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	23,23	32,64	78,03	91,96	96,95
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	57,05	44,06	29,02	17,03	26,78
Cakupan Perekaman maturitas Elektronik	7,28	4,31	4,9	2,75	3,29
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	N/A	N/A	3,12	26,51	14,66
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	22,91	25,84	33,1	74,2	74,61
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	46,57	50,55	53,32	57,94	59,54
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	35,82	38,2	52,42	61,05	67,25
Persentase validasi database kependudukan	N/A	N/A	8,7	30,43	39,13

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 meningkat. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sebanyak 96,95 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 91,96 persen.

Selain itu persentase validasi database kependudukan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase validasi database kependudukan hanya 30,43 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 39,13 persen. Cakupan penerbitan kartu identitas anak juga mengalami peningkatan dari 3,12 % pada tahun 2018 meningkat menjadi 74,61% pada tahun 2020.

Semakin tingginya dan baiknya administrasi kependudukan bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar kebutuhan ini bisa didapat dari pencatatan administrasi penduduk yang sudah dilakukan dengan baik.

### **2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Berikut adalah capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa Kategori Swasembada	N/A	N/A	N/A	4,30%	8,60%
Jumlah desa kategori swasembada	N/A	N/A	N/A	4	8
Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif	N/A	56	73	83	87
Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik	6,45	13,98	26,88	44,09	59,14
Jumlah PKK aktif	104	104	104	104	104
Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 terlihat mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 2019-2020 indikator persentase desa kategori swasembada meningkat. Yang mulanya pada tahun 2019 hanya 4,30 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,60 persen.

Selain itu indikator jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 mencapai 56 lembaga menjadi 87 lembaga pada tahun 2020. Peningkatan beberapa capaian di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bisa menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa.

#### **2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

Berikut adalah capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
TFR	2,22	2,41	2,42	2,32	2,29
CPR	75,37	74,94	75,15	76,41	60,25
Unmet Need	17,55	17,49	17,23	14,88	24,84
LPP	0,6	0,58	0,53	0,53	0,55
Ratio Akseptor KB	75,39	74,99	75,16	76,43	60,25
ASFR	23,89	22,6	13,45	17,61	18,01

(Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk di Pangandaran mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2019. Data dari tabel diatas menunjukkan TFR dari tahun 2017 dari 2,41 menjadi 2,29 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan program keluarga berencana yang digalakkan perangkat daerah terkait sudah berjalan dengan baik.

Penurunan ini juga diikuti dengan melambatnya laju ASFR dan tingkat fertilitas wanita usia subur (TFR) yang relatif stabil pada periode yang sama. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk di Pangandaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan mengalami perlambatan.

### 2.3.2.9 Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama empat tahun mengalami penurunan sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat. Berikut adalah capaian urusan perhubungan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.



**Tabel 2.42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	73,2	77,5	70	76,3	76,9
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	N/A	N/A	0,005	0,003	0,002
Jumlah penumpang angkutan darat	N/A	537.805	358.988	631.396	474.383
Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	30	40	50	50	60

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan perhubungan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, yang mana pada tahun 2019 angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 0,003 persen. Sedangkan pada tahun 2020 angka kecelakaan turun di presentase 0,002 persen.

Selain itu indikator rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik sepanjang 2018-2019 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Namun pada indikator jumlah penumpang mengalami penurunan menjadi 474,383 pada tahun 2020 yang sebelumnya 631,396 pada tahun 2019. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan pengaturan kapasitas penumpang angkutan umum pada masa Covid-19.

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi menjadi suatu hal yang begitu penting di era yang modern ini. Komunikasi dan informasi dibutuhkan oleh setiap daerah guna mengetahui perkembangan situasi, dan kondisi terkini yang sedang terjadi. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran.

Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta sub urusan Aplikasi Informatika. Rincian

kewenangan untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase aplikasi e-Government yang terintegrasi	N/A	N/A	20	30	40
Indeks SPBE	N/A	N/A	1.50	2.32	3.02
Jumlah IKM	1	1	1	1	1
Jumlah KIM	100	100	100	100	100

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian, Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase aplikasi e-Government yang terintegrasi di mana pada tahun 2019 hanya 30 persen, sedangkan di tahun 2020 sebesar 40 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Pangandaran sudah menerapkan aplikasi teritegrasi untuk mempermudah administrasinya.

Selain itu indeks SPBE pun meningkat dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 sebesar 2.32 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3.02 persen. Sedangkan IKM dan jumlah KIM berada di posisi stagnan.

#### **2.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam rangka menguatkan perekonomian daerah, Pangandaran terus mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dalam berbagai bidang. Potensi sumber daya alam yang ada di Pangandaran menjadi peluang untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat yang memiliki kreativitas untuk berwirausaha. Penguatan UMKM merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi

daerah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, Kabupaten Pangandaran perlu meningkatkan program yang memiliki dampak secara berkelanjutan kepada setiap anggota koperasi maupun UMKM. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif	26,63	30,54	32,69	33,96	89,02
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	0	0	100	100	100
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0	0	100	100	100
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	4,55	20,00	20,83	13,04	14,29
Jumlah usaha mikro dan kecil	0	2417	10882	11360	11360

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2021)

Mengacu pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif di Pangandaran memiliki capaian kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebesar 26,63 persen dan meningkat hingga menjadi 89,02 persen di tahun 2020.

Selain itu, terdapat peningkatan persentase KSP/ USP yang naik dari 4,55 persen di tahun 2016 menjadi 14,29 persen di tahun 2020. Namun, dalam pencapaiannya, terdapat permasalahan lain yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya data terkait jumlah anggota koperasi yang sejahtera dan perkembangan usaha UMKM.

### 2.3.2.12 Penanaman Modal

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat sehingga setiap daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya dengan menarik investor agar masuk ke daerah masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai upaya dilakukan seperti memanfaatkan kekayaan alam,

menaikkan retribusi daerah dan ada juga yang memudahkan perizinan bagi investor yang mau menanamkan modal di daerah tersebut. Berikut adalah capaian urusan penanaman modal Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor PMDN	Jumlah	523	789	429	131	2124
Jumlah Investor PMA	Jumlah	N/A	N/A	1	N/A	N/A
PMA	Rp	0	3,376,000,00	17,750,000,00	0	0
PMDN	Rp	269.331.393.391,00	539.813.364.250,00	187.541.216.995,00	475.010.357.987,00	349.898.121.679,00
Jumlah investasi (PMA/PMDN)	Rp	N/A	N/A	N/A	N/A	349.899 M

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, 2021)

Terdapat kenaikan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2016 yaitu dari 523 dengan nilai sebesar Rp. 269.331.393.391,00 menjadi 789 investor dengan nilai sebesar Rp. 539.813.364.250,00 pada tahun 2017 lalu mengalami penurunan menjadi sebanyak 429 investor dengan nilai Rp. 187.541.216.995,00 pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 yang hanya memperoleh 131 investor namun dengan total nilai yang meningkat yaitu sebesar Rp. 475.010.357.987.00 lalu mengalami kenaikan cukup tajam pada 2020 dengan memperoleh 2.124 investor dengan nilai sebesar Rp. 349.898.121.679,00 Adapun jumlah investor asing (PMA) tercatat hanya terdapat 1 investor pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp. 17.750.000,00 yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang memperoleh nilai sebesar Rp. 3.376.000,00.

### 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pengoptimalan peran pemuda di Pangandaran memiliki peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan pemuda

dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun *Non-Government Organization* (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Pangandaran.

**Tabel 2.46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	127	127	127	127	146
Jumlah Gedung Olahraga	42	42	42	117	117

(Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021)

Capaian Kabupaten Pangandaran dalam aspek urusan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 146 klub pada tahun 2020. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah gedung olahraga yang berjumlah 117 pada tahun 2020.

#### 2.3.2.14 Statistik

Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Statistik digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Adapun indikator capaian statistik Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.

**Tabel 2.47 Jumlah Publikasi Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Publikasi	N/A	N/A	0	3	1

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah publikasi statistik di Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 publikasi pada tahun 2019 dan 1 publikasi pada tahun 2020. Jumlah ini belum optimal karena masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan para *stakeholders* terkait.

### 2.3.2.15 Persandian

Semakin berkembangnya *E-Government* memunculkan banyak inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Kendati demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan lain yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Disini peran persandian dan keamanan informasi berada yaitu sebagai entitas pengaman data dan informasi. Berikut adalah capaian urusan persandian Kabupaten Pangandaran.

**Tabel 2.48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi	N/A	N/A	10	16	20

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sistem informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi meningkat dari 10 sistem pada tahun 2018 menjadi 20 sistem pada tahun 2020. Capaian bidang persandian Kabupaten Pangandaran karena merupakan bidang baru dalam pemerintahan di kabupaten Pangandaran, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang persandian dalam pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### 2.3.2.16 Kebudayaan

Pangandaran sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat selain terkenal dengan wisata alamnya, daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata budaya dan wisata buatan yang menyajikan keunikan yang beragam. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Pangandaran yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Kaerakter Bangsa”. Pemerintah Kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada.

Secara kultur, Pangandaran terlahir sebagai daerah yang memiliki percampuran dua budaya yaitu budaya jawa dan budaya sunda. Wilayah Pangandaran bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dimana kedua daerah ini memiliki kultur Sunda sedangkan wilayah Kabupaten Pangandaran bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki kultur Jawa.

Adapun contoh situs kesenian yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu Saung Angklung Mang Koko dimana sanggar ini merupakan sarana untuk mengenal lebih dalam mengenai alat musik tradisional Angklung Sunda dan kesenian tradisional lainnya seperti Kesenian Benjang Batok yang sering dipentaskan pada acara penyambutan para tamu dalam upacara adat atau acara-acara tertentu, seni kecapi suling, Kesenian Ronggeng Gunung, Celempungan, hingga Prosesi Karasemen Adat.

Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut tabel capaian urusan kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka melestarikan kebudayaan yang ada di Pangandaran pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	15	18	12 (Kegiatan Bidang)	8

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	6 (Kegiatan Diluar Bidang)	-
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	0	0	2	2	-
Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu	0	0	30	30	30
Persentase kelompok budaya aktif	0	0	0	0	100

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya secara drastis dari tahun 2018 yaitu sebanyak 18 menjadi hanya 8 penyelenggaraan pada tahun 2020. Di era pandemi pada tahun 2020 pelestarian budaya juga belum berkembang dikarenakan pelaku kesenian yang enggan beradaptasi dengan situasi terkini.

Hal ini menghambat upaya pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Beberapa indikator lain seperti jumlah cagar budaya yang dikelola juga cenderung stagnan. Selain itu kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berdampak pada kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilarang untuk mencengah kerumunan.

### 2.3.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Peraturan Perpustakaan nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam upaya membangun kualitas manusia, budaya literasi perlu dijadikan menjadi pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia salah satunya bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat, tergambar dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).



Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan masyarakat, pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan.

Perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar, membaca buku, dan mencari informasi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Pangandaran, dikembangkan perpustakaan untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai tonggak pencerdasan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	N/A	925	1.169	12.567	3.931
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	N/A	2.077	3.490	3.709	4.010
Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	N/A	3.756	9.519	10.083	10.761
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	N/A	N/A	N/A	1	1
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	N/A	925	1.169	12.567	3.931
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	N/A	18,625	31,195	31,426	42,958
Jumlah Perpustakaan	N/A	277	295	325	325
Jumlah rata-rata pengunjung pertahun	N/A	925	1.169	12.567	9.151
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	N/A	18.625	31.195	31.426	42.958

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan data dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang

signifikan dari tahun 2017 sebesar 925 menjadi sebesar 1.169 pada tahun 2018 dan melonjak tajam pada tahun 2019 yaitu sebesar 12.567 kunjungan lalu mengalami penurunan pada 2020 sebesar 3.931 kunjungan. Begitu pula dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia yaitu terus bertambah dari 2.077 koleksi pada tahun 2017 menjadi 4.010 koleksi judul buku pada tahun 2020.

Pada tahun 2019 dan 2020, dapat diketahui bahwa jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Pangandaran hanya 1 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat untuk mengoptimalkan peran perpustakaan di Pangandaran. Selain itu, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada pengunjung perpustakaan daerah pada tahun 2017-2020 sebanyak 3,931 dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 42,958 pada tahun 2020.

### **2.3.2.18 Kearsipan**

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan lembaga Kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut adalah capaian urusan kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.51 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	N/A	18	18	18
Persentase arsip yang terjamin keamanannya	N/A	N/A	N/A	48,03	48,03
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	N/A	18	18	0
Pengelolaan kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM	N/A	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Pangandaran pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami kenaikan yaitu stagnan di angka 18% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya OPD yang menyelenggarakan arsip secara baku. Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan pengarsipan secara baku diseluruh kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Disisi lain sesuai dengan tingkat perkembangan zaman diperlukan penyelenggaraan penatakelolaan Kearsipan Berbasis Digital. Selain kebutuhan tenaga profesional, dibutuhkan pula kelengkapan dan daya dukung sarana dan prasarana.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dapat dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yang meliputi bidang urusan perikanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi. Berikut disajikan tabel capaian dari indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah, sebagai berikut

### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal tergali dan dimanfaatkan. Besarnya jumlah tangkapan ikan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki potensi perikanan yang besar. Sedangkan kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten pangandaran didominasi oleh kelompok usaha nelayan. Berikut adalah capaian urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Ikan	Ton	N/A	3.063,63	2.517,61	2.757,86	1.522,53
Target Daerah	Ton	N/A	2.925	2.931	2.941	2.947
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	N/A	17,3	20,5	22,5	23,1
Target Daerah	Kg/Kapita /Tahun	N/A	18,88	20,1	22,04	22,9
Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	189	189	194	195	241
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	N/A	2.830,53	2.344,76	2.498,91	1.282,54
Produksi benih ikan	Ekor/tahun	N/A	8.538.451	6.825.978	8.617.470	11.728.291

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi ikan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah produksi ikan sebanyak 2757,86 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya 1522,53 ton. Hal ini dapat dipengaruhi oleh indikator kontribusi hasil kelompok nelayan yang juga mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2020 kontribusi hasil kelompok nelayan hanya mencapai 1282,54 ton dibandingkan dengan 2019 yang mencapai 2498,91 ton.

Sedangkan untuk perikanan air tawar meningkat untuk produksi benih dari 8 jutaan benih pada tahun 2016 meningkat menjadi hampir 12 juta benih pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena potensi perikanan air tawar cukup menjanjikan dalam jangka panjang.

### 2.3.3.2 Pariwisata

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Terletak di tenggara provinsi Jawa barat, Kabupaten Pangandaran secara mandiri berdiri sebagai daerah otonom baru yang harus secara optimal memanfaatkan potensi daerah. Tren kunjungan Wisata selalu naik pada setiap tahunnya, begitupun kunjungan wisata yang direncanakan. Berikut adalah capaian urusan pariwisata Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	1.994.044	2.954.559	4.045.704	3.775.273	2.842.022
		152.108	147.637	132.978	117.767	88.484
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rupiah	5.732.038.150	14.598.742.005	19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250
Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata	Rupiah	5.732.038.150	14.598.742.005	19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Juta	732.514	823.303	932.137	1.060.116	1.091.410,69
Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	192	192	192	203	203
Jumlah Hotel	Unit	311	311	311	378	383

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, kunjungan wisata mencapai 2.842.022 domestik dan 88.484 mancanegara. Namun data pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data tahun 2019. Hal ini disebabkan Pandemi Covid-19 sehingga adanya kebijakan pembatasan sosial berdampak pada jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pangandaran.

Pariwisata juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, nilainya pada tahun 2019 mencapai 18.472.858.000 dan menurun menjadi Rp. 13.786.568.250 pada tahun 2020. Nilai tersebut mengalami penurunan di tahun sebelumnya dikarenakan Pandemi Covid 19. Jumlah hotel mengalami kenaikan menjadi 383 hotel pada 2020.

### 2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian, dan pisang.

Sektor pertanian sampai saat ini masih memiliki andil yang besar dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, salah satunya berperan langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan. Berikut adalah capaian urusan pertanian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas Padi	Ton/Ha	N/A	6,01	6,2	6,21	6,3
Luas Lahan Sawah	Ha	N/A	16.564	16.564	16.564	16.564
Produktivitas Jagung	Ton/Ha	N/A	6,59	6,26	5,97	6,01
Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya	Ton	N/A	202.099,56	209.879,34	205.003,38	205.981,12
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar	Ton	N/A	5,93	5,83	6,17	6,3
Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp	1.673.506,65	1.708.073,40	1.749.637,05	1.805.524,22	1.855.813,33
Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp	2.445.301.60	2.564.116.10	2.836.506.50	3.065.084.70	3.143.789,55
Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	N/A	1.087	1.181	1.202	1.348

(Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat peningkatan capaian urusan pertanian. Produktivitas padi meningkat dari 5,93 ton pada tahun 2016 menjadi 6,3 ton di tahun 2020. Hal ini menunjukkan produktivitas padi di Kabupaten Pangandaran semakin baik karena luas lahan sawah yang ada selama 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan.

Begitupun juga dengan cakupan bina kelompok tani dari 1.087 pada tahun 2016 menjadi 1.348 pada tahun 2020. Sehingga dapat dilihat bahwa semakin banyak kelompok tani yang terbina dan dapat tercatat untuk memudahkan pemberian bantuan hingga menghitung potensi pertanian di Kabupaten Pangandaran.

#### 2.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu unsur dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perdagangan akan selalu menghadapi tantangan dalam mendongkrak peningkatan ekonomi dengan melihat potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Pelayanan urusan perdagangan merupakan urusan pilihan. Capaian kinerja urusan perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai ekspor daerah	Rp	N/A	N/A	91.005.691.618	59.833.038.627,00	108.822.663.607,83
Persentase Pertumbuhan ekspor	%	N/A	N/A	N/A	-34,25	81,88
Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	N/A	N/A	N/A	-34,25	81,88
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,84	22,80	22,71	22,75	21,95
Nilai PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar Rp	1508,27	1582,03	1659,82	1761,76	1698,73

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas persentase pertumbuhan ekspor di Kabupaten Pangandaran meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan ekspor -34,25 persen, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekspor Kabupaten Pangandaran sebesar 81,88 persen. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai ekspor daerah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 108.822.663.607,83.

Penurunan capaian pada tahun 2020 pada seluruh indikator kecuali pada pertumbuhan ekspor menunjukkan dampak pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap perdagangan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Lesunya perekonomian dan adanya pembatasan sosial menyebabkan perdagangan di Kabupaten pangandaran menjadi menurun signifikan pada tahun 2020.

### 2.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Bidang perindustrian akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian termasuk dalam pelayanan urusan pilihan. Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah industri baru	industri	N/A	N/A	N/A	19	13
Persentase Pertumbuhan Industri	%	N/A	N/A	N/A	0,005	0,004
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	N/A	N/A	N/A	0,45	0,52
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4,90	4,85	4,85	4,79	4,78
Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	425.185.310.000	455.736.160.000	501.953.750.000	542.222.960.000	549.570.910.000

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas persentase pertumbuhan industri Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan secara signifikan dari 0,005 persen pada tahun 2019 menjadi 0,004 persen pada tahun 2020.



Hal ini diikuti dengan jumlah industri baru yang menurun dari 19 industri pada tahun 2019 menjadi 13 industri pada tahun 2020.

Namun pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran telah membina 0,45 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2020. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berada di angka yang cukup stagnan dari 2016-2020 yaitu berada di kisaran 4,80an persen.

### 2.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya Kerjasama antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

**Tabel 2.57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Transmigran Swakarsa	KK	14	5	0	0	0

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 data belum tersedia. Jika dilihat dari tahun 2017 Persentase Transmigran Swakarsa mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dari 14% pada tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2017.

### 2.3.4 Fokus Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan

Urusan penunjang urusan pemerintah pemerintah pada sub bab ini akan membahas mengenai keuangan daerah Kabupaten Pangandaran, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran, hingga SilPa Perhitungan anggaran.

### 2.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan aspek yang utama dalam menyusun dan membangun suatu daerah. Perencanaan yang baik maka akan berdampak pula kepada pembangunan yang baik pula. Hal ini juga yang menjadi realisasi SAKIP Bappeda bisa mendapatkan nilai A. Berikut capaian urusan perencanaan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	%	N/A	N/A	22,22	22,09	22,24
Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	%	N/A	N/A	94,26	98,17	97,75
Nilai SAKIP Bappeda	%	N/A	N/A	A (89,71)	A (89,86)	A (89,88)

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada peningkatan terkait capaian Nilai SAKIP unsur perencanaan dari 22,22 pada tahun 2018 menjadi 22,24 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan perencanaan di Kabupaten Pangandaran semakin baik. Selain itu indikator persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan juga mengalami kenaikan dari 94,26 pada tahun 2018 menjadi 97,75 pada tahun 2020. Demikian pula Nilai SAKIP Bappeda naik menjadi 89,88 pada tahun 2020 yang sebelumnya hanya 89,86 pada tahun 2019.

### 2.3.4.1 Keuangan

Perencanaan suatu daerah tidak hanya berfokus kepada program dan kegiatan, namun juga harus fokus kepada perencanaan keuangannya. Perencanaan keuangan yang bagus dan diikuti dengan perencanaan pembangunan yang bagus maka akan berdampak pada peningkatan kinerja daerah. Capaian Badan keuangan pada Nilai SAKIP tahun 2020 adalah A. Hal ini menunjukkan badan keuangan sudah bekerja dengan baik.

**Tabel 2.59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	Nilai	N/A	B	A	A	A
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	%	2,92	31,22	30,75	0,8	-27,79

(Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 adalah WTP. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan keuangan daerah Kabupaten Pangandaran sudah memenuhi unsur kewajaran serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain itu nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keunagan Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki nilai A 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2020. Namun terjadi penurunan peningkatan pengelolaan PAD yang hanya mencapai -27,79% di tahun 2020 yang sebelumnya bisa 0,8% pada tahun 2019.

#### 2.3.4.2 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan

Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas dari ASN. Semakin meningkat kualitasnya maka output yang dihasilkan juga semakin bagus yang berdampak kepada peningkatan pelayanan.

**Tabel 2.60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	%	N/A	0,03%	2,80%	1,40%	10,25%
Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	%	4,80%	1,74%	14,50%	11,80%	14%

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang Tidak terdapat Hukuman Disiplin	%	N/A	51,52%	94,12%	80%	80%
Persentase ASN dengan Data Kepegawaian Akurat	%	N/A	58%	63%	72%	80%
Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	skor	N/A	N/A	57,85	58,65	38,92

(Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan capaian urusan kepegawaian di Kabupaten Pangandaran meskipun terhadap beberapa indikator yang mengalami penurunan. Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis meningkat dari 0,03% dari tahun 2017 meningkat menjadi 10,25% pada tahun 2020. Indeks profesionalitas ASN menurun dari capaian 57,85 pada tahun 2018 turun menjadi 38,92 pada tahun 2020.

#### 2.3.4.3 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah salah satu pioner daerah untuk terus maju dan mampu untuk menciptakan inovasi pemerintahan. Dengan banyaknya inovasi yang ada maka tujuan perwujudan *good governance* akan segera tercapai. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Persen	N/A	N/A	N/A	0,09	0,06
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Persen	N/A	N/A	N/A	0,07	0,04

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan baru tersedia data nya di tahun 2019 dan 2020 hal ini disebabkan oleh kelembagaan sub bidang Penelitian dan

Pengembangan baru terpisah pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dan pada data tabel diatas belum menggambarkan pemanfaatan dari hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan pengambilan kebijakan

#### 2.3.4.4 Pengawasan

Aspek pengawasan menjadi hal yang cukup krusial dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang bertugas untuk mengawasi yaitu Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Salah satu capaian yang didapat dari aspek pengawasan adalah persentase unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas mencapai 25%.

**Tabel 2.62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kapabilitas Apip (1 s/d 5)	Skor	N/A	N/A	2	2	2
Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	N/A	N/A	3	3	3
Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	%	N/A	N/A	0	7,4	7,4

(Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian seluruh indikator urusan pengawasan stagnan dari tahun 2018-2020. Hal ini terlihat bahwa tingkat kapabilitas SAKIP berada di skor 66,67. Selanjutnya tingkat kematangan implementasi SPIP berada di skor 100. Dan yang terakhir adalah persentase unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas daerah adalah 25%.

### 2.3.4.5 Pemerintahan Umum

Wilayah administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau biasa disebut dengan Bakesbangpol. Bakesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Berikut hasil capaian kinerja urusan pemerintahan umum Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020:

**Tabel 2.63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejadian Konflik	Konflik	N/A	N/A	1	1	0
Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	Orang	440	300	150	0	280
Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Orang	225	238	75	238	190
Angka Partisipasi masyarakat	Persen	N/A	N/A	79,04	82,1	83,88
Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	Persen	N/A	N/A	79,04	82,1	83,88

(Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah kejadian konflik mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 1 (satu) konflik. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada konflik yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik dilakukan dengan baik dengan cara mitigasi konflik agar tidak muncul potensi konflik di masyarakat.

Selain itu pada tahun 2020 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Pangandaran meningkat mencapai 83,88 pada tahun 2020.

Hal ini dapat diakibatkan juga dengan meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Pangandaran di tahun 2020.

#### 2.3.4.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berikut adalah capaian urusan sekretariat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2020.

**Tabel 2.64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	N/A	N/A	N/A	CC (51,60)	CC (52,06)
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	90	88	98	166,67	166,67
Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan Juknisnya	%	90	93	95	97	95
IKM Setda	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	Sedang (28,26)
Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	A (80)
Indeks Nilai (N-1) LPPD	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	Tinggi
Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	N/A	N/A	N/A	N/A	80 (Baik)

(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah A menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Sekretariat Daerah sudah bagus. Selain itu berdasarkan survei kepuasan masyarakat nilai layanan sekretariat daerah mencapai angka 80 pada tahun 2020. Capaian lain adalah indeks nilai LPPD Sekretariat Daerah menunjukkan predikat tinggi sedangkan untuk IKM menunjukkan predikat sedang dengan nilai 28,26.

Namun kekurangannya adalah ada di Indeks Reformasi Birokrasi yang masih mencapai predikat CC atau 52,06 dalam nilainya. Hal ini bisa dijadikan semangat untuk perangkat daerahnya agar bisa menjadi lebih baik pada perioder RPJMD berikutnya.

#### 2.3.4.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan merupakan Lembaga yang bertugas untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan dan operasional dari para anggota dewan yang ada di daerah. Indikator dari sekretariat dewan adalah penerbitan rencana kerja tahunan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana tahunan tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran**

Indikator	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Pangandaran	188.4/K pts.01 /DPRD/ 2016	188.4/K pts.01 /DPRD/ 2017	188.4/Kpts.01.a /DPRD/2018	188.4/K pts.01 /DPRD/ 2019	188.4/K pts.01 /DPRD/ 2020
Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	N/A	N/A	67,40%	81,38%	83,54%

(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel diatas terlihat persentase kenaikan tingkat kepuasan pelayanan sekretariat DPRD menjadi 83,54% pada tahun 2020 yang sebelumnya hanya mencapai 67,40%.

#### 2.3.4.1 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib menjadi aspek yang wajib untuk di utamakan dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang rawan akan bencana. Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang cukup sering



terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Nilai SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah A dan menunjukkan bahwa Lembaga tersebut memiliki kinerja yang baik.

**Tabel 2.66 Hasil Kinerja Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	69,3	71,2	69	68,8	68,8
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	17	20	24	27	29
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	0,78	5,19	0,09	0,09	2,4
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	100	100	100	100	0
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang ter rehabilitasi	%	100	100	100	100	0
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	0	0	BB (80)	A (85,65)	A (86,01)
Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0	0	55	0,67	0,67
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kali	6	8	40	67	12
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	kali	11	12	62	89	30

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai capaian indikator penanggulangan bencana banyak yang cenderung naik seperti persentase desa tangguh bencana dari 17 desa di tahun 2016 naik menjadi 29 desa di tahun 2020. Selain itu ada juga mengenai persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan dari 0,09 pada tahun 2018 menjadi 2,4 pada tahun 2020.

Namun penurunan juga terjadi terkait kebakaran di WMK yang tertangani maksimal 15 menit dari 67 di tahun 2019 turun menjadi 12 di tahun 2020. Selanjutnya adalah mengenai jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK yang mengalami penurunan dari 89 kali menjadi 30 kali.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah dibawah ini akan menjabarkan fokus Kabupaten Pangandaran pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia dan daya saing pariwisata.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Menurut BPS, Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Sehingga komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia.

**Tabel 2.67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kemampuan Ekonomi Daerah**

Indikator	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi per Kapita	N/A	N/A	N/A	590.032.00	635.968.00
Persentase Konsumsi	N/A	N/A	N/A	1.067.368.00	1.131.678.00
Pengeluaran Non-Makanan per Kapita	N/A	N/A	N/A	1.067.368.00	1.131.678.00
APBD	1.204.775.293.776	1.369.352.917.674	1.206.029.842.733	1.616.168.604.724	1.616.170.000.012
Silpa	72.021.207.850	28.598.897.718	3.811.288.680	16.043.940.289	16.043.940.289

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah mengalami kenaikan di setiap indikatornya. Pada indikator pengeluaran konsumsi per kapita tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 635.968.00. Selain itu pada indikator Pengeluaran Non-Makanan per Kapita tahun 2020 juga mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 1.131.678.00.

APBD dari Kabupaten Pangandaran akan memperlihatkan keuangan dari daerah tersebut. Semakin tinggi APBDnya maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerahnya. Pada tabel diatas diperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan daerah yang diiringi juga dengan peningkatan pembiayaan dikarenakan beban belanja yang juga ikut meningkat. Peningkatan terlihat pada APBD Tahun 2016 1.204.775.293.776 meningkat menjadi 1.616.170.000.012 pada tahun 2020.

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada SiLPA Kabupaten Pangandaran tahun 2016 adalah 72.021.207.850 dan mengalami peningkatan sampai 1.6043.940.289 pada tahun 2020.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur**

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non-bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Peran fasilitas wilayah/infrastruktur terhadap daya saing Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa hal salah satunya adalah panjang jalan seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	504,31
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	N/A	44.238	58.070	65.311	48.150
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Jumlah	N/A	10	10	24	12
Rasio ijin trayek	Jumlah	N/A	0,0024	0,0024	0,0057	0,0028
Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	82	78	64	50	45
Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	N/A	2.496	2.685	2.587	2.405
Jumlah penum-pang angkutan darat	Jumlah	N/A	537.805	358.988	631.396	474.383
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Jumlah	80	87	101	129	132
Jumlah angkutan umum	Jumlah	160	162	165	165	165
Jumlah pemasangan rambu-rambu	Jumlah	732	732	757	782	835
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Jumlah	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Tabel Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	463.952	469.098	466.838	458.363	473.231
Jumlah orang/barang melalui dermaga	Jumlah	6.223	17.081	18.151	20.515	33.657
Jumlah orang/barang melalui terminal	Jumlah	456.179	449.592	446.110	435.217	473.231
Jumlah orang/ barang melalui bandara	Jumlah	1.550	2.425	2.577	2.631	1.576

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2021)

Pada tabel di atas dapat dilihat kemampuan Kabupaten Pangandaran terkait fasilitas wilayah dan infrastruktur. Panjang jalan Kabupaten Pangandaran tidak bertumbuh dan tetap pada panjang 504,31 km. Padahal arus penumpang cukup tinggi serta mobilitas masyarakat Kabupaten Pangandaran naik dengan signifikan hingga 435.217 orang/ barang yang melalui terminal. Hal ini menunjukkan kebutuhan fasilitas jalan yang tinggi. Selain itu kebutuhan infrastruktur jalan yang seharusnya tersedia sebesar 1.380 hanya mampu tersedia 782 pada tahun 2020.

### 2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Sedangkan peran iklim berinvestasi terhadap daya saing di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa hal salah satunya adalah investasi daerah.

**Tabel 2.69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor PMDN	Jumlah	523	789	429	131	2124
Jumlah Investor PMA	Jumlah	N/A	N/A	1	N/A	N/A
PMA	Rp	0	3,376,000,00	17,750,000,00	0	0
PMDN	Rp	269.331.393.391,00	539.813.364.250,00	187.541.216.995,00	475.010.357.987,00	349.898.121.679,00
Jumlah investasi (PMA/PMDN)	Rp	N/A	N/A	N/A	N/A	349.899 M

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pada tabel di atas dapat dilihat, jumlah investasi PMDN mengalami flukatif atau dapat dikatakan selalu berubah – ubah dari setiap tahun ke tahun. Tentu Kabupaten Pangandaran dalam hal tersebut harus lebih mengoptimalkan capaian iklim investasinya.

### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang fundamental dalam majunya sebuah daerah karena sumber daya manusia memberikan sumbangan pemikiran dan upaya-upaya dalam mencapai tujuan. Fokus sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio ketergantungan yang dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

**Tabel 2.70 Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Lulusan S1	Jumlah	509	524	554	582	224
Lulusan S2	Jumlah	53	55	58	61	0
Lulusan S3	Jumlah	0	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2021)

Dilihat dari tabel di atas maka akan terlihat bahwa jumlah lulusan tingkat pendidikan sarjana di Kabupaten Pangandaran cukup bervariasi. Angka lulusan yang ada berfokus kepada lulusan S1 yang mendominasi angka kelulusan sarjana.

#### 2.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Adanya manfaat-manfaat tersebut, pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat menunjang daya saing daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)	Jumlah	1.994.044	2.954.559	4.045.704	3.775.273	2.261.981
PAD sektor pariwisata	Jumlah	5.732.038.150	14.598.742.005	19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	6	15	18	4	N/A
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	N/A	N/A	2	2	N/A
Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu (yang diduga)	Jumlah	N/A	N/A	30	30	30

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran)

Dilihat dari tabel diatas, PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan di tahun 2008 hingga 2019. Akan tetapi, di tahun 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya kejadian luar biasa Covid-19.

## 2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.72 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Tahun 2020**

No	Jenis SPM / Indikator	Satuan	Capaian	Perangkat Daerah
<b>A. Bidang Pendidikan</b>				
1.	Rasio Sekolah / penduduk Usia 13-15	Rasio	1:377,06	Disdikpora
2.	Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS / penduduk Usia 7-12 /13-15	Rasio	1:139,15	Disdikpora
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	Rasio	1:140,81	Disdikpora
4.	Rasio	Rasio	1:12,91	Disdikpora
5.	Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	1,550	Disdikpora
6.	Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	19,498	Disdikpora
7.	Rasio	Rasio	1:12,57	Disdikpora
8.	Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	5.431	Disdikpora
9.	Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	57.996	Disdikpora
10.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	1:10,76	Disdikpora
11.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang	4349	Disdikpora
<b>B. Bidang Kesehatan</b>				
1.	Rasio Posyandu Per Seratus Balita	Rasio	1,88	Dinkes
2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1:28.432	Dinkes
3.	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Rasio	1:12.544	Dinkes
4.	Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	1:20.309	Dinkes
5.	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	Jumlah	6095	Dinkes
6.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	97,38	Dinkes
7.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	102.10	Dinkes
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,1	Dinkes
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	Dinkes
10.	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	101,5	Dinkes
11.	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	%	N/A	Dinkes
12.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	40,1	Dinkes
13.	Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	40	Dinkes
14.	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	56,8	Dinkes
15.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,27	Dinkes
16.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	Dinkes



No	Jenis SPM / Indikator	Satuan	Capaian	Perangkat Daerah
17.	Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	%	100	Dinkes
18.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	%	99,75	Dinkes
19.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	%	100	Dinkes
20.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	%	97,73	Dinkes
21.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	91,99	Dinkes
22.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	%	95,38	Dinkes
23.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	80,97	Dinkes
24.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	65,78	Dinkes
25.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	%	100	Dinkes
26.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	%	100	Dinkes
27.	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	%	100	Dinkes
28.	Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)	%	100	Dinkes
29.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	%	95,38	Dinkes
30.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	80,97	Dinkes
31.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	65,78	Dinkes
32.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	%	100	Dinkes
33.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	%	100	Dinkes
34.	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	%	100	Dinkes
35.	Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan (%)	%	100	Dinkes
36.	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	8,55	Dinkes
37.	Kasus HIV	Orang	16	Dinkes
38.	Angka kesakitan Tuberculosis	Orang	387	Dinkes
<b>C. Bidang Pekerjaan Umum</b>				
1.	Persentase Pemenuhan kebutuhan akses air minum sehari-hari	Persen	76%	DPUTRPRKP
2.	Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Persen	62%	DPUTRPRKP
<b>D. Bidang Perumahan</b>				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	n/a	n/a	DPUTRPRKP
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n/a	n/a	DPUTRPRKP

No	Jenis SPM / Indikator	Satuan	Capaian	Perangkat Daerah
	bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten			
<b>E. Bidang Trantibum Linmas</b>				
1.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Jumlah	37	Kantor Satpol PP
2.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Jumlah	10	Kantor Satpol PP
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	Persen	100	Kantor Satpol PP
4.	pelayanan penyelamatan korban kebakaran	Kasus	79	BPBD
5.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Persen	29	BPBD
<b>F. Bidang Sosial</b>				
1.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	100	Dinsos PMD
2.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,71	Dinsos PMD
3.	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	1.427	Dinsos PMD
4.	Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	Dinsos PMD
5.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	117.471	Dinsos PMD

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)

Selanjutnya, dari rangkaian penjelasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing pada Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.73 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	5,29	5,10	5,41	5,96	-0,05	<
2.2.1.2	Indeks Gini	0,337	0,352	0,340	0,310	0,330	<
2.2.1.3	Penduduk Miskin (PO)	10,23	10,00	8,12	7,17	8,99	=
2.2.1.4	Laju Inflasi	3,45	3,48	3,24	1,72	1,61	=
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	65,79	66,60	67,44	68,21	68,06	=
2.2.2.1	Angka Melek Huruf	N/A	N/A	N/A	N/A	99,46	=
2.2.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	N/A	77,74	75,08	76,79	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,20	3,34	3,58	4,48	5,08	
2.2.3.1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	6	15	18	4	N/A	<
2.2.3.1	Jumlah Klub Olahraga	127	127	127	127	146	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.3	PELAYANAN UMUM						
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar						
2.3.1.1	Pendidikan						
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	106,34	100,64	104,5	97,03	96	=
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	105,75	98,2	98,82	99,29	98	=
	Angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	60,29	63	0	0	0	<
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91	78	93	88	91	=
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69	72	78	67	69	=
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	44,15	43	0	0	0	<
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	2673	2283	2947	4527	4349	<
2.3.1.2	Kesehatan						
	Prevalensi Balita Stunting	4,8	3,7	4,1	3,3	3,94	=
	Angka Harapan Hidup	70,4	70,56	70,84	71,12	71,4	=
	Jumlah Perawat	181	144	355	355	446	=
	Jumlah Bidan	85	134	370	373	377	=
	Jumlah Farmasi	10	10	14	48	136	=
	Jumlah Ahli Gizi	9	11	12	20	20	=
	Jumlah Dokter Spesialis	0	0	0	0	12	<
	Jumlah Dokter Gigi	7	7	7	9	12	=
	Jumlah Dokter Umum	17	19	36	43	56	=
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	13,3	40	73,3	100	100	=
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Panjang Jalan Kondisi Baik	97.83	181	269.75	401.2	429,129	=
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	52.86	52.86	63.58	63.58	67,57	=
	Luas Areal Irigasi (Ha)	10.341,91	10.341,91	10.341,91	16.785,38	16.785,38	=
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	N/A	65	53	65	66	=
	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	1	3	4	4	6	<
	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	31,98	47,72	60,09	83	85,09	=
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	N/A	N/A	54,62	N/A	N/A	<
	persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	5,71	5,71	5,71	5,71	11,43	=
2.3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	N/A	11	31	53	79	=
	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	N/A	14	24	10	37	=
2.3.1.6	Sosial						
	Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	N/A	53.121	57.096	50.817	116.458	=
	Jumlah PPKS yang tertangani	N/A	52.634	48.272	45.944	116.458	=
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	N/A	99,01	84,54	90,41	100	=
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	N/A	3,78	6,08	5,81	6,71	<
	Jumlah anak jalanan, anak	N/A	N/A	N/A	N/A	1.427	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina						
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar						
2.3.2.1	Tenaga Kerja						
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	N/A	0,98	0,98	0,98	=
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	89,30	89,68	90,02	89,78	<
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	65,45	69,20	74,56	74,57	<
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	N/A	27,17	26,49	26,11	24,70	<
2.3.2.3	Pangan						
	Angka kecukupan Protein perkapita	65,7	63,7	68,8	70,5	70,6	<
	Jumlah Desa Rawan Pangan	13	11	10	9	8	<
	Total desa pangan lestari	N/A	N/A	18	3	3	=
	Ketersediaan pangan utama (food availability)	21887,73	32433,85	32576,42	61823,74	38727,46	=
	Skor PPH Konsumsi	87,1	82	89,5	93,2	94,5	=
	Angka ketersediaan Energi	2622,1	2896,2	3602	6460	5525,18	=
	Angka Ketersediaan Protein	63,9	79,2	275,62	180,89	350,72	=
	Skor PPH Ketersediaan	N/A	82	89,5	93,2	94,50	=
	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	77,18	82,56	81,99	=
2.3.2.4	Pertanahan						
	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	100	100	=
2.3.2.5	Lingkungan Hidup						
	Volume produksi sampah	N/A	N/A	167.025,2 m3	181.475,86 m3	183.136,82 m3	=
	Persentase Penanganan sampah	N/A	N/A	18,10%	29,18%	16,84%	=
	Indeks Kualitas Air	N/A	50	47,78	50	51,67	=
	Indeks Kualitas Udara	N/A	85,76	84,30	85,68	77,79	=
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	N/A	52,28	52,28	52,28	65,25	=
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	23,23	32,64	78,03	91,96	96,95	=
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	57,05	44,06	29,02	17,03	26,78	=
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	N/A	N/A	3,12	26,51	14,66	<
	Persentase validasi database kependudukan	N/A	N/A	8,7	30,43	39,13	=
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Persentase Desa Kategori Swasembada	N/A	N/A	N/A	4,30	8,60	=
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik	6,45	13,98	26,88	44,09	59,14	=
	Jumlah PKK aktif	104	104	104	104	104	=
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	TFR / Total Fertility Rate	2,22	2,41	2,42	2,32	2,29	<
	CPR / Contraceptive Prevalence Rate (%)	75,37	74,94	75,15	76,41	60,25	=
	Unmet Need	17,55	17,49	17,23	14,88	24,84	=
	LPP / Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,6	0,58	0,53	0,53	0,55	=
	Ratio Akseptor KB (%)	75,39	74,99	75,16	76,43	60,25	=
	ASFR / Age Specific Fertility Rate	23,89	22,6	13,45	17,61	18,01	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.2.9	Perhubungan						
	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	73,2	77,5	70	76,3	76,9	=
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	30	40	50	50	60	=
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika						
	Indeks SPBE	N/A	N/A	1.50	2.32	3.02	=
	IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat /Standart Kepuasan Masyarakat )	1	1	1	1	1	=
2.3.2.11	Usaha Mikro Kecil Menengah						
	Persentase koperasi aktif	26,63	30,54	32,69	33,96	89,02	>
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	0	0	100	100	100	=
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0	0	100	100	100	=
2.3.2.12	Penanaman Modal						
	Jumlah Investor PMDN	523	789	429	131	2124	>
	Jumlah Investor PMA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	<
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah Klub Olahraga	127	127	127	127	146	=
	Jumlah Gedung Olahraga	42	42	42	117	117	=
2.3.2.14	Statistik						
		Jumlah Publikasi	N/A	0	3	1	<
2.3.2.15	Persandian						
	Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi	N/A	N/A	10	16	20	<
2.3.2.16	Kebudayaan						
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	15	18	12 (Keg. Bidang)	8	<
	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	-	-	2	2	-	<
	Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu	-	-	30	30	30	=
2.3.2.17	Perpustakaan						
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	N/A	925	1.169	12.567	3.931	=
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	N/A	2.077	3.490	3.709	4.010	=
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	N/A	N/A	N/A	1	1	=
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	N/A	18,625	31,195	31,426	42,958	=
2.3.2.18	Kearsipan						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	N/A	18	18	18	=
	Persentase arsip yang terjamin ke amanannya	N/A	N/A	N/A	48,03	48,03	=
2.3.3	Urusan Pilihan						
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan						
	Jumlah Produksi Ikan (ton)	N/A	3063,63	2517,61	2757,86	1522,53	<
	Target Daerah (ton)	N/A	2925	2931	2941	2947	=
	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	N/A	17,3	20,5	22,5	23,1	=
	Target Daerah (kg/kapita/tahun)	N/A	18,88	20,1	22,04	22,9	=
	Jumlah Kelompok Nelayan	189	189	194	195	241	=
	Jumlah Produksi Ikan	N/A	2830,53	2344,76	2498,91	1282,54	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan						
	Produksi benih ikan	N/A	8.538.451	6.825.978	8.617.470	11.728.291	=
2.3.3.2	Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisata	1.994.044	2.954.559	4.045.704	3.775.273	2.842.022	<
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	5.732.038.150	14.598.742.005	19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250	<
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	732.514	823.303	932.137	1.060.116	1.091.410,69	=
2.3.3.3	Pertanian						
	Produktivitas Padi	N/A	6,01	6,2	6,21	6,3	<
	Luas Lahan Sawah	N/A	16.564	16.564	16.564	16.564	=
	Produktivitas Jagung	N/A	6,59	6,26	5,97	6,01	=
	Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya	N/A	202.099,56	209.879,34	205.003,38	205.981,12	=
2.3.3.4	Perdagangan						
	Persentase Pertumbuhan ekspor	N/A	N/A	N/A	-34,25	81,88	=
	Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	N/A	N/A	N/A	-34,25	81,88	=
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,84	22,80	22,71	22,75	21,95	<
2.3.3.5	Perindustrian						
	Persentase Pertumbuhan Industri	N/A	N/A	N/A	0,005	0,004	<
	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	N/A	N/A	N/A	0,45	0,52	>
2.3.3.6	Transmigrasi						
	Persentase Transmigran Swakarsa	14	5	0	0	0	<
2.3.4	Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan						
2.3.4.1	Perencanaan						
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)	N/A	N/A	22,22	22,09	22,24	=
	Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	94,26	98,17	97,75	=
	Nilai SAKIP Bappeda	N/A	N/A	A (89,71)	A (89,86)	A (89,88)	=
2.3.4.1	Keuangan						
	Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolan Keuangan Daerah	N/A	B	A	A	A	=
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	2,92	31,22	30,75	0,8	-27,79	=
2.3.4.2	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan						
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	N/A	0,03	2,80	1,40	10,25	>
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	4,80	1,74	14,50	11,80	14	=
2.3.4.3	Penelitian dan Pengembangan						
	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	N/A	N/A	N/A	6	8	=
	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	N/A	N/A	N/A	8	8	=
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	N/A	N/A	N/A	75	100	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.4.4	Pengawasan						
	Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	N/A	N/A	100	100	41,30	=
	Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3	N/A	N/A	108	100	85,71	=
	Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	N/A	N/A	117,64	117,63	133,33	=
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) Inspektorat	N/A	N/A	119,99	166,67	119,99	=
	Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM	N/A	N/A	0	100	40,00	=
2.3.4.5	Pemerintahan Umum						
	Jumlah Kejadian Konflik	N/A	N/A	1	1	0	<
	Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	440	300	150	0	280	=
	Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	225	238	75	238	190	<
2.3.4.6	Sekretariat Daerah						
	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	CC (51,60)	CC (52,06)	=
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90%	88%	98%	166,67	166,67	=
2.3.4.7	Sekretariat Dewan						
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	N/A	N/A	67,40	81,38	83,54	=
2.3.4.1	Penanggulangan Bencana						
	Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana	69,3	71,2	69	68,8	68,8	=
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	17	20	24	27	29	=
2.4	DAYA SAING DAERAH						
2.4.1	Realisasi Pendapatan	928,041,3 99,889.00	1,264,692,8 35,455.00	1,137,227,0 65,389.50	1,474,724,16 9,544.00	1,572,138,480, 714.00	=
	Realisasi Belanja	979,407,0 58,413.50	1,307,759,9 32,586.36	1,161,646,5 78,170.45	1,461,491,51 9,435.00	1,565,838,472, 278.00	=
	SILPA	72,021,20 7,849.50	28,954,110, 718.14	3,734,597,9 37.00	16,043,940 ,289.05	22,308,402,2 66.05	=
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
	Panjang Jalan	504,31	504,31	504,31	504,31	504,31	=
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	N/A	44.238	58.070	65.311	48.150	=
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	N/A	10	10	24	12	>
2.4.3	Fokus Iklim Investasi						
	Jumlah Investor PMDN	523	789	429	131	2124	>
	Jumlah Investor PMA	N/A	N/A	1	N/A	N/A	<
	PMA	-	3,376,000,0 00	17,750,000, 000	-	-	<
	PMDN	269,331,3 93,391	539,813,36 4,250	187,541,216 ,995	475.010,35 7,987	349,898,121, 679	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia						
	Lulusan S1	509	524	554	582	224	<
	Lulusan S2	53	55	58	61	N/A	<
2.4.5	Fokus Daya Saing Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)	1.994.044	2.954.559	4.045.704	3.775.273	2.261.981	=
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	1.958.875	3.440.076	5.065.693	5.614.481	2.842.022	=
	PAD sektor pariwisata	5.732.038. 150	14.598.742. 005	19.813.647. 250	18.472.858 .000	13.786.568.2 50	=

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)

## 2.6 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran

### Periode Tahun 2016-2021

Periode RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Namun dalam perjalanannya, terdapat perubahan yang diakibatkan :

1. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekwensi adanya peralihan beberapa urusan pemerintahan di daerah menjadi urusan pemerintahan di provinsi, antara lain pengelolaan pendidikan menengah dan urusan kehutanan.
2. Adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah di semua daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut maka RPJMD Kabupaten Pangandaran diubah dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Dalam perubahan





tersebut terdapat beberapa indikator yang disesuaikan. Adapun hasil capaian indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani</b>								
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2	Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)	n/a	n/a	2	2	2
		3	Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	n/a	n/a	3	3	3
		4	Nilai AKIP	n/a	n/a	B	B	B
		5	Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	n/a	n/a	85,73	94,15	97,30
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	1	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	n/a	n/a	58,65	58,18	38,92
		2	Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	n/a	n/a	0,85	2,32	3,02
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	41,56	51,60	52,06
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1	Persentase Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)	n/a	n/a	n/a	7,4	8,57%
		2	Survey Kepuasan Masyarakat	n/a	76.00	78.62	(81,18)	84,49
<b>Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b>								
1	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	1	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	n/a	17,6	20,72	35
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	60,54	61,61	65,22
<b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>								
1	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	n/a	n/a	60	83,38	85
		2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	n/a	n/a	0,005	0,003	0,002
		3	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	n/a	n/a	56%	0	68
		4	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	n/a	n/a	62%	63,67%	66
		5	Indeks Resiko Sanitasi	n/a	n/a	40%	38,27%	32
2	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	1	Indeks Risiko Bencana	n/a	n/a	130,8	146,13	145,44
3	Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	1	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	n/a	n/a	8,57%	0%	11%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>								
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	n/a	n/a	50%	50%	60%
		2	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	n/a	n/a	82%	83%	84%
2	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	1	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	n/a	n/a	1	1	0
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	n/a	n/a	79,04%	82,10%	82,10%
<b>Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>								
1	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	66,6	67,44	68,21	68.06
2	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,598	0,581	0,529	0,528	0,55
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	n/a	n/a	65,45	69,20	69,20
4	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	1	Indeks Pembangunan Kepemudaan	n/a	n/a	0,509	0,539	0,55
		2	Indeks Pembangunan Keolahragaan	n/a	n/a	0,674	0,75	0,73
5	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penurunan angka kemiskinan	n/a	n/a	1,88	0,41	-1,28
<b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>								
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	1	Indek Gini	0,33	0,35	0,34	0,31	0,33
2	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	4,2	3,34	3,58	4,48	5,08
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	Persentase pertumbuhan PDRB	5,29	5,10	5,41	5,96	-0,05
		2	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	n/a	n/a	95,30%	96%	96%
		3	Jumlah Koperasi yang sehat	n/a	n/a	1	1	1
		4	Pola Pangan Harapan	n/a	n/a	89,6	93,20	94,50
		5	Jumlah kunjungan wisata	n/a	n/a	4.044.204	4.119.987	2.930.506
6	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	n/a	n/a	-	-	-		

Sumber : Diolah Penyusun, 2021

Meskipun secara umum capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Pangandaran periode Tahun 2016-2021 berada pada kategori Baik, namun masih terdapat beberapa catatan terhadap indikator sasaran yang perlu ditingkatkan, antara lain :

1. Indeks Profesionalisme ASN

Perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan Profesionalisme ASN

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perlu upaya keras untuk penyadaran terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga langsung ke sungai sehingga menurunkan kualitas air

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja agar angka pengangguran terbuka dapat ditekan atau diturunkan

4. Jumlah kunjungan wisata

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan cara menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pembangunan destinasi wisata berupa pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat

5. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council (GSTC)*

Diperlukan dukungan dari semua pihak, berupa pelibatan seluruh OPD maupun masyarakat. Dengan adanya perubahan penilaian indikator GSTC, maka pemerintah daerah perlu berupaya memenuhi semua indikator yang menjadi persyaratan.

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB III

---

GAMBARAN  
KEUANGAN DAERAH

### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara, salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan komprehensif yang mampu mengakomodir serta menyinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, gambaran pengelolaan keuangan juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi aset dan utang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Salah satu hal yang menjadi aspek penting dalam pemerintahan daerah adalah perihal keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan suatu realisasi kebijakan anggaran yang menjamin adanya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pada pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan beberapa potensi pajak lain yang bisa dipungut.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan hasil retribusi daerah lainnya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan terkait belanja daerah yang merupakan pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang





diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Daerah	Rp928,041,399,889.00	Rp1,264,692,835,455.00	Rp1,137,227,065,389.50	Rp1,474,724,169,544.00	Rp1,572,138,480,714.00	15.62%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp66,385,348,153.00	Rp83,591,302,088.00	Rp111,217,120,145.00	Rp114,813,035,209.00	Rp105,276,341,355.00	13.47%
1.1.1	Pajak Daerah	Rp29,249,250,499.00	Rp36,829,508,887.00	Rp52,932,788,971.00	Rp53,923,967,341.00	Rp47,132,600,965.00	14.73%
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp10,034,701,782.00	Rp28,546,301,743.00	Rp36,875,710,049.00	Rp35,887,478,953.00	Rp30,360,808,289.00	48.89%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp103,864,446.00	0.00%
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp27,101,395,872.00	Rp18,215,491,458.00	Rp21,408,621,125.00	Rp25,001,588,915.00	Rp27,679,067,65 5.00	3.06%
1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp0.00	Rp132,909,510.00	Rp92,180,810.00	Rp1,215,000.00	Rp24,411,200.00	0.00%
1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.3	Hasil kerja sama daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.4	Jasa Giro	Rp7,388,552,301.00	Rp4,373,972,017.00	Rp2,979,059,191.00	Rp3,274,626,542.00	Rp3,338,535,615.00	-15.20%
1.1.4.5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		0.00%
1.1.4.6	Pendapatan Bunga	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2,079,745,772.00	Rp70,923,121.00	3,4%
1.1.4.7	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah	Rp0.00	Rp21,350,000.00	Rp48,905,250.00	Rp58,875,000.00	Rp135,194,950.00	1,93%



No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.4.8	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan, barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.9	Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.1 0	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Rp1,209,814,329.00	Rp230,240,688.00	Rp56,884,194.00	Rp1,528,384.00	Rp16,441,425.00	180.54%
1.1.4.1 1	Pendapatan denda pajak daerah	Rp27,373,825.00	Rp74,254,669.00	Rp188,307,079.00	Rp229,551,156.00	Rp108,277,515.00	73.48%
1.1.4.1 2	Pendapatan denda retribusi daerah	Rp2,997,274.00	Rp1,708,190.00	Rp50,000,000.00	Rp0.00	Rp1,308,807.00	894.69%
1.1.4.1 3	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.1 4	Pendapatan dari pengembalian	Rp4,212,591,643.00	Rp1,128,014,173.00	Rp3,032,693,522.00	Rp3,248,816,183.00	Rp6,500,542,402.00	50.71%
1.1.4.1 5	Pendapatan dari BLUD	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.1.4.1 6	Pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp14,260,066,500.00	Rp12,253,042,211.00	Rp14,960,591,079.00	Rp16,107,230,878.00	Rp17,483,432,620.00	6.06%
1.2	Pendapatan Transfer	Rp861,656,051,736.00	Rp1,142,677,253,367.00	Rp987,734,399,074.00	Rp1,317,169,089,241.00	Rp1,422,014,919,359.00	15.09%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	Rp759,967,076,495.00	Rp889,838,406,687.00	Rp881,425,098,727.00	Rp988,109,610,345.00	Rp909,749,204,315.00	5.08%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp698,289,665,495.00	Rp811,595,965,687.00	Rp787,754,579,727.00	Rp864,020,472,345.00	Rp749,516,240,315.00	2.43%
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	Rp601,379,967,495.00	Rp604,132,006,704.00	Rp597,636,923,032.00	Rp619,806,097,581.00	Rp581,543,756,992.00	-0.77%

### III-6



No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1							
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	Rp54,648,842,495.00	Rp65,249,813,704.00	Rp59,285,031,032.00	Rp51,784,034,581.00	Rp72,664,612,992.00	9.48%
1.2.1.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp34,765,506,278.00	Rp38,392,872,595.00	Rp35,057,851,504.00	Rp27,446,832,673.00	Rp34,791,524,774.00	1.70%
	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan	Rp7,980,479,283.00	Rp6,521,628,806.00	Rp6,835,610,954.00	Rp5,936,360,248.00	Rp4,018,358,925.00	-14.73%
	Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp22,767,136,120.00	Rp27,718,196,142.00	Rp23,694,305,550.00	Rp16,632,992,103.00	Rp26,302,893,195.00	8.89%
	Cukai Hasil Tembakau	Rp4,017,890,875.00	Rp4,153,047,647.00	Rp4,527,935,000.00	Rp4,877,480,322.00	Rp4,470,272,654.00	2.94%
1.2.1.1.1.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp19,883,336,217.00	Rp26,856,941,109.00	Rp24,227,179,528.00	Rp24,337,201,908.00	Rp37,873,088,218.00	20.34%
	Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	Rp25,268,700.00	Rp203,215,884.00	Rp332,319,343.00	Rp242,734,800.00	Rp230,730,062.00	183.96%
	Penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	Rp414,121,543.00	Rp432,113,032.00	Rp374,383,161.00	Rp280,995,400.00	Rp471,143,798.00	8.43%
	penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	Rp1,986,277,429.00	Rp5,443,849,282.00	Rp4,944,070,438.00	Rp4,797,020,800.00	Rp4,440,481,584.00	38.62%
	penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	Rp8,272,774,839.00	Rp6,833,983,974.00	Rp5,908,065,237.00	Rp6,116,790,610.00	Rp4,779,508,956.00	-12.32%



No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
	yang bersangkutan						
	penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	Rp8,713,812,287.00	Rp13,418,206,810.00	Rp11,967,106,758.00	Rp12,309,504,498.00	Rp27,216,795,079.00	41.78%
	Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan	Rp471,081,419.00	Rp525,572,127.00	Rp701,234,591.00	Rp590,155,800.00	Rp734,428,739.00	13.40%
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	Rp546,731,125,000.00	Rp538,882,193,000.00	Rp538,351,892,000.00	Rp568,022,063,000.00	Rp508,879,144,000.00	-1.61%
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	Rp96,909,698,000.00	Rp207,463,958,983.00	Rp190,117,656,695.00	Rp244,214,374,764.00	Rp167,972,483,323.00	25.74%
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp58,049,848,000.00	Rp102,339,369,340.00	Rp72,613,565,472.00	Rp130,734,050,655.00	Rp57,409,276,738.00	17.80%
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Umum Non Fisik	Rp38,859,850,000.00	Rp105,124,589,643.00	Rp117,504,091,223.00	Rp113,480,324,109.00	Rp110,563,206,585.00	44.08%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp17,000,000,000.00	Rp34,730,579,000.00	Rp71,879,456,000.00	0.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus						0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan						0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	Rp61,677,411,000.00	Rp78,242,441,000.00	Rp76,670,519,000.00	Rp89,358,559,000.00	Rp88,353,508,000.00	10.07%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	Rp101,688,975,241.00	Rp252,838,846,680.00	Rp106,309,300,347.00	Rp329,059,478,896.00	Rp512,265,715,044.00	88.97%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Rp36,815,590,316.00	Rp38,119,854,495.00	Rp41,857,708,966.00	Rp44,720,429,740.00	Rp44,930,090,452.00	5.16%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Rp64,873,384,925.00	Rp214,718,992,185.00	Rp64,451,591,381.00	Rp284,339,049,156.00	Rp467,335,624,592.00	141.63%
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	Rp64,873,384,925.00	Rp214,718,992,185.00	Rp64,451,591,381.00	Rp284,339,049,156.00	Rp467,335,624,592.00	141.63%
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/ Kota	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp0.00	Rp38,424,280,000.00	Rp38,275,546,170.50	Rp42,742,045,094.00	Rp44,847,220,000.00	5.40%



No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.1	Hibah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
1.3.2	Dana Darurat		Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	0.00%
1.3.3	Lain-Lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp0.00	Rp38,424,280,000.00	Rp38,275,546,170.50	Rp42,742,045,094.00	Rp44,847,220,000.00	5.40%
2	Belanja Daerah	Rp979,407,058,413.50	Rp1,307,759,932,586.36	Rp1,161,646,578,170.45	Rp1,461,491,519,435.00	Rp1,565,838,472,278.00	13.83%
2.1	Belanja Operasi	Rp616,829,939,860.00	Rp688,971,278,433.00	Rp690,529,241,492.80	Rp759,298,714,386.00	Rp923,798,838,777.00	10.89%
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp400,239,300,514.00	Rp400,566,063,652.00	Rp398,403,632,832.00	Rp419,091,076,759.00	Rp397,230,404,286.00	-0.12%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp194,854,010,921.00	Rp254,917,853,725.00	Rp258,763,357,660.80	Rp298,453,074,925.00	Rp445,484,380,765.00	24.23%
2.1.3	Belanja Bunga	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8,332,500,000.00	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	Rp8,096,832,000.00	Rp8,517,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp670,953,726.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	Rp12,339,796,425.00	Rp22,386,069,056.00	Rp29,862,251,000.00	Rp37,806,387,702.00	Rp53,512,600,000.00	45.74%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp1,300,000,000.00	Rp2,583,692,000.00	Rp3,500,000,000.00	Rp3,948,175,000.00	Rp18,568,000,000.00	129.33%
2.2	Belanja Modal	Rp221,197,379,824.50	Rp426,921,890,626.36	Rp284,898,372,939.65	Rp499,054,520,067.00	Rp464,677,932,690.00	32.00%
2.2.1	Belanja Tanah	Rp4,938,165,639.00	Rp570,983,680.00	Rp1,856,056,945.00	Rp880,797,780.00	Rp6,913,080,498.00	192.24%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp29,490,166,038.50	Rp31,173,497,529.36	Rp28,148,945,108.65	Rp108,836,559,954.00	Rp227,513,094,027.00	97.92%
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp20,428,960,651.00	Rp144,380,637,003.00	Rp98,526,769,541.00	Rp227,425,443,413.00	Rp94,648,749,304.00	161.86%
2.2.4	Belanja Jalan	Rp163,381,468,796.00	Rp236,609,144,678.00	Rp150,476,040,776.00	Rp156,590,483,544.00	Rp132,105,705,122.00	-0.79%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp2,958,618,700.00	Rp14,187,627,736.00	Rp5,890,560,569.00	Rp5,321,235,376.00	Rp3,497,303,739.00	69.28%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5,455,618,000.00	0.00%
2.4	Belanja Transfer	Rp141,379,738,729.00	Rp191,866,763,527.00	Rp186,218,963,738.00	Rp203,138,284,982.00	Rp171,906,082,811.00	6.62%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp6,936,259,453.00	Rp6,695,361,227.00	Rp10,459,269,138.00	Rp5,900,827,382.00	Rp2,055,120,180.00	-14.00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp134,443,479,276.00	Rp185,171,402,300.00	Rp175,759,694,600.00	Rp197,237,457,600.00	Rp169,850,962,631.00	7.75%
3	Pembiayaan Daerah	Rp123,386,866,374.00	Rp72,021,207,849.50	Rp28,954,110,718.14	Rp2,811,290,180.05	Rp16,008,393,830.05	69.43%

### III-9



No	Uraian Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp123,386,866,374.00	Rp72,021,207,849.50	Rp28,954,110,718.14	Rp3,811,288,680.05	Rp116,008,393,830.05	688.89%
3.1.1	SILPA	Rp123,386,866,374.00	Rp72,021,207,849.50	Rp28,954,110,718.14	Rp3,811,288,680.05	Rp16,008,393,830.05	32.94%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp100,000,000,000.00	0.00%
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp999,998,500.00	Rp100,000,000,000.00	100.02%
3.2.1	Pembayaran Cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp100,000,000,000.00	0.00%
3.2.2	Penyertaan modal daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp999,998,500.00	Rp0.00	0.00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00%

(Sumber: BPKD Kabupaten Pangandaran, 2021)

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan terkait kondisi pengelolaan keuangan daerah dari Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016-2020. Pada pos pendapatan, pada pos pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan berkisar antara 5% hingga 15% meskipun pada pertumbuhan per tahun mengalami penurunan yang drastis tepatnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia pada Maret 2020. Selain itu besaran pendapatan transfer dibandingkan pendapatan asli daerah menandakan masih belum optimalnya pemanfaatan potensi keuangan daerah.

Hal yang sama juga terjadi pada pos belanja. Pada pos belanja operasi peningkatan terjadi pada angka 10,89% dan pos belanja modal pada angka 32%. Namun dapat dilihat bahwa besaran belanja modal masih jauh lebih sedikit dibandingkan belanja operasi yang menandakan bahwa belanja Kabupaten Pangandaran masih berfokus kepada belanja operasional pemerintahan. Pada pos pembiayaan, SiLPA di tahun 2020 masih besar. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi Covid-19.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca daerah merupakan penjelasan terkait posisi keuangan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca akan menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penyusunan neraca dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di masing-masing pemerintah daerah.

Nantinya neraca daerah akan memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Penjelasan dari posisi keuangan ini adalah posisi atas aset, utang, dan ekuitas. Aset



daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET	
01.01	ASET LANCAR	433%
01.01.01	Kas	-
01.01.02	Piutang	-266%
01.01.03	Persediaan	202%
01.02	ASET TETAP	78%
01.02.01	Tanah	131%
01.02.02	Peralatan dan Mesin	220%
01.02.03	Gedung dan Bangunan	303%
01.02.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	95%
01.02.05	Aset Tetap Lainnya	127%
01.02.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	-1604%
01.02.07	Akumulasi Penyusutan	352%
01.03	ASET LAINNYA	2570%
01.03.01	Tagihan Jangka Panjang	-828%
01.03.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
01.03.03	Aset Tak Berwujud	-305%
01.03.04	Aset Lain-Lain	-835%
01.03.05	Amortisasi	26%
	JUMLAH ASET DAERAH	95%
2	KEWAJIBAN	N/A
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-74054%
02.01.01	Utang perhitungan pihak ketiga	N/A
02.01.02	Utang Bunga	N/A
02.01.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	N/A
02.01.04	Pendapatan Diterima Dimuka	N/A
02.01.05	Utang Beban	4267%
02.01.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	N/A
3	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	N/A
4	EKUITAS DANA	65%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	95%

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa besaran Neraca pada Kabupaten Pangandaran cukup fluktuatif di beberapa pos aset daerah. Dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan aset tetap mencapai 78%. Namun beberapa data yang ada masih belum tercatat dengan baik sehingga menjadi dasar perbaikan untuk administrasi pencatatan aset daerah di Kabupaten Pangandaran periode RPJMD selanjutnya.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sistem pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara rapi dan terintegrasi dengan baik melalui siklus rangkaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan dari APBD ini mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, hingga pada tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Beberapa fungsi APBD yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, yang memiliki maksud anggaran daerah menjadi patokan untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yang memiliki maksud bahwa anggaran daerah akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, yang memiliki maksud anggaran daerah akan menjadi pedoman dalam kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, yang memiliki maksud anggaran daerah yang sudah disusun harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan hal lain sesuai prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan.

5. Fungsi Distribusi, yang memiliki maksud penyusunan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yang memiliki maksud bahwa anggaran daerah yang telah disusun harus menjadi alat untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ada beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Sub bab proporsi penggunaan anggaran akan menjelaskan mengenai proporsi dari belanja untuk memenuhi kebutuhan dari program dan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran n-3 (2018)	400,239,300,514.00	1,161,646,578,170.45	34
2	Tahun Anggaran n-2 (2019)	400,566,063,652.00	1,461,491,519,435.00	27
3	Tahun Anggaran n-1 (2020)	398,403,632,832.00	1,665,838,472,278.00	24

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa besaran persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran belanja pada APBD Kabupaten Pangandaran cukup bervariasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentasenya hanya 24% yang menandakan belanja yang ada sudah berfokus ke pos belanja yang lebih produktif dan tidak berpaku kepada belanja operasi.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan sebuah kegiatan transaksi keuangan untuk memenuhi kekurangan biaya yang ada diantara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan ini memiliki sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau biasa disebut SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran.

Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam kurun tahun dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,137,227,065,389.50	1,474,724,169,544.00	1,572,138,480,714.00
2	Belanja Daerah	1,161,646,578,170.45	1,461,491,519,435.00	1,565,838,472,278.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	999,998,500.00	100,000,000,000.00
	Defisit Riil	24,419,512,780.95	12,232,651,609.00	93,699,991,564.00

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Penjelasan mengenai defisit riil Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2020 terlihat pada tabel diatas. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi defisit pada APBD Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 dan tahun 2020. Besaran defisit di tahun 2018 diakibatkan besarnya belanja daerah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2020 defisit terjadi dikarenakan adanya pengeluaran pembiayaan yang cukup besar yang mengakibatkan beban yang berat pada APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2020.

**Tabel 3.5 Komposisi Penutup Riil Defisit Anggaran Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	28,954,110,718.14	3,811,288,680.05	16,008,393,830.05
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	100,000,000,000.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pos penerimaan pinjaman menyumbang jumlah yang cukup besar pada tahun 2020. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dari 2018 sampai dengan 2020 masih menunjukkan nilai yang fluktuatif.

**Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	28,954,110,718	100	3,811,288,680.05	100	16,008,393,830.05	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	0		0		0	
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0		0		0	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0		0		0	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0		0		0	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0		0		0	
7	Kegiatan lanjutan	0		0		0	

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Defisit anggaran memang menjadi beban dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan pos belanja lain untuk memenuhi defisit anggaran yang terjadi. Dari tabel

diatas dapat diperlihatkan bahwa SiLPA menjadi pos pendapatan untuk memenuhi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Hal ini menjadikan SiLPA masuk ke dalam pos pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pangandaran.

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Fungsi dari kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total dari keuangan daerah. Selain itu kerangka pendanaan juga berguna untuk mengetahui besaran anggaran untuk diatur mendanai belanja atau pengeluaran rutin wajib dan mengikat serta program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengkalkulasi seluruh penerimaan daerah. Suatu kapasitas daerah bisa diketahui setelah perhitungan besaran sisa lebih anggaran yang dibuat.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
1	Pendapatan Daerah	2,92%	1.678.245.953.162,01	1.810.843.084.897,53	1.828.306.972.551,09	1.896.035.745.182,08	1.985.593.580.951,30
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3,60%	240.385.953.162,00	246.896.272.487,85	255.798.304.028,81	276.658.451.426,14	322.603.135.122,10
1.1.1	Pajak Daerah	3,59%	83.095.953.162,00	85.272.410.050,82	88.455.534.094,74	95.622.681.700,95	115.055.554.800,87
1.1.2	Retribusi Daerah	6,63%	126.840.000.000,00	130.334.863.700,89	134.946.639.573,00	145.569.565.973,32	162.239.971.313,78
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,16%	30.450.000.000,00	31.288.998.736,14	32.396.130.361,07	35.466.203.751,87	45.307.609.007,45
1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	Hasil kerja sama daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	Jasa Giro	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	Pendapatan Bunga	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
1.1.4.8	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan, barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9	Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11	Pendapatan denda pajak daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12	Pendapatan denda retribusi daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.13	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.14	Pendapatan dari pengembalian	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.16	Pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pendapatan Transfer	3,52%	1.437.860.000.000,01	1.563.946.812.409,68	1.572.508.668.522,28	1.619.377.293.755,94	1.662.990.445.829,20



No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4,51%	1.143.269.881.482,20	1.174.770.767.709,84	1.216.338.920.143,82	1.294.061.500.116,47	1.363.198.549.978,55
1.2.1.1	Dana Perimbangan	4,51%	1.000.935.087.035,00	1.028.514.176.459,68	1.064.907.177.752,12	1.132.953.453.272,52	1.193.483.079.865,43
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	4,51%	608.166.975.769,00	624.923.997.904,72	647.036.342.473,18	688.381.179.048,12	725.158.908.619,47
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	6,24%	56.149.108.400,00	57.696.203.013,56	59.737.728.584,04	63.554.896.899,85	66.950.406.367,95
1.2.1.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cukai Hasil Tembakau	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kehutanan yang berasal dari hutan izin usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
	bersangkutan						
	Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.3	Dana Alokasi Umum	6,48%	552.017.867.369,00	567.227.794.891,16	587.298.613.889,14	624.826.282.148,27	658.208.502.251,52
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	4,51%	348.670.361.266,00	358.277.388.932,08	370.954.695.455,30	394.658.250.037,23	415.743.420.339,29

III-22



No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	6,52%	246.515.839.866,00	253.308.170.837,64	262.271.240.865,91	279.030.054.676,06	293.937.626.535,21
1.2.1.1.2.2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6,43%	102.154.521.400,00	104.969.218.094,44	108.683.454.589,39	115.628.195.361,17	121.805.793.804,08
1.2.1.1.3	Dana Bos	6,39%	44.097.750.000,00	45.312.789.622,88	46.916.139.823,64	49.914.024.187,17	52.580.750.906,67
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	6,51%	46.295.015.547,20	47.570.597.141,08	49.253.837.725,28	52.401.098.146,01	55.200.700.278,54
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Dana Desa	6,44%	96.039.778.900,00	98.685.994.109,08	102.177.904.666,42	108.706.948.697,94	114.514.769.834,58
1.2.2	Transfer Antar Daerah	0,63%	294.590.118.517,81	389.176.044.699,84	356.169.748.378,46	325.315.793.639,47	299.791.895.850,65
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6,53%	51.186.826.719,22	52.597.193.974,54	54.458.295.933,17	57.938.114.913,51	61.033.539.929,50
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6,53%	243.403.291.798,59	336.578.850.725,30	301.711.452.445,29	267.377.678.725,96	238.758.355.921,15
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	6,53%	243.403.291.798,59	336.578.850.725,30	301.711.452.445,29	267.377.678.725,96	238.758.355.921,15
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/ Kota	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-Lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Daerah	1,55%	1.511.345.161.785,54	1.754.312.446.883,69	1.811.936.384.876,45	1.913.928.921.795,04	2.005.452.715.839,99
2.1	Belanja Operasi	0,87%	726.445.161.785,54	976.510.359.774,69	1.030.049.178.972,78	1.085.163.622.032,03	1.149.537.994.746,72
2.1.1	Belanja Pegawai	6,44%	407.943.945.273,72	432.461.376.384,33	458.582.043.517,94	489.307.040.433,64	523.558.533.264,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,41%	270.501.216.511,82	443.163.883.390,36	517.493.946.004,84	538.267.188.455,24	564.416.400.212,70



No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
2.1.3	Belanja Bunga	6,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	6,42%	45.000.000.000,00	97.704.500.000,00	50.600.163.150,00	53.990.374.081,05	57.715.709.892,64
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,42%	3.000.000.000,00	3.180.600.000,00	3.373.026.300,00	3.599.019.062,10	3.847.351.377,38
2.2.	Belanja Modal	0,70%	581.900.000.000,00	562.692.087.109,00	553.901.209.903,67	586.097.978.343,01	596.828.007.115,31
2.2.1	Belanja Tanah	6,43%	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.620.650.000,00	5.997.233.550,00	6.415.840.451,79
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6,38%	150.000.000.000,00	159.000.000.000,00	168.555.900.000,00	179.680.589.400,00	192.078.550.068,60
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	6,43%	276.400.000.000,00	238.862.087.109,00	210.590.900.903,67	220.123.006.340,01	135.531.616.783,81
2.2.4	Belanja Jalan	6,36%	150.000.000.000,00	159.000.000.000,00	168.571.800.000,00	179.697.538.800,00	262.160.416.840,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6,43%	500.000.000,00	530.000.000,00	561.959.000,00	599.610.253,00	641.582.970,71
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5,25%	7.000.000.000,00	7.350.000.000,00	7.732.200.000,00	8.142.006.600,00	8.589.816.963,00
2.4	Belanja Transfer	6,33%	196.000.000.000,00	207.760.000.000,00	220.253.796.000,00	234.525.314.820,00	250.496.897.014,96
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	6,30%	10.000.000.000,00	10.600.000.000,00	11.244.480.000,00	11.930.393.280,00	12.765.520.810,24
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6,33%	186.000.000.000,00	197.160.000.000,00	209.009.316.000,00	222.594.921.540,00	237.731.376.204,72
3	Pembiayaan Daerah	-18,28%	60.000.000.000,00	55.068.000.000,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	19.868.795.720,45
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-0,16%	20.000.000.000,00	20.068.000.000,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	19.868.795.720,45
3.1.1	SilPA	0,61%	20.000.000.000,00	20.068.000.000,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	19.868.795.720,45
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
		%					
	pemberian pinjaman daerah						
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembayaran Cicilan pokok utang yang jatuh tempo	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal daerah	2,83%	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00%	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)

Tabel di atas menunjukkan potensi dan proyeksi keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menargetkan hanya 3,65% untuk pendapatan adalah karena pemulihan ekonomi masih belum maksimal dikarenakan Pandemi Covid-19. Selain itu kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kerumunan dan kegiatan sangat berdampak kepada banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Bahkan pos pendapatan asli daerah hanya menargetkan peningkatan per tahun sekitar 4,51%.

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Makna SiLPA dalam hal ini bisa memiliki makna ganda yaitu antara positif atau negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over* target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.



**Tabel 3. 8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.678.245.953.162,01	1.810.843.084.897,53	1.828.306.972.551,09	1.896.035.745.182,08	1.985.593.580.951,30
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	20.000.000.000,00	20.068.000.000,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	19.868.795.720,45
	Total penerimaan	1.698.245.953.162,01	1.830.911.084.897,53	1.848.487.353.351,09	1.916.064.773.126,08	2.005.462.376.671,75
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi/Pegawai	407.943.945.273,72	432.461.376.384,33	458.582.043.517,94	489.307.040.433,64	523.558.533.264,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.250.302.007.888,29	1.363.449.708.513,20	1.389.905.309.833,15	1.426.757.732.692,44	1.481.903.843.407,75

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)



Kapasitas riil keuangan daerah merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan anggaran yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam belanja daerah setelah dikurangi dengan kewajiban. Perhitungan kapasitas riil adalah menjumlah pendapatan daerah, SiLPA, dan pencairan dana cadangan yang selanjutnya dikurangi pos pengeluaran yang terdiri dari belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa kapasitas riil Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup konstan. Semakin besar kapasitas riil keuangan suatu daerah menunjukkan semakin besar pula kemampuan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kapasitas riil digunakan untuk pendanaan prioritas pembangunan. Prioritas tersebut akan mendukung dan mewujudkan visi, misi, dan janji politik bupati terpilih. Sehingga perwujudan visi dan keadaan ideal daerah dapat terwujud di akhir periode RPJMD Kabupaten Pangandaran yang akan berakhir pada tahun 2026.



**Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.250.302.007.888,29	1.363.449.708.513,20	1.389.905.309.833,15	1.426.757.732.692,44	1.481.903.843.407,75
	Prioritas I (60%)	750.181.204.732,97	818.069.825.107,92	833.943.185.899,89	856.054.639.615,46	889.142.306.044,65
	Prioritas II (40%)	500.120.803.155,32	545.379.883.405,28	555.962.123.933,26	570.703.093.076,98	592.761.537.363,10

(Sumber: BPKD diolah, 2021)

Kapasitas riil Kabupaten Pangandaran selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 2 kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:
  - a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
  - d. Belanja Moda Transportasi, besarnya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH Kab/ Kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan Belanja Mengikat atau (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;

2) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;

3) Belanja DAK BOS;

4) Belanja Operasional Kantor; dan

5) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026.

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB IV

---

PERMASALAHAN  
DAN ISU-ISU STRATEGIS

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Pembahasan yang akan dibahas pada bab 4 (empat) ini adalah akan menguraikan secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa lalu dan isu strategis yang bisa ditindaklanjuti untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran sesuai visi dan misi bupati terpilih. Telaah permasalahan dan isu strategis ini akan berdasarkan kepada: isu strategis sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021; RPJMD Kabupaten Jawa Barat Tahun; RPJM Nasional Tahun; telaah terhadap isu Internasional; telaah terhadap *Platform* Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk sistematis disajikan di bawah ini:

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan terjadi akibat adanya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan rencana pembangunan yang ditargetkan. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/Target tahunan di dalam RPJMD/Capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BAB II).

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dijabarkan melalui indikator di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang ditetapkan berdasarkan perbandingan dengan standar internasional, nasional ataupun regional.

##### **4.1.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan

kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun</li> <li>2. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari Kabupaten Pangandaran</li> <li>3. Jumlah Investasi belum maksimal pada tahun 2019 baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li> <li>4. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk Perdana</li> <li>5. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan</li> <li>6. UMKM masih memiliki permasalahan pada pemasaran</li> <li>7. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat</li> <li>8. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal</li> <li>9. Belum adanya BLK</li> <li>10. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB <i>trend</i> pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya</li> <li>11. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang didalam nya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran</li> <li>12. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>2. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)</li> <li>3. Penanaman Modal Asing (PMA) masih rendah baru mencapai Rp 17.750.000.000 tahun 2018</li> <li>4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih rendah yang baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li> <li>5. Keterampilan tenaga kerja belum optimal</li> <li>6. Belum ada industri besar yang dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal</li> <li>7. Pemilik hotel dan restoran didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Pangandaran</li> <li>8. Belum optimalnya pengolahan hasil bumi yakni pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan</li> <li>9. Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi</li> <li>10. Penurunan luas panen padi</li> <li>11. Penurunan luas tanam tanaman palawijaya</li> <li>12. Penurunan produksi ternak seperti kambing dan domba</li> <li>13. Penurunan produksi unggas daging ayam petelor dan berkurang nya produksi telur ayam dan telur</li> <li>14. Penurunan produksi ikan budidaya air laut</li> <li>15. Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata</li> <li>16. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata</li> <li>17. Belum optimalnya penggunaan produk lokal untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Pangandaran</li> <li>18. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah</li> <li>19. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata</li> <li>20. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran</li> </ol>
2	Masih rendahnya PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hidup dari sebagian besar penduduknya</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	per kapita	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih rendahnya produksi dalam daerah</li> <li>3. Kurangnya produk daerah untuk ekspor</li> <li>4. Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemasan (Sentra UMKM)</li> <li>5. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat</li> </ol>	<p>cenderung sangat rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi</li> <li>3. Tingkat pendapatan yang rendah</li> <li>4. Kurang optimalnya peningkatan produktivitas sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</li> <li>5. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah</li> </ol>
3	Masih adanya prevalensi balita gizi kurang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>2. Masih rendahnya program-program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat</li> <li>2. Kurangnya SDM kesehatan</li> </ol>
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD,</li> <li>2. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata,</li> <li>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal</li> <li>4. Beberapa sumber pajak dan retribusi belum memiliki Perda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.</li> <li>2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.</li> <li>3. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.</li> <li>4. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur.</li> </ol>
5	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat / Kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Ciamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena pertumbuhan disektor non pertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian,</li> <li>2. Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat indikasi bahwa sektor pertanian saat ini masih banyak dibiayai oleh lembaga non bank maupun dibiayai secara mandiri (<i>self financing</i>). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan di sektor pertanian yang melalui bank hanya sebesar 12%, masih di bawah pembiayaan melalui sektor informal yang mencapai 13 persen. Salah satu penyebab utama mengapa perbankan enggan membiayai sektor ini adalah karakteristik komoditas pertanian yang produksinya dianggap berisiko tinggi karena sangat tergantung dengan alam.</li> <li>2. Sektor pertanian juga memiliki produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Produktifitas ini dihitung berdasarkan rasio antara PDB dengan jumlah tenaga kerja.</li> <li>3. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor</li> </ol>





No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi.
6	RLS masih rendah	1. RLS masih rendah	1. Belum ada intervensi pemerintah daerah untuk program kesetaraan pendidikan untuk penduduk diatas usia 25 tahun
7	Nilai Tukar Petani	1. Belum ada Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani 2. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM	1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan petani
8	Masih rendahnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1. 1. Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV baru mencapai 87,5% tahun 2020, sedangkan pada UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan setiap guru wajib memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar untuk sekolah pendidikan dasar dan menengah belum optimal 2. Di Kabupaten Pangandaran Tidak ada Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Pendidikan
9	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio 2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat 4. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup menunjukkan nilai lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 4. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau
10	Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (82,03) pada tahun 2020	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana pada tahun 2020 untuk Kabupaten Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. Sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi mengalami komplikasi ketika proses	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 4. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau

#### IV-5



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		melahirkan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat 4. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran mencapai angka 49,39 pada tahun 2019	
11	Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	1. Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran masih kurang jika dibandingkan dengan rasio rumah sakit di Jawa Barat , dimana di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1:426.483, sedangkan di Jawa Barat 1:170.647	1. Ketersediaan sarana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat belum optimal 2. Minimnya lahan
12	Masih rendahnya Rasio dokter per seratus ribu penduduk	1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter
13	Masih adanya kasus balita pneumonia baru mencapai 21,7% pada tahun 2020, sedangkan di Jawa Barat sebesar 58,80% dan Nasional sebesar 56,61%.	1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana untuk Kab. Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter 4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai pneumonia
14	Masih adanya penderita penyakit Tuberkulosis BTA dengan cakupan penemuan yaitu 35,72% pada Tahun 2020, sedangkan target pada SPM kesehatan harus mencapai 100% dan target penanggulangan TBC	1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter 4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	nasional sampai dengan 2035 95%	2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
15	Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk) (84 pada tahun 2020) target prevalensi TBC Nasional pada tahun 2020 338 per 100.000 penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita prevalensi Tuberkulosis dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>3. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevelensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu di dukung oleh pemerintah tingkat daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat</li> <li>2. Kurangnya SDM kesehatan</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter</li> <li>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis</li> </ol>
16	Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (35,72% pada tahun 2020) minimal Capaian nasional 85%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih ada penyandang Gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB</li> <li>3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat</li> <li>4. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis</li> <li>5. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat</li> <li>2. Kurangnya SDM kesehatan</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga dokter</li> <li>4. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai Tuberkulosis</li> <li>5. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis</li> </ol>
17	Masih rendahnya proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (42,90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	pada tahun 2020, capaian nasional 87%)	umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB	
18	Masih tingginya kasus diare (pada tahun 2020 angka kesakitan diare sebesar 15,63 per 1000 penduduk)	1. Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat
19	Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (0,08% pada tahun 2020)	1. Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/ AIDS dimana untuk Kabupaten Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per 100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/ AIDS kurang optimal 3. Edukasi tidak optimal dilakukan oleh institusi terkait 4. Walaupun hanya sebesar 0,08% Jawa Barat menjadi lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat , Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV / AIDS di tingkat Provinsi maupun Nasional	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan 3. Masih kurangnya program- program Promotif dan preventif mengenai HIV/AIDS
20	Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (68,80% pada tahun	1. Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani kasus neonatus dengan komplikasi dimana untuk Kab Pangandaran rasio dokter spesialis 2,8 per	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya SDM kesehatan



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	2020)	<p>100.000 penduduk dan rasio dokter umum 13,1 per 100.000 penduduk. sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</p> <p>2. Rendahnya cakupan <i>neonatus</i> dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</p>	
21	Angka Kejadian Malaria (0,01 per 1000 penduduk pada tahun 2020)	1. Walaupun persentasenya tidak besar tetapi menunjukkan masih terjadinya kasus malaria yang merupakan salah satu penyakit menular	<p>1. Jumlah tenaga kesehatan yang menangani kasus malaria masih belum memadai</p> <p>2. Upaya promotif program bebas malaria belum optimal</p> <p>3. Upaya preventif penyebaran malaria masih kurang</p> <p>4. Kasus malaria yang terjadi di Pangandaran mayoritas dibawa oleh warga yang tidak tinggal di Pangandaran</p>
22	SPM Kesehatan	1. Konsistensi pencapaian perlu tetap dipertahankan	1. Konsistensi pencapaian target 12 indikator SPM kesehatan
23	Persentase rumah tinggal bersanitasi belum optimal	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat</p> <p>2. Kurangnya instalasi pengolah air limbah</p> <p>3. Masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan air minum</p> <p>4. Masih rendahnya cakupan layanan persampahan</p> <p>5. Masih rendahnya penanganan genangan air di wilayah permukiman</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi pola hidup bersih</p> <p>2. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman</p>
24	Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun	<p>1. Tidak tersedia drainase yang cukup untuk menampung air hujan</p> <p>2. Tingkat Kesadaran Masyarakat masih rendah sering membuang sampah, dan terjadi pengendapan</p>	<p>1. Sistem drainase yang kurang baik</p> <p>2. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan</p>
25	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik belum optimal (67,57% pada tahun 2020)	1. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik	1. Sistem operasi dan pemeliharaan irigasi yang kurang baik
26	Persentase penduduk berakses air minum belum optimal (65,70% pada tahun 2020)	1. Pelayanan jaringan air minum belum mencapai seluruh wilayah	<p>1. Belum optimalnya layanan PDAM untuk cakupan wilayah perkotaan</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air non</p>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			perpipaan untuk wilayah pedesaan
27	Ketaatan terhadap RTRW belum optimal, berdasarkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 35,04%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat sosialisasi belum maksimal kepada masyarakat</li> <li>2. Tingkat penindakan hukum/sanksi yang kurang tegas dalam implementasi kebijakan, bagi para pelanggar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar SKPD masih rendah</li> <li>2. Belum optimalnya pengendalian pembangunan yang sesuai dengan RTRW</li> </ol>
28	Persentase penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (87,55 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah kabupaten terhadap penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial</li> <li>2. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya sarana penunjang pembinaan</li> <li>2. Minimnya sarana penunjang pembinaan</li> <li>3. Belum optimalnya sarana prasarana yang ramah disabilitas</li> </ol>
29	Belum adanya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih diperlukannya pelaksanaan program-program terkait Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial agar pencapaian pada tahun-tahun berikutnya tetap tercapai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat panti sosial di Kabupaten Pangandaran yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosia</li> </ol>
30	Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan ( pada 18,13% tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan,</li> <li>2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan kewirausahaan</li> <li>2. Masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja</li> <li>3. Pembangunan Balai Latihan Kerja belum terealisasi</li> </ol>
31	Masih rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3 (17,28% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya biaya pendidikan tinggi</li> <li>2. Masih sedikitnya jumlah lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Pangandaran</li> <li>3. Mayoritas masyarakat lebih memilih bekerja setelah lulus SMA/SMK sederajat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai Pendidikan Tinggi belum optimal</li> <li>2. Tingginya biaya hidup untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kabupaten Pangandaran</li> <li>3. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar masyarakat belum optimal</li> </ol>
32	Masih rendahnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender anggota DPRD Kabupaten Pangandaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya partisipasi calon wanita</li> <li>2. Pemilih cenderung memilih calon dengan gender pria</li> </ol>
33	Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita (energi 55.25 dan protein 3.51 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat daya beli masyarakat rendah</li> <li>2. Target ketersediaan energi dan protein masih belum tercapai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sumber daya daerah</li> <li>2. Konsumsi masyarakat atas bahan pokok pengganti nasi masih belum beragam</li> </ol>
34	Masih rendahnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Persentase luas lahan bersertifikat	mengenai pertanahan 2. Masyarakat masih belum Memiliki kelengkapan administrasi pertanahan	pemerintah
35	Belum lengkapnya RPPLH Kabupaten/Kota	1. Perhatian dinas teknis terhadap penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal	1. Terbatasnya SDM 2. Penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal
36	Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten belum optimal	1. Jumlah SDM di bidang lingkungan hidup masih kurang 2. KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang kurang maksimal dalam prosesnya	1. Terbatasnya SDM 2. Proses penyusunan KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang belum optimal
37	Masih Rendahnya Indeks kualitas Air	1. Kawasan yang sangat potensial sebagai tempat cadangan penyimpanan air kurang mendapat perhatian 2. Pengelolaan limbah masih rendah 3. Belum tersedianya sarana laboratorium lingkungan	1. Belum adanya Pengelolaan Kawasan 2. Sosialisasi ramah lingkungan masih rendah 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana IPLT dan IPAL 4. Belum tersedianya alat/sarana dan prasarana
37	Masih kecilnya Indeks kualitas Tutupan Lahan	1. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas tutupan lahan	1. Belum adanya surat keputusan tentang ruang terbuka hijau 2. Pengelolaan sempadan sungai dan pantai belum optimal 3. Belum adanya taman keanekaragaman hayati 4. Belum adanya hutan kota
38	Masih minim pemberian penghargaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah	1. Masih rendahnya pelaksanaan wiyatamandala	1. Belum ada peraturan mengenai pelaksanaan wiyatamandala 2. Belum optimalnya penerapan wiyatamandala di lingkungan pemerintah daerah
39	Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang tertangani (18,65% pada tahun 2020)	1. Masih rendahnya tingkat penanganan sampah 2. Belum optimalnya tingkat pengurangan sampah	1. Terbatasnya Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah serta terbatasnya SDM
40	Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten/ kota	1. Belum tersedianya TPA/TPST/SPA	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya SDM
41	Masih rendahnya penduduk berKTP (rasio sebesar 0,97 pada tahun 2020)	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
42	Masih rendahnya bayi berakte kelahiran (rasio sebesar 0,45 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran</li><li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li><li>3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>
43	Masih kurangnya pasangan berakte nikah (rasio sebesar 0,60 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang optimal nya dinas terkait dalam sosialisasi teknis karena adanya permasalahan dari faktor eksternal</li><li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan</li><li>3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah.</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>
44	Rendahnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (96,95% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan</li><li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>
45	Rendahnya penerbitan akta kelahiran (74,61% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan</li><li>2. Terbatasnya sarana penunjang perasionalisasi <i>database</i></li><li>3. Terbatasnya SDM</li><li>4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan</li><li>5. Pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum optimal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran.</li><li>2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas</li></ol>
46	Kurangnya kelompok binaan PKK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya jumlah kelompok binaan PKK</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah</li><li>2. Rendahnya partisipasi masyarakat</li></ol>





No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
47	Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB</li> <li>3. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>4. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
48	Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (15,04% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> PUS</li> <li>2. Terbatasnya SDM</li> <li>3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
49	Masih kurangnya persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (75,78% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat</li> <li>2. Program Konseling mengenai MKPJ belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
50	Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (54,95% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKB ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
51	Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (40% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKR ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
53	Masih kurangnya cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (21% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap KB</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai BKL ber KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			mengikuti program KB belum optimal
53	Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Terbatasnya SDM</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB</li> <li>3. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>4. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal</li> </ol>
54	Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (15,04% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> PUS</li> <li>2. Terbatasnya SDM</li> <li>3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal</li> <li>2. Program Konseling mengenai KB belum optimal</li> <li>3. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum Optimal</li> </ol>
55	Rendahnya Jumlah uji kir angkutan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pengujian KIR</li> <li>2. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji kendaraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya gedung uji KIR</li> </ol>
56	Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal 1 Bis (3 jumlah terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah bandara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum beroperasinya Pelabuhan</li> <li>2. Belum optimalnya fungsi bandara</li> <li>3. Belum optimalnya fungsi terminal eksisting berkaitan dengan lahan yang terbatas dan lokasi terminal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dipenuhinya persyaratan penerbitan izin operasi Pelabuhan</li> <li>2. Belum adanya kajian potensi penumpang</li> <li>3. Perlu dilakukan pemindahan terminal Pangandaran ke Cijulang</li> </ol>
57	Kurangnya persentase layanan angkutan darat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya trayek angkutan umum</li> <li>2. Perlu adanya kajian transportasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dominasi kendaraan pribadi</li> <li>2. Jumlah trayek yang terbatas</li> <li>3. Ruas jalan Kabupaten yang sebagian besar masih kecil</li> </ol>
58	Kurangnya pemasangan Rambu-rambu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan rambu lalu lintas, papan informasi, rambu evakuasi, serta alat-alat sistem informasi peringatan dini belum optimal</li> </ol>
59	Kurangnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan</li> <li>2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Rendahnya minat masyarakat</li> <li>3. Sarana prasarana belum memadai</li> </ol>
60	Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan jaringan telekomunikasi belum mencapai seluruh wilayah Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat <i>blank spot</i> akibat kurangnya BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			2. Jaringan telepon belum melayani seluruh wilayah kabupaten
61	Rendahnya persentase koperasi aktif (86,74% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi,</li> <li>Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil</li> <li>Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi sosialisasi</li> <li>Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi</li> </ol>
62	Masih perlu peningkatan usaha mikro kecil (96,02% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakan</li> <li>Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar</li> <li>Terhambatnya promosi produk UMKM</li> <li>Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk</li> <li>Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan</li> <li>Masih rendahnya pemberdayaan SDM UMKM</li> <li>Belum optimalnya pemasaran produk UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kajian pemetaan UMKM belum tersedia</li> <li>Belum adanya sarana prasarana untuk rumah kemasan</li> <li>Belum ada unit kerja khusus untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan HAKI</li> <li>Belum tersedia alat uji laboratorium bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin edar di Kabupaten Pangandaran</li> <li>Belum ada produk hukum yang memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya</li> </ol>
63	Minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) (131 investor pada tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya jumlah investor</li> <li>Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daya tarik Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi investasi belum dikembangkan secara optimal</li> <li>Sosialisasi potensi investasi yang belum optimal Belum ditetapkannya RDTR</li> </ol>
64	Minimnya Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)( 475.010.357.987 tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendah nya nilai investasi</li> <li>Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya investor</li> <li>Upaya promosi dan peningkatan nilai investasi belum optimal</li> <li>Belum ditetapkannya RDTR</li> </ol>
65	Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data</li> </ol>
66	Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya (8 festival seni dan budaya pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya upaya dalam menarik penyelenggara kegiatan festival</li> <li>Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya promosi kabupaten pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival</li> <li>Perlunya memberikan kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event</li> </ol>
67	Belum optimalnya benda,	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kajian tentang penetapan cagar budaya belum disusun</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020)	budaya di kabupaten Pangandaran	
68	Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya</li> <li>2. Terbatasnya SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM</li> </ol>
69	Rendahnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (5.978 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koleksi buku di perpustakaan yang tidak up-to-date diperbaharui secara berkala</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang perpustakaan</li> <li>3. Terbatasnya event yang berkaitan dengan perpustakaan</li> <li>4. Rendahnya minat baca masyarakat</li> <li>5. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)</li> <li>6. Belum adanya peraturan terkait perpustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi untuk membaca di perpustakaan baik itu kepada pelajar atau masyarakat umum</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan minat pengunjung ke perpustakaan</li> <li>3. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan</li> <li>4. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan</li> </ol>
70	Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (20% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Maksimalnya pengelolaan arsip</li> <li>2. Setiap SKPD belum memiliki SDM yang khusus mengelola kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan arsip belum berorientasi pada arsip digital</li> <li>2. Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan</li> <li>3. Belum optimalnya sosialisasi SOP pengarsipan</li> </ol>
71	Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan (2 kegiatan pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya perhatian dinas teknis</li> <li>2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i></li> <li>3. Kurangnya keahlian SDM dalam mengelola arsip</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM</li> <li>2. Belum adanya tenaga arsiparis yang berstatus sebagai ASN sehingga pengelolaan arsip masih dikelola oleh tenaga non ASN</li> </ol>
72	Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip pada setiap SKPD belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan arsip pada perangkat daerah yang belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan arsip belum berorientasi pada arsip digital</li> <li>2. Pengelolaan gudang arsip terpusat dan gudang arsip pada setiap SKPD belum optimal</li> </ol>
73	Menurunnya kunjungan wisata (2.842.022 pada tahun 2020 sedangkan tahun sebelumnya 3.775.273)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung</li> <li>2. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal</li> <li>3. Pengembangan destinasi wisata perlu diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai</li> <li>4. Belum di Bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diterapkannya bidang Pariwisata sebagai tematik pembangunan daerah</li> <li>2. Terbatasnya SDM Pariwisata</li> <li>3. Masih terbatasnya media promosi yang digunakan</li> <li>4. Belum tersedianya Creative Center</li> <li>5. Belum optimalnya sarana dan prasarana di objek wisata, seperti lahan parkir, drainase, IPAL, dsb</li> <li>6. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana di kawasan wisata</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Belum optimalnya promosi daya tarik wisata</li> <li>6. Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari</li> <li>7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap</li> <li>8. Kabupaten Pangandaran berada di kawasan rawan bencana</li> <li>9. Adanya pandemi yang menurunkan kunjungan wisatawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Belum optimalnya standardisasi penerapan protokol kesehatan pada fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, restaurant, dsb.</li> </ol>
74	Rendahnya PAD sektor pariwisata (13.786.568.250 pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah PEMDA</li> <li>2. Pengembangan daya tarik wisata potensial belum optimal</li> <li>3. Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal</li> <li>4. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran pemerintah dalam merintis pembangunan pariwisata potensial</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata dalam membangun daya tarik wisata</li> <li>3. Terbatasnya SDM Pariwisata</li> <li>4. Pemenuhan kriteria GSTC-D belum optimal</li> <li>5. Belum adanya inovasi dalam upaya peningkatan PAD sektor Pariwisata</li> </ol>
75	Pengembangan Komoditi lokal belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya intervensi terhadap pengembangan komoditi lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengembangan komoditi lokal dari hulu ke hilir, mulai dari bibit, pupuk, pengelolaan tanah, pasca panen, dsb</li> <li>2. Belum optimalnya penciptaan pasar hasil komoditi lokal</li> </ol>
76	Komoditi pertanian sebagai penunjang sektor UMKM belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penerapan teknologi hasil pertanian</li> <li>2. Pemasaran produk pertanian belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya regulasi mengenai dukungan penggunaan produk pertanian lokal pada sektor lain (pariwisata, perdagangan, dsb)</li> </ol>
77	Penggunaan teknologi di sektor pertanian belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pembinaan teknologi di sektor pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya balai pelatihan pertanian</li> </ol>
78	Sertifikasi Pohon Induk Pilihan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terselenggaranya pelaksanaan balai benih pertanian</li> <li>2. Belum ada tenaga ahli dalam pembibitan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sumber daya tenaga ahli pembibitan</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung benih pertanian</li> </ol>
79	Pengembangan Agrowisata belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya koordinasi antara pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya ego sektoral</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
80	Peningkatan sektor ternak belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya pasar ternak</li> <li>2. Belum tersedianya porkeswa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya pola pasar tradisional</li> </ol>
81	Peningkatan kelompok tani muda belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya minat pemuda dalam sektor pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang menariknya sektor pertanian bagi pemuda</li> </ol>
82	Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan PEMDA</li> <li>2. Masih rendahnya SDM nelayan</li> <li>3. Masih Rendahnya Armada Nelayan</li> <li>4. Belum Optimalnya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/ perikanan yang tinggi</li> <li>6. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM</li> <li>2. Kurangnya sarana penunjang</li> <li>3. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk bisa memiliki dan menggunakan teknologi terbaru di bidang pengolahan ikan</li> <li>4. Kapabilitas nelayan masih minim sehingga sulit untuk menggunakan teknologi pengolahan ikan</li> </ol>
83	Nilai tukar nelayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan</li> <li>2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/ pembudidaya ikan dan</li> <li>3. Belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif</li> <li>4. Perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimal perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembudidayaan ikan kecil dan menurunkan biaya produksi</li> <li>2. Daya beli masyarakat masih rendah</li> <li>3. Belum ada teknologi pengolahan ikan karena dengan adanya pengolahan ikan, nilai jual ikan akan meningkat</li> <li>4. Belum adanya standar jual untuk setiap jenis ikan dimana dengan adanya standar jual, hal tersebut dapat mencegah fluktuasi harga jual ikan</li> </ol>
84	Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa (0,21% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10%</li> <li>2. Proses pencairan masih belum terlaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran</li> <li>2. Proses pencairan masih mempertimbangkan skala prioritas</li> </ol>
85	Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (42,70% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim</li> <li>3. Belum optimalnya Penguatan Sumber Daya Manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan berfikir pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana penunjang</li> <li>2. Rendahnya motivasi</li> <li>3. Pelaksanaan Diklat masih terbatas</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas</li> <li>Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN</li> </ol>	
86	Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (13,02% pada tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya sarana penunjang</li> <li>Rendahnya motivasi</li> <li>Pelaksanaan Diklat masih terbatas</li> </ol>
87	Masih rendahnya jumlah pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kuota pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan</li> </ol>
88	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang potensial belum dilakukan secara optimal</li> <li>Belum tersusunya dokumen pendukung rencana Kelitbangan, diantaranya RIK dan <i>Road Map</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan maupun fungsi Kelitbangan belum optimal dan baru dilaksanakan pada tahun 2019</li> <li>Terbatasnya jumlah SDM pendukung pada bidang Kelitbangan</li> <li>Pelaksanaan kegiatan belum berbasis pada hasil kajian.</li> </ol>
89	Rendahnya persentase tindak lanjut temuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sikap kooperatif dari pihak auditor terkait tindak lanjut atas suatu temuan</li> <li>Sikap kooperatif antar auditor sulit untuk dibangun dikarenakan adanya mutasi pegawai secara cepat</li> </ol>
90	Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai PEMDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlunya penegakkan disiplin pegawai pemda</li> <li>Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN atau masih sedikit jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional maupun strukturnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penerapan reward and punishment atas tingkat kedisiplinan pegawai pemda</li> </ol>
91	Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyedia tidak mematuhi Aturan yang berlaku</li> <li>PPK, PPTK dan PHO kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya</li> <li>Konsultan Pengawas kurang cermat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan yang berlaku tidak dipatuhi</li> </ol>
92	Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Inspektorat</li> <li>Ketidakhahaman SKPD terkait dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya ketersediaan waktu dan anggaran untuk melakukan Evaluasi</li> <li>Kurangnya peningkatan kompetensi SDM Inspektorat</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	berkelanjutan	Implementasi SPIP	3. Kurangnya sosialisasi dan Bimtek bagi SKPD
93	SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP	1. SKPD belum bisa mengimplementasi dan Pemenuhan Administrasi AKIP	<b>Perencanaan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen</li><li>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD</li><li>- Indikator sebagian OPD belum SMART-C</li><li>- Belum adanya aplikasi terintegrasi antara perencanaan sampai dengan pelaporan.</li></ul> <b>Pengukuran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen</li><li>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD</li><li>- Sebagian besar data OPD masih bergantung pada data BPS (OPD tidak bisa menghitung sendiri baik untuk data makro maupun data sektoral)</li></ul> <b>Pelaporan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan kinerja OPD tidak ditunjang dengan bukti dukung berupa dokumen</li><li>- Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan OPD</li><li>- Keterlambatan pengumpulan pelaporan</li><li>- Hasil evaluasi SAKIP belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh OPD</li></ul>
94	Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP	1. SDM yang diberi tanggung jawab belum mematuhi tugas pokok dan fungsinya	1. Kemampuan SDM yang masih belum Optimal
95	Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online	1. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan PMPRB Online	1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait PMPRB Online kepada OPD





No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
96	Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM	1. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM	1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM

(Sumber

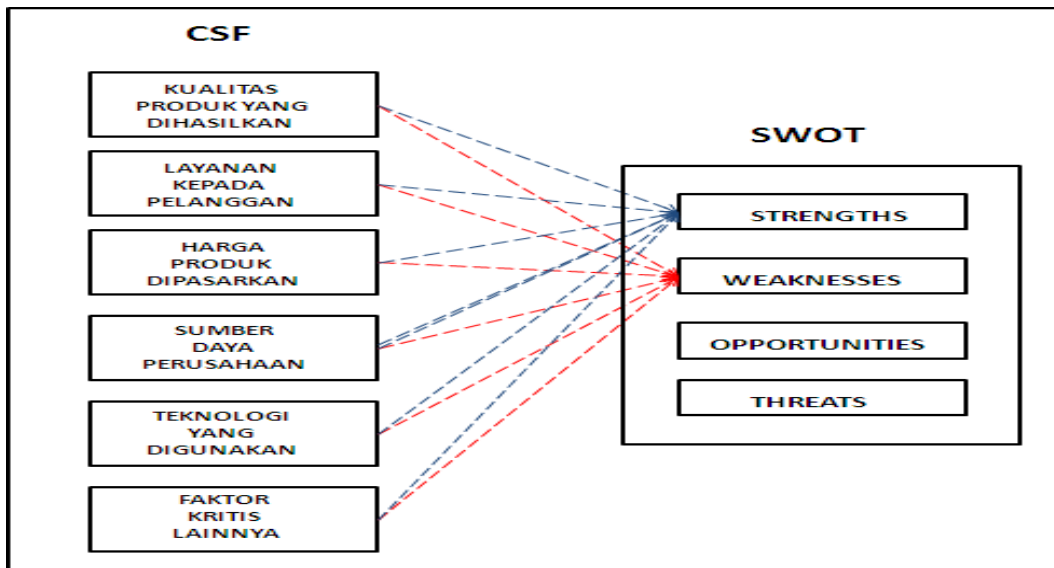
:

Diolah

Penyusun,

2021)

Untuk menentukan Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan, digunakan *Assessment of Critical Success Factors*” (CSF) adalah hal-hal yang harus berjalan dengan baik untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. CSF mewakili area manajerial yang harus mendapat perhatian khusus dan terus menerus agar menghasilkan kinerja yang tinggi. CSF mencakup isu-isu yang penting bagi aktivitas operasi organisasi saat ini dan kesuksesan masa depannya. Dari pengertian ini dapat difahami bahwa CSF adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk menjamin berbagai manajemen. Manajemen harus memberikan perhatian khusus agar organisasi mempunyai kinerja yang tinggi.



(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

**Gambar 4.1 Korelasi CSF dengan SWOT**

Jadi CSF mencakup isu-isu utama dari kegiatan perusahaan baik saat ini maupun diwaktu mendatang. Untuk mengidentifikasi semua jenis kemungkinan CSF dapat dilakukan pendekatan dengan memperhatikan apakah berkaitan dengan aspek industry (faktor apa yang harus dilakukan supaya tetap kompetitif), lingkungan (faktor lingkungan apa yang mempengaruhi organisasi), strategi (faktor strategi apa yang dipilih organisasi kompetitif), dan waktu (faktor internal organisasi) saat ini yang perlu diperhatikan). Beberapa penulis lainnya juga mengatakan bahwa CSF adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan atau merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan.

**Tabel 4. 2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Pangandaran**

No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
1	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi menurun,</li><li>2. Rendahnya produksi barang dan jasa di kabupaten Pangandaran,</li><li>3. Jumlah Investasi belum maksimal pada tahun 2019 baru mencapai Rp 475.010.357.987 tahun 2019</li><li>4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran,</li><li>5. Masih rendahnya pendapatan masyarakat,</li><li>6. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB <i>trend</i> pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya</li><li>7. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang didalam nya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran</li><li>8. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regulasi investasi yang mengatur mengenai izin perusahaan sehingga produksi barang dan jasa perusahaan masuk kedalam perhitungan PDRB Kabupaten</li><li>2. Penegakan regulasi izin usaha</li><li>3. Keterlibatan masyarakat dalam UMKM dan ekonomi kreatif</li><li>4. Inovasi di bidang pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian</li></ol>
2	Masih adanya laju Inflasi	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Karena kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi,</li><li>2. Munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin, memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran,</li><li>3. Uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stabilitas harga kebutuhan pokok</li><li>2. Optimalisasi tim pengendali inflasi daerah</li></ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
3	Masih rendahnya PDRB per kapita	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah.</li> <li>2. Masih rendahnya produksi dalam daerah</li> <li>3. Kurangnya produk daerah untuk ekspor</li> <li>4. Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemas (Sentra UMKM)</li> <li>5. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat</li> </ol>	
4	Indeks Gini	Sudah baik karena menunjukkan angka ketimpangan rendah [(>) Melampaui]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Share output</i> perekonomian</li> <li>2. Upah pegawai</li> </ol>
5	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Sudah baik karena $IW < 0,3$ yang berarti ketimpangan ekonomi wilayah rendah [(>) Melampaui]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2. Pertumbuhan Investasi</li> <li>3. Jumlah penduduk yang bekerja</li> </ol>
6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Sudah Baik karena persentase penduduk di atas garis kemiskinan sudah di atas 90% [(>) Melampaui]		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>5. Ketersediaan Lapangan Kerja</li> </ol>
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masuk dalam kategori sedang (68,21) berdasarkan data provinsi (72,03) [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan yang baik</li> <li>2. Ekonomi yang merata dan kesejahteraan social</li> <li>3. Pemerataan akses kesehatan</li> </ol>
8	Masih rendahnya Angka rata-rata lama sekolah	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya keinginan belajar dari masyarakat,</li> <li>2. minimnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi pentingnya melanjutkan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan kesetaraan</li> </ol>
9	Angka usia harapan hidup	71,12 tahun mendekati angka harapan hidup provinsi Jawa Barat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan perkapita yang layak</li> <li>2. Pendidikan yang merata</li> <li>3. Pengangguran yang terkendali</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
		72,85 tahun [(=)Sesuai]		
10	Masih adanya kasus balita gizi buruk	[(=)Sesuai]	1. Masih berfluktuasinya angka kecukupan protein 2. Kurangnya diversifikasi pangan	1. Kecukupan sumber pangan ibu dan anak
11	Masih adanya prevalensi balita gizi kurang	Melampaui (>) Target RPJMN	1. Cakupan pelayanan anak balita masih fluktuatif 2. Kurangnya sumber makanan bergizi Ibu	1. Kecukupan sumber pangan dan keragaman pangan 2. Pelayanan kesehatan balita yang memadai
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Sudah Baik [(=)Sesuai]		1. Pemberdayaan dan pembinaan desa yang merata dan berkelanjutan 2. Pendampingan pengelolaan administrasi desa yang mencapai target
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Sudah di atas TPAK Provinsi (65.07) [(>) Melampaui]		1. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia
14	Tingkat pengangguran terbuka	Sudah baik jika dibandingkan dengan provinsi di angka lebih dari 7% [(>) Melampaui]		1. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia 2. Angkatan kerja yang ditempatkan 3. Indeks Pembangunan Manusia
15	Rasio penduduk yang bekerja	Sudah baik [(=) Sesuai]	1. Kesempatan kerja masih belum memadai 2. Rasio penduduk yang bekerja asih fluktuatif dari tahun ke tahun 3. Belum optimalnya keahlian tenaga kerja dan penempatan kerja	1. Jumlah lapangan Pekerjaan 2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
16	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Berada pada level sedang [(=) Sesuai]		1. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat 2. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
17	Persentase PAD terhadap pendapatan	Belum Tercapai (<)	1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD, 2. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata, 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal 4. Beberapa sumber pajak dan retribusi belum memiliki perda	1. Regulasi terkait optimalisasi PAD 2. Penegakan regulasi terkait optimalisasi PAD



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
18	Opini BPK	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian laporan dengan SAP</li> <li>2. Kecukupan pengungkapan</li> <li>3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Efektivitas pengendalian intern</li> </ol>
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Sudah di atas Provinsi Jawa Barat 85% [(>) Melampaui]	1. Keragaman dan keseimbangan konsumsi masih dapat dioptimalkan	1. Keragaman dan keseimbangan konsumsi
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun tiap tahunnya</li> <li>2. Karena pertumbuhan disektor non pertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian,</li> <li>3. Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya.</li> </ol>	1. Inovasi bidang pertanian
21	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	[(=) Sesuai] Pengeluaran konsumsi rumah tangga berbanding lurus dengan peningkatan PDRB		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Perkapita yang sesuai</li> <li>2. Stabilitas harga yang terkendali</li> </ol>
22	Nilai Tukar Petani	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani</li> <li>2. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya peningkatan <i>life skills</i></li> <li>3. terhadap pelaku usaha dan UMKM</li> </ol>	1. Ketersediaan Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani
23	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Sudah Baik [(Sesuai)]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Pendapatan perkapita</li> </ol>
24	Rasio ketergantungan	Nilai rasio tidak jauh		1. <i>Total Fertility rate</i>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
		berbeda dengan Jawa Barat [(=) Sesuai]		2. Angka Kematian bayi yang rendah
25	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sudah jauh di atas Jawa Barat (11%) [(>) Melampaui]		1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah
26	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]	1. Rasio sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTS belum mengalami peningkatan secara signifikan 2. Motivasi sekolah rendah	1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah
27	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]	1. Rasio sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTS belum mengalami peningkatan secara signifikan 2. Motivasi sekolah rendah	1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah
28	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/Paket C	Kewenangan di provinsi	1. Jumlah guru yang menurun pertahunnya 2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal 3. Motivasi sekolah kurang	1. Jumlah guru 2. Biaya sekolah 3. Motivasi sekolah
29	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]	1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan 2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal 3. Motivasi sekolah kurang	1. Ketersediaan Sekolah 2. Motivasi sekolah 3. Ekonomi
30	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]	1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan 2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal 3. Motivasi sekolah kurang	1. Ketersediaan Sekolah 2. Motivasi sekolah 3. Ekonomi
31	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/Paket C	Kewenangan di provinsi	1. Jumlah sekolah yang cenderung menurun dan stagnan 2. Biaya lanjut sekolah yang dirasa masih mahal 3. Motivasi sekolah kurang	1. Ketersediaan Sekolah 2. Motivasi sekolah 3. Ekonomi
32	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]		1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
33	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Mendekati standar provinsi [(=) Sesuai]		1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah
34	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi [(>) Melampaui]		1. Pendapatan rumah tangga 2. Ketersediaan jumlah gedung sekolah 3. Jumlah guru 4. Motivasi sekolah
35	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	Sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi [(>) Melampaui]		1. Jumlah guru 2. Biaya sekolah 3. Motivasi sekolah
36	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/MA	Kewenangan di provinsi		1. Ketersediaan Sekolah 2. Motivasi sekolah 3. Ekonomi
37	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Ketersediaan Sekolah 2. Jumlah guru 3. Ekonomi
38	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Ketersediaan Sekolah 2. Jumlah Guru 3. Ekonomi
39	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Kewenangan di provinsi		1. Ketersediaan Sekolah 2. Jumlah guru 3. Ekonomi
40	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah guru 2. Biaya sekolah 3. Motivasi sekolah
41	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah guru 2. Biaya sekolah 3. Motivasi sekolah
42	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan





No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
43	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
44	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidid-kan dasar	Sudah baik [(=) Sesuai]	1. Jumlah sekolah mengalami penurunan	1. Jumlah ketersediaan sekolah
45	Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Kewenangan Provinsi		1. Jumlah ketersediaan sekolah
46	Masih rendahnya rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Sudah melampaui (>) rasio murid/guru yang mengajar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15:1, SD sederajat: 21:1, MI sederajat 15:1, SMP sederajat 20:1, MTS sederajat 1:1	1. Jumlah guru yang belum memadai 2. Persebaran guru yang belum merata	1. Jumlah guru 2. Pemerataan guru
47	Masih rendahnya Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Kewenangan Provinsi	1. Jumlah guru yang belum memadai 2. Persebaran guru yang belum merata	1. Jumlah guru 2. Pemerataan guru



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
48	Masih rendahnya rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Sudah melampaui (>) Rasio murid/guru yang mengajar pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, Sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15:1, SD sederajat: 21:1, MI sederajat 15:1, SMP sederajat 20:1, MTS sederajat 1:1		1. Jumlah Guru 2. Kompetensi guru
49	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah	Kewenangan Provinsi		1. Jumlah Guru 2. Kompetensi guru
50	Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Sesuai (=)	1. Motivasi melanjutkan sekolah masih kurang 2. Beasiswa guru masih belum merata	1. Motivasi melanjutkan sekolah yang tinggi 2. beasiswa guru yang merata
51	Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri & Swasta	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada
53	Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendidikan SMP/MTs Negeri Swasta	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada
54	Capaian Pangandaran Hebat Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Negeri Swasta	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
55	Ajengan Masuk Sekolah Jenjang SD	tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada
56	Ajengan Masuk Sekolah Jenjang SMP	tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada	Tidak bisa dianalisis karena tidak tersedia rumus dan acuan standarnya tidak ada
57	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Melampaui (>) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran telah melebihi target SDGs yakni 12 kematian per 1000 kelahiran hidup		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol>
58	Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Melampaui (>) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup kabupaten Pangandaran telah melampaui target SDGs yakni sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol>
59	Masih adanya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Melampaui (>) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran telah melampaui target SDGs yakni sebesar 25 kematian per 1000 kelahiran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM tenaga kesehatan sesuai rasio yakni 24 dokter spesialis, 96 dokter umum dan 11 dokter per 100.000 penduduk</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat</li> <li>3. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
60	Masih rendahnya rasio posyandu per seratus balita	Melampaui rasio Jawa Barat (>)		1. Jumlah posyandu memadai 2. Jumlah SDM kesehatan per seratus balita
61	Masih rendahnya rasio puskesmas per satuan penduduk	Melampaui rasio Jawa Barat (>)		1. Jumlah puskesmas memadai 2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk
62	Masih rendahnya rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Melampaui rasio Jawa Barat (>)		1. Jumlah puskesmas pembantu yang memadai 2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk
63	Masih rendahnya rasio poliklinik per satuan penduduk	Melampaui rasio Jawa Barat (>)		1. Jumlah poliklinik memadai 2. Jumlah SDM kesehatan per satuan penduduk
64	Masih rendahnya rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Belum Tercapai (<)	1. Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran masih kurang jika dibandingkan dengan standar penyediaan rumah sakit yakni 1 rumah sakit untuk 100.000 penduduk.	1. Ketersediaan rumah sakit sesuai dengan standar yakni 4 rumah sakit baru
65	Masih rendahnya rasio dokter per seratus ribu penduduk	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya dokter untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Ketersediaan dokter sesuai dengan standar baik itu dokter umum maupun dokter spesialis
66	Rasio bidan per seratus	Sudah diatas Provinsi berdasarkan data kementerian [(>) Melampaui]		1. Ketersediaan bidan 2. Pemerataan bidan pada wilayah-wilayah tertentu
67	Rasio perawat per seratus ribu penduduk	Sudah diatas Provinsi berdasarkan data kementerian [(>) Melampaui]		1. Ketersediaan perawat 2. Pemerataan jumlah perawat
68	Cakupan komplikasi	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	kebidanan yang ditangani			dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
69	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
70	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
71	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
72	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
73	<i>Non Polio AFP rate</i> per 100.000 penduduk	Tidak ada kasus/Sudah Baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
74	Masih adanya kasus cakupan balita pneumonia yang ditangani baru mencapai 34,39% pada tahun 2018, sedangkan di Jawa Barat sebesar 58,80% dan Nasional sebesar 56,61%.	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodir balita pneumonia, dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	1. Ketersediaan dokter



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
75	Masih adanya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis BTA, sedangkan target pada SPM kesehatan harus mencapai 100% dan target penanggulangan TBC nasional sampai dengan 2035 95%	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ol>
76	Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodir penanganan penderita prevalensi Tuberkulosis dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>3. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevelensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu di dukung oleh pemerintah tingkat daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ol>
77	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Sudah baik karena tergolong rendah [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ol>
78	Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, minimal capaian nasional 85%	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Pola hidup sehat</li> <li>3. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis</li> <li>4. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
79	Masih rendahnya Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>2. Perlu adanya obat-obatan yang memadai untuk penanganan tuberculosi hingga sembuh</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokter</li><li>2. Edukasi mengenai penanganan Tuberkulosis</li><li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan tuberkulosis</li></ol>
80	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokter</li><li>2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat</li></ol>
81	Masih tingginya kasus diare	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana rasio dokter Kab Pangandaran 10,78 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk</li><li>2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokter</li><li>2. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat</li></ol>
82	Angka kejadian Malaria	Tergolong rendah [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokter</li><li>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat</li><li>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria</li></ol>
83	Tingkat kematian akibat malaria	Tergolong rendah [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokter</li><li>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat</li><li>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria</li></ol>
84	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Sudah baik [(=) Sesuai]		



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
85	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokter</li> <li>2. Penerapan lingkungan bersih dan sehat</li> <li>3. Edukasi mengenai penanganan Malaria</li> </ol>
86	Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/ AIDS</li> <li>2. Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/ AIDS kurang optimal, walaupun hanya sebesar 0,27% Jawa Barat menjadi lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat , Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV / AIDS di tingkat Provinsi maupun Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS</li> </ol>
87	Cakupan kunjungan bayi	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
88	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
89	Cakupan pelayanan nifas	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
90	Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran untuk segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan</li> </ol>
91	Cakupan pelayanan anak balita	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>





No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan
92	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesadaran untuk langsung melakukan pendataan ke fasilitas kesehatan
93	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemerataan SDM Kesehatan
94	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
95	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Belum ada data karena rumah sakit baru di bangun		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
96	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	Belum ada data karena rumah sakit baru di bangun		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
97	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
98	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
99	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
100	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
101	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
102	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
103	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
104	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
105	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk
106	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
107	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
108	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
109	Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>2. Pemerataan tenaga medis dan dokter per satuan penduduk</li> </ol>
111	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan irigasi yang baik</li> <li>2. Pemerataan akses jalan dalam kondisi baik</li> </ol>
112	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik</li> </ol>
113	Persentase rumah tinggal bersanitasi belum optimal	Tidak dapat dianalisis, data tidak tersedia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah tinggal bersanitasi</li> <li>2. Warga yang sadar hunian sehat dengan sanitasi layak</li> </ol>
114	Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun	Belum Tercapai (<) Terdapat 19,11% daerah yang tergenang dari total daerah rawan genangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia gorong-gorong yang cukup untuk menampung air hujan pada beberapa titik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan drainase</li> </ol>
115	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik belum optimal	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan irigasi yang baik</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
116	Rasio Jaringan Irigasi belum optimal	Tidak dapat dianalisis, data tidak tersedia		1. Jaringan irigasi yang baik
117	Persentase penduduk berakses air minum belum optimal	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum 2. Tidak adanya data awal perhitungan	1. Ketersediaan SPAM perkotaan dan pedesaan
118	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah tempat ibadah yang memadai bagi setiap penduduk
119	Ketaatan terhadap RTRW	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Sosialisasi yang optimal kepada masyarakat 2. Penindakan terhadap pelanggaran yang dipertegas
120	Masih rendahnya cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemerataan Linmas 2. Meningkatkan efektivitas tugas Linmas
121	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat
122	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota belum optimal	Belum tercapai (<)	1. Belum tersedianya UPTD Damkar yang memadai (perlu UPTD untuk membawahi 2 kecamatan) 2. Jauhnya jangkauan jarak untuk memenuhi respon time	1. Ketersediaan UPTD Pemadam Kebakaran 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
123	Tingkat waktu tang- gap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum tercapai (<)	1. Sarana kebutuhan belum terpenuhi	1. Ketersediaan UPTD Pemadam Kebakaran 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
124	Persentase penegakan PERDA	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Ketegasan penindakan pelanggaran perda 2. Sinkronisasi antar lembaga terkait
125	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendataan yang optimal 2. Pemerataan bantuan sosial



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
126	Persentase PMKS yang tertangani	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemerataan penanganan PMKS 2. Optimalisasi penanganan PMKS
127	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendataan yang optimal 2. Pemerataan bantuan sosial
128	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial
129	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendataan yang optimal 2. Kesiapsiagaan instansi terkait
130	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendataan yang optimal 2. Peningkatan sarana dan prasarana evakuasi bencana
131	Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Belum Tercapai (<)	1. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1. Ketersediaan data yang akurat terkait dengan data penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
132	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial
133	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Meningkatnya indeks hubungan industrial
134	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2. pendataan pencari tenaga kerja



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
				3. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan
135	Keselamatan dan perlindungan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pemenuhan sarana-prasarana keselamatan kerja
136	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pengupahan yang layak 2. Kebijakan ketenagakerjaan yang jelas 3. Perlindungan dan keselamatan buruh
137	Besaran tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis masyarakat	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah pelatihan kerja
138	Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Belum Tercapai (<)	1. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan, 2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja	1. Ketersediaan balai latihan kerja 2. Pelatihan kewirausahaan
139	Masih rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3	Belum Tercapai (<)	1. Jarak yang jauh ke perguruan tinggi 2. Besarnya biaya pendidikan di perguruan tinggi	1. Mendorong pembukaan perguruan tinggi di Kabupaten Pangandaran 2. Beasiswa perguruan tinggi
141	Masih rendahnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Belum Tercapai (<)	1. 1. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja perempuan di bidang pemerintahan (8,45% tahun 2019)	1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender
142	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD belum mencapai minimal partisipasi 30%	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik	1. Partisipasi perempuan dalam politik
143	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Sudah cukup baik [(=) Sesuai]		1. Pemberdayaan perempuan 2. Pengarusutamaan gender
144	Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang men-dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Optimalisasi pendataan korban 2. Perlindungan korban kekerasan 3. Kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak 4. Jumlah petugas terlatih yang memadai



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
145	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pendataan korban</li> <li>2. Perlindungan korban kekerasan</li> <li>3. Kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak</li> <li>4. Jumlah petugas terlatih yang memadai</li> </ol>
146	Tidak adanya data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan Pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak terkait tidak continue melaporkan penegakan hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Data dan informasi mengenai penanganan hukum kurang optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>
147	Rasio APM perempuan /laki-laki di SD	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi sekolah</li> <li>2. Biaya sekolah</li> </ol>
148	Rasio APM perempuan /laki-laki di SMP	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi sekolah</li> <li>2. Biaya sekolah</li> </ol>
149	Rasio APM perempuan /laki-laki di SMA	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi sekolah</li> <li>2. Biaya sekolah</li> </ol>
150	Rasio APM perempuan /laki-laki di Perguruan Tinggi	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi sekolah</li> <li>2. Biaya sekolah</li> </ol>
151	Ketersediaan pangan utama	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lahan</li> <li>2. Biaya produksi</li> <li>3. Distribusi pangan</li> </ol>
152	Masih rendahnya Ketersediaan energi dan protein perkapita	Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan perkapita</li> <li>2. Diversifikasi pangan</li> </ol>
153	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</li> </ol>
154	Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan</li> <li>2. Masyarakat masih belum memiliki kelengkapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai pembuatan sertifikat hal milik lahan</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
			administrasi pertanahan	
155	Penyelesaian izin lokasi	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah pengawasan pemenuhan izin lokasi
156	Ketersediaan RPPLH Kabupaten/Kota	Belum Tercapai (<)	1. Belum disusunnya RPPLH	1. Ketersediaan RPPLH
157	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum Tercapai (<)	1. Belum disusunnya RPPLH	1. Ketersediaan RPPLH
158	Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah penyelenggaraan KLHS
159	Masih Rendahnya Indeks kualitas Air	Belum Tercapai (<)	1. Pengelolaan limbah masih rendah 2. Belum tersedia sarana laboratorium lingkungan	1. Pengelolaan limbah 2. Upaya restorasi 3. Sumber pencemar air 4. Ketersediaan sarana laboratorium lingkungan
160	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Keadaan iklim 2. Arah angin 3. Sumber pencemar udara 4. Keselarasan perencanaan daerah dengan RTRW
161	Masih kecilnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Kewenangan Provinsi		1. Pembukaan lahan 2. Kebakaran hutan/lahan 3. Penebangan liar 4. Rehabilitasi hutan
162	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pengawasan dan pembinaan terhadap komitmen izin pelaku usaha





No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
163	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Kepatuhan perusahaan atau pelaku usaha terhadap komitmen izin</li> </ol>
164	Masih minimnya timbulan sampah yang ditangani (sampah yang tertangani hingga pemrosesan akhir sebesar 2,5%)	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya tingkat penanganan terhadap timbulan sampah	1. Ketersediaan TPA, TPS3R dan sarana pengelolaan persampahan
165	Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (sampah yang tertangani melalui 3R 0,65%)	Belum Tercapai (<)	1. Terbatasnya sarana penghimpun dan pengolahan sampah setempat	1. Ketersediaan TPS3R
166	Persentase cakupan area pelayanan	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan minimal yang terpenuhi</li> <li>2. Pemerataan cakupan pelayanan</li> </ol>
167	Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Belum Tercapai (<)	1. Belum tersedianya TPA/TPST/SPA	1. Ketersediaan TPA
168	Masih rendahnya penduduk berKTP	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP</li> <li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan</li> </ol>
169	Masih rendahnya bayi berakta kelahiran	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran masih terbatas</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran</li> <li>2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
			administrasi kependudukan 3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan	administrasi kependudukan 3. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte kelahiran
170	Masih kurangnya pasangan berakta nikah	Belum Tercapai (<)	1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan	1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan 2. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte nikah
171	Kurangnya sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Sudah Baik (=)		1. sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 2. Pembangunan sarana dan prasarana
172	Kurangnya kelompok binaan PKK	Sudah Baik (=)		1. Jumlah petugas pembina PKK 2. Pendampingan dan pemberdayaan PKK
173	Persentase PKK aktif	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendampingan dan pemberdayaan PKK
174	Persentase Posyandu aktif	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah petugas pembina Posyandu 2. Pendampingan dan pemberdayaan Posyandu
175	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
176	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Sudah cukup baik [(=) Sesuai]		1. Monitoring evaluasi terhadap masyarakat pasca pemberdayaan
177	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang rendah	Sudah Baik [(=) Sesuai]		1. Sosialisasi mengenai KB
178	Masih rendahnya rata-rata jumlah anak per keluarga	Sudah Baik [(=) Sesuai]		1. Sosialisasi mengenai KB
179	Masih rendahnya Ratio Akseptor KB (15,2% pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan	1. Sosialisasi mengenai KB
180	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Sosialisasi mengenai KB



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	perempuan menikah usia 15 - 49			
181	Masih adanya kelahi-ran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (18,01% pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Masih adanya remaja perempuan usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan	1. Peningkatan akses pendidikan
182	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Sosialisasi mengenai KB
183	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Tergolong Tinggi [(=) Sesuai]		1. Jumlah angkutan umum
184	Rendahnya Jumlah uji KIR angkutan umum	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya pengujian KIR terhadap angkutan umum 2. Masih minimnya fasilitas uji KIR	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
185	Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis (3 jumlah terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah bandara)	Belum Tercapai (<)	1. Belum adanya izin operasional pelabuhan 2. Belum optimalnya operasional bandara 3. Minimnya kapasitas terminal angkutan darat	1. Izin operasional Pelabuhan 2. Optimalisasi bandara 3. Peningkatan kapasitas terminal angkutan darat
186	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Sudah cukup baik [(=) Sesuai]		1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
187	Kurangnya pemasangan rambu- rambu	Belum Tercapai (<)	1. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas	1. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas
188	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah angkutan umum
199	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ban-dara/terminal pertahun	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Peningkatan sarana dan prasarana dermaga/ban-dara/terminal 2. Peningkatan kapasitas dermaga/ban-dara/terminal
200	Kurangnya cakupan pengembangan dan	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	1. Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat

IV-47



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal	
201	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Belum Tercapai (<)	1. Masih terdapat blankspot	1. Penambahan BTS ( (Base Transceiver Station))
202	Rendahnya persentase koperasi aktif	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi, 2. Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil	1. Kaderisasi pengurus koperasi 2. Peningkatan kapasitas koperasi
203	Masih rendahnya kapasitas dan produktivitas Usaha mikro dan kecil	Belum Tercapai (<)	1. Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan 2. Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar 3. Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil 4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk 5. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan 6. Masih rendahnya pemberdayaan SDM usaha mikro dan kecil 7. Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro dan kecil	1. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil 2. Promosi produk usaha mikro dan kecil 3. Pemasaran produk usaha mikro dan kecil 4. Pelatihan kewirausahaan
204	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas UKM non BPR/LKM 2. Pendampingan UKM non BPR/LKM
205	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil 2. Promosi produk usaha mikro dan kecil 3. Pemasaran produk usaha mikro dan kecil 4. Pelatihan kewirausahaan
206	Minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) (2.124 investor pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya minat investor 2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	1. Ketersediaan RUPM 2. Regulasi investasi 3. Strategi promosi investasi
207	Minimnya Jumlah nilai investasi berskala nasional	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya realisasi nilai investasi 2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	1. Ketersediaan RUPM 2. Regulasi investasi



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	(PMDN/PMA) (349.898.121.679,00 tahun 2020)			3. Strategi promosi investasi
208	Minimnya Rasio daya serap tenaga kerja	Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia		1. Jumlah lapangan pekerjaan 2. Penempatan tenaga kerja 3. Pembinaan calon tenaga kerja
209	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Ketersediaan RUPM 2. Regulasi investasi 3. Strategi promosi investasi
210	Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak dapat dianalisis, karena data tidak tersedia		1. Ketersediaan fasilitas untuk mengembangkan minat bakat pemuda dan olahraga 2. Jumlah tenaga pelatih yang tersedia
211	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada Belum Tercapai (<)	1. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1. Sistem data dan statistik yang terintegrasi
212	Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap	Ada [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas SDM
213	Data dalam buku "PDRB" tidak lengkap	Ada [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas SDM
214	Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya	Belum Tercapai (<)	1. Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya 2. Terbatasnya SDM	1. Pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin 2. Promosi festival seni dan budaya
215	Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Belum Tercapai (<)	1. Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun	1. Kajian tentang penetapan cagar budaya
216	Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Belum Tercapai (<)	1. Rendahnya minat baca masyarakat	1. Sosialisasi gemar membaca 2. Ketersediaan perpustakaan digital
217	Perlunya peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Perlu peningkatan koleksi [(=) Sesuai]		1. Ketersediaan jumlah koleksi buku perpustakaan
218	Perlunya peningkatan rasio perpustakaan	Perlu peningkatan koleksi		1. Jumlah perpustakaan yang memadai



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	persatuan penduduk	[(=) Sesuai]		
219	Rendahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya SDM pustakawan	1. Ketersediaan SDM pustakawan
220	Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Belum Tercapai (<)	1. Belum optimalnya pengelolaan arsip	1. Optimalisasi pengelolaan arsip secara baku 2. SOP pengelolaan arsip
221	Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan arsip	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan arsip
222	Menurunnya kunjungan wisata	Belum Tercapai (<)	1. Kurangnya promosi pariwisata 2. Kurangnya <i>event</i> pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung 3. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal 4. Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai 5. Belum optimalnya lahan Parkir 6. Belum di Bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah 7. Belum optimalnya promosi daya tarik wisata 8. Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari 9. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata	1. Promosi pariwisata 2. <i>Event</i> pariwisata 3. Pengembangan kearifan lokal 4. Infrastruktur pendukung 5. Ekonomi kreatif
223	Rendahnya PAD sektor pariwisata	Belum Tercapai (<)	1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah PEMDA 2. Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal 3. Kebijakan/landasan hukum kepariwisataan dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap 4. Pemantauan dan pelaporan retribusi dan pajak wisata di objek	1. Sistem informasi pajak dan retribusi pariwisata



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
			wisata yang belum optimal 5. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau	
224	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Total produksi sektor pertanian/perkebunan 2. Luas lahan
225	Kontribusi sektor pertanian (palawija terhadap PDRB	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Total produksi sektor pertanian (palawija) 2. Luas lahan
226	Kontribusi sektor perkebunan (tana-man keras) terhadap PDRB	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Total produksi sektor perkebunan 2. Luas lahan
227	Kontribusi Produksi Kelompok petani terhadap PDRB	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Jumlah kelompok tani yang aktif 2. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani
228	Cakupan bina kelompok petani masih rendah	Belum Tercapai (<)	1. Perlunya intervensi pemda dalam peningkatan kapasitas kelompok petani	1. peningkatan kapasitas kelompok petani
229	Rendahnya Ekspor Bersih Perdagangan	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor 2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Peningkatan kapasitas UMKM
230	Produksi perikanan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan 2. Peningkatan kapasitas perikanan 3. Ketersediaan teknologi perikanan
231	Konsumsi ikan	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Pendapatan perkapita 2. Distribusi ikan
232	Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya SDM nelayan 2. Masih Rendahnya Armada Nelayan 3. Belum Optimalnya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan 4. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/ perikanan yang tinggi 5. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan	1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan 2. Peningkatan kapasitas armada nelayan 3. Ketersediaan teknologi perikanan



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
233	Produksi perikanan kelompok nelayan	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas armada nelayan</li> <li>3. Ketersediaan teknologi perikanan</li> </ol>
234	Nilai tukar nelayan	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan</li> <li>2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan dan</li> <li>3. belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif</li> <li>4. Perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai tukar nelayan</li> <li>2. Fasilitas pemasaran hasil perikanan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas nelayan</li> </ol>
235	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> <li>2. Bimtek penyusunan RPJPD bagi seluruh OPD</li> </ol>
236	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> <li>2. Bimtek penyusunan RPJMD bagi seluruh OPD</li> </ol>
237	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> <li>2. Bimtek penyusunan RKPDP bagi seluruh OPD</li> </ol>
238	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> </ol>
239	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> </ol>
240	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penyusun</li> </ol>
241	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Sudah baik [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan SAP</li> <li>2. Pengendalian intern</li> <li>3. Kepatuhan terhadap undang-undang</li> </ol>





No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
				4. Kompetensi sumberdaya manusia 5. Perencanaan pembangunan
242	Persentase SILPA	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan
243	Persentase SILPA terhadap APBD	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang
244	Persentase belanja pendidikan (20%)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang
245	Persentase belanja kesehatan (10%)	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang
246	Perbandingan antara Belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Sudah baik [(=) Sesuai]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang
247	Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	Belum Tercapai (<)	1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10%	1. Tim optimalisasi pendapatan daerah
248	Penetapan APBD	Sudah Baik [(Sesuai)]		1. Kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap undang-undang 2. Kesesuaian kapasitas anggaran daerah
249	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Sudah Baik [(=)Sesuai]		1. Pelatihan dan pendidikan terhadap pegawai
250	Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim</li> <li>Belum Optimalnya Penguatan Sumber Daya Manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan berfikir pariwisata</li> <li>Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas</li> <li>Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu</li> </ol>	1. Pendidikan pelatihan ASN baik daring maupun luring



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
			dimiliki oleh ASN	
251	Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional	1. Pendidikan pelatihan ASN baik daring maupun luring
252	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Sudah Baik [(=)Sesuai]		1. Pendidikan pelatihan ASN
253	Administrasi pada instansi pemerintah	Sudah Baik [(=)Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Kesesuaian terhadap undang-undang
254	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Sudah Baik [(=)Sesuai]		1. Pendidikan pelatihan ASN
255	Belum optimalnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	Belum Tercapai (<)	1. Perencanaan pembangunan belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan	1. Kajian kelitbangan 2. Implementasi kajian kelitbangan
256	Rendahnya persentase tindak lanjut temuan	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti	1. Tindak lanjut temuan
257	Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PEMDA	Belum Tercapai (<)	1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN	1. Profesionalisme ASN
258	Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana	Belum Tercapai (<)	1. Penyedia tidak mematuhi Aturan yang berlaku 2. PPK, PPTK dan PHO kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya 3. Konsultan Pengawas kurang cermat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya	1. UKPBJ untuk lebih selektif dalam menentukan pemenang terkait Pengadaan Barang dan Jasa 2. PA harus lebih cermat untuk >memilih PPK sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya 3. Melakukan Bimtek kepada PPK, PPTK dan PHO untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
259	Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara	Melampaui (>)	1. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Inspektorat 2. Ketidakhahaman SKPD terkait dengan Implementasi SPIP	1. Pengajuan tambahan pegawai pengawas internal kepada BKPSDM



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
	menyeluruh dan berkelanjutan			2. Bimtek dan Pendampingan dari BPKP 3. Melaksanakan Sosialisai dan Bimtek bagi SKPD
260	SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP	Melampaui (>)	SKPD belum bisa mengimplementasi dan Pemenuhan Administrasi AKIP	1. Adanya asistensi atau pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP 2. Melakukan monitoring SAKIP terhadap OPD 3. Pemberian reward and punishment kepada OPD yang terlambat melakukan pengumpulan laporan
261	Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkat-kan Nilai SAKIP	Melampaui (>)	SDM yang diberi tanggung jawab belum mematuhi tugas pokok dan fungsinya	1. Melakukan Studi Banding, Konsul- tasi dengan BPKP 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
262	Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online	Belum Tercapai (<)	Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan PMPRB Online	Sosialisasi kepada OPD secara optimal terkait PMPRB Online (melakukan asistensi, pendampingan, dll)
	Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM	Belum Tercapai (<)	Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM	Sosialisasi kepada OPD secara optimal terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM
263	Masih adanya temuan oleh BPK	Belum Tercapai (<)	4. Kurangnya auditor dari inspektorat 5. masih kurang sarana pendukung dalam pengawasan	4. Peningkatan kapasitas dan kuantitas auditor
264	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab /Kota	Ada [(=) Sesuai]		1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
265	Tersusun dan terintegrasinya program -program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada [(=) Sesuai]		1. Kegiatan koordinasi yang efektif 2. Penggunaan system terpadu 3. Peningkatan kualitas SDM



No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan
	Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			
266	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan	Ada [(=) Sesuai]		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan koordinasi yang efektif</li><li>2. Penggunaan system terpadu</li><li>3. Peningkatan kualitas SDM</li></ol>

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

## **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

### **4.2.1 Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi dan Daerah**

Isu nasional merupakan suatu hal yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang memberikan dampak terhadap kondisi nasional. Apabila tidak ditangani secara tepat, akan memberikan efek negative bagi negara. Isu nasional dapat dipengaruhi oleh isu dari negara lain maupun isu dalam negeri. Beberapa isu nasional pada RPJMD Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Ketahanan Ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pengembangan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur
6. Lingkungan Hidup
7. Stabilitas Polhukhankam

Selain isu Nasional, terdapat isu regional yang harus diselaraskan dengan isu strategis yang ada pada daerah. Isu Regional merupakan suatu hal yang terjadi di dalam daerah atau di luar daerah yang apabila tidak ditangani secara tepat akan memberikan dampak negative terhadap daerah tersebut. Beberapa isu regional pada RPJMD Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

**Tabel 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi**

Isu Strategis Nasional	Keterkaitan	Isu Strategis Provinsi
Ketahanan Ekonomi		Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial
Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Revolusi Mental Dan Pengembangan Kebudayaan		Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur		Reformasi Birokrasi
Lingkungan Hidup		
Stabilitas Polhukhankam		

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

**Tabel 4. 4 Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Kabupaten Pangandaran**

Isu Strategis Provinsi	Keterkaitan	Isu Strategis Kabupaten Pangandaran
Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)
		Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi
		Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)

Isu Strategis Provinsi	Keterkaitan	Isu Strategis Kabupaten Pangandaran
Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial		Menurunnya perekonomian nasional
		Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi
		Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman
Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah
		Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai
		Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan		Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi
		Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan		Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah
Reformasi Birokrasi		Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan
		Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan
		Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata
		Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah
		Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

#### 4.2.2 Hasil Penelaahan dan Rekomendasi KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi yang dimaksud dalam kajian tersebut telah dipertimbangkan. Penelaahan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil dan rekomendasi KLHS pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Jangkauan rumah tangga mendapatkan bantuan tunai masih belum mencapai target. Masih terdapat gap/ kekurangan sebesar 9,59 persen	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat /Program Keluarga Harapan.
	Masih perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial	
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Jangkauan pelayanan listrik untuk rumah tangga miskin masih belum tercapai. Masih adanya gap sebesar 27 persen	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Proporsi pelayanan untuk pendidikan. Kesehatan dan perlindungan sosial belum optimal. Masih terdapat gap sebesar 50,2 persen	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Belum tercapainya target untuk kualitas konsumsi pangan. Masih terdapat gap sebesar 5,3 persen	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
	LP2B belum by address. LP2B tidak boleh diganggu dan beralih fungsi.	
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Tidak terprediksinya selesainya masa covid	Akhir pandemi covid-19 masih belum diprediksi



<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Gap yang terjadi tidak terlalu signifikan namun perlu adanya peningkatan. Masih perlu ada upaya-upaya peningkatan fasilitas kesehatan untuk melahirkan. Rentang gap sebesar 2,62 persen	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Gap yang terjadi tidak terlalu signifikan namun perlu adanya peningkatan. Masih perlu ada upaya-upaya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan persebaran tenaga kesehatan yang lebih merata. Gap sebesar 1,58	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Masih adanya gap dengan target capaian yaitu sebesar 4,1 persen	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Gap capaiannya masih belum mencapai lama sekolah 9 tahun masih sampai hanya 7 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Belum optimalnya pelayanan pendampingan, konsultasi, pelaporan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Masih rendahnya layanan sumber air minum layak sumber PDAM masih terdapat gap 27,76 persen	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak. Masih terdapat gap 27,1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
	dari 3 desa baru 14 desa ODF	
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	Ada beberapa masih terjadi ketimpangan. Perlu adanya upaya-upaya untuk menurunkan ketimpangan terutama antara di pedesaan dan perkotaan	Koefisien Gini.
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan hunian layak huni di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ekoregion memiliki karakteristik tanah dinamis susut kembang dapat menyebabkan mudahnya keretakan bangunan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Peningkatan penanganan persampahan perkotaan sebesar 3,26 %. Dampak risiko dari adanya tekanan penduduk tidak terlalu signifikan tetapi risiko sampah muncul eksternal dengan adanya peningkatan wisatawan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	TES masih kurang berfungsi, banjir, peringatan dini, pemeliharaan fasilitas tanggap bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Tujuan 14		Jumlah nelayan yang terlindungi
Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Perlu adanya peningkatan persentase anak memiliki akta kelahiran.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Perlu adanya upaya peningkatan terhadap total pendapatan pemerintah terutama dari pariwisata yang belum optimal. Identifikasi sumber pendapatan lain yang dapat menjadi pendorong peningkatan pendapatan pemerintah.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
	Peternakan bisa menjadi salah satu sektor untuk pemulihan ekonomi nasional	

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

**Tabel 4. 6 Penjabaran Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Pangandaran**

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	1) Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme strategi destinasi berkelanjutan</li> <li>2. Penetapan strategi Organisasi Manajemen Destinasi</li> <li>3. Standar (SOP) sistem pengawasan, sistem pelaporan kepada publik, dan tanggap terhadap permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia.</li> <li>4. Strategi Pengelolaan Pariwisata Musiman</li> <li>5. Strategi pengembangan destinasi tahun jamak yang fokus serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, Kesehatan dan keselamatan yang mudah diakses</li> <li>6. Rencana atau strategi pengembangan destinasi bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum</li> </ol>
		2) Akhir pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi	Adaptasi kebiasaan baru pada berbagai bidang
		3) Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan berbasis SDGs</li> <li>2. Pengendalian pembangunan</li> </ol>
2	Nasional	1) Menurunnya perekonomian nasional	Pemulihan ekonomi nasional
		2) Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan regulasi</li> <li>2. Penegakan regulasi</li> <li>3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> </ol>
3	Daerah	1) Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SPAM perkotaan dan pedesaan</li> <li>2. Ketersediaan TPA</li> <li>3. Ketersediaan IPAL</li> </ol>
		2) Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan</li> <li>2. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>3. Penambahan trayek angkutan umum antar objek pariwisata</li> </ol>

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3) Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai	1. Ketersediaan kawasan perkantoran yang terintegrasi
		4) Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan	1. Regulasi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan daerah 2. Terpenuhinya SPM Pendidikan 3. Partisipasi pemuda dalam pembangunan
		5) Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi	1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar 2. Peningkatan kualitas infrastruktur 3. Akses menuju daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi
		6) Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten	1. Regulasi yang mengatur mengenai usaha pariwisata sehingga produksi barang dan jasa perusahaan masuk kedalam perhitungan PDRB Kabupaten 2. Pariwisata menjadi sektor basis terhadap sektor-sektor lainnya
		7) Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 2. Sistem informasi pajak dan retribusi pariwisata
		8) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan	Pelatihan peningkatan kapasitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan
		9) Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Ketersediaan Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani 2. Peningkatan nilai tukar dan produksi petani dan nelayan 3. Inovasi bidang pertanian dan perikanan
		10) Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata	1. Peraturan mengenai arsitektur ciri khas kabupaten 2. Diterapkannya ciri khas arsitektur kabupaten 3. Promosi pariwisata 4. Event pariwisata 5. Pengembangan kearifan lokal 6. Infrastruktur pendukung 7. Ekonomi kreatif 8. Pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin
		11) Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah	1. Implementasi reformasi birokrasi 2. Keterlibatan multi sektor dalam pembangunan daerah 3. Penguatan pengendalian pembangunan daerah
		12) Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial	Jaminan perlindungan sosial

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)

## 2. Pembobotan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-

masing isu di bobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
<b>Total</b>		<b>100</b>

(Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Dengan menggunakan bobot skor yang telah ditentukan pada tabel di atas, kemudian dilakukan penilaian dengan memberikan skor pada setiap isu strategis. Penilaian diberikan pada rentang skor 1-5, dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju dengan kriteria. Pemberian skor pada isu strategis hasil identifikasi dilakukan melalui pengisian kuesioner yang diisi oleh perwakilan dari perangkat daerah yang menunjukkan perwakilan setiap urusan. Rata-rata skor isu strategis hasil dari pengisian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.8 Skor Kriteria Rata-rata**

No	Isu Strategis	Skor Kriteria Rata-Rata				
		1	2	3	4	5
1	Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council (GSTC-D)</i>	4.222	3.944	4.056	4.556	3.389
2	Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi	4.722	3.667	4.5	4.056	3.222
3	Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	4.556	4.111	4.222	4.444	3.556
4	Menurunnya perekonomian nasional	4.778	3.833	4.5	4.389	3.5
5	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi	4.500	4.056	4.444	4.222	3.444
6	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	4.389	4.167	4.444	4.333	3.667
7	Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah	4.722	4.278	4.611	4.833	3.778
8	Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai	4.167	4.167	4.000	4.111	3.722
9	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan	4.333	4.278	4.667	4.722	3.889
10	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi	4.667	4.333	4.611	4.611	4.056
11	Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten	4.556	4.5	4.5	4.722	3.889
12	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	4.444	4.167	4.222	4.444	3.667
13	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan	4.444	4.333	4.611	4.500	4.000
14	Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan	4.5	4.389	4.389	4.278	4.056
15	Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata	4.222	4.444	4.222	4.278	3.889
16	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah	4.500	4.611	4.222	4.333	3.944
17	Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial	4.500	4.333	4.444	4.444	3.889

(Sumber : Diolah penyusun, 2021)

Rata-rata skor yang didapatkan berdasarkan pengisian kuesioner kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria sesuai dengan ketentuan bobot yang sebelumnya telah dijelaskan. Hasil perkalian skor dengan bobot menghasilkan nilai dari masing-masing isu yang menunjukkan tingkat urgensi dari isu tersebut. Berikut dapat dilihat tabel hasil perkalian skor terhadap bobot masing-masing kriteria.

**Tabel 4. 9 Hasil Pembobotan Skor**

No	Isu Strategis	Skor X Bobot					Jumlah Nilai
		1	2	3	4	5	
1	Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC-D)	1.056	0.592	1.014	0.683	0.678	4.022
2	Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi	1.181	0.550	1.125	0.608	0.644	4.108
3	Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1.139	0.617	1.056	0.667	0.711	4.189
4	Menurunnya perekonomian nasional	1.195	0.575	1.125	0.658	0.700	4.253
5	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi	1.125	0.608	1.111	0.633	0.689	4.167
6	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	1.097	0.625	1.111	0.650	0.733	4.217
7	Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah	1.181	0.642	1.153	0.725	0.756	4.456
8	Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai	1.042	0.625	1.000	0.617	0.744	4.028
9	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan	1.083	0.642	1.167	0.708	0.778	4.378
10	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan peresaan dalam mendukung pengembangan ekonomi	1.167	0.650	1.153	0.692	0.811	4.472
11	Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten	1.139	0.675	1.125	0.708	0.778	4.425
12	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	1.111	0.625	1.056	0.667	0.733	4.192
13	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing AUMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan	1.111	0.650	1.153	0.675	0.800	4.389
14	Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan	1.125	0.658	1.097	0.642	0.811	4.334
15	Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata	1.056	0.667	1.056	0.642	0.778	4.197
16	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah	1.125	0.692	1.056	0.650	0.789	4.311
17	Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial	1.125	0.650	1.111	0.667	0.778	4.330

(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

Hasil perkalian skor dengan bobot menjadi nilai dari setiap isu yang menunjukkan urgensi dari isu tersebut. Dengan demikian isu dengan nilai tertinggi merupakan isu yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya. Berikut tabel urutan urgensi isu strategis berdasarkan nilai masing-masing isu.

**Tabel 4. 10 Urutan Isu Strategis berdasarkan Urgensi**

<b>Urutan Urgensi Isu</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Nilai</b>
1	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi	4.472
2	Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah	4.456
3	Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten	4.425
4	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan	4.389
5	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan	4.378
6	Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan	4.333
7	Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial	4.331
8	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah	4.311
9	Menurunnya perekonomian nasional	4.253
10	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	4.217
11	Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata	4.197
12	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	4.192
13	Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)	4.189
14	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi	4.167
15	Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi	4.108
16	Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai	4.028
17	Belum optimalnya pemenuhan kriteria <i>Global Sustainable Tourism Council (GSTC-D)</i>	4.022

(Sumber : Diolah Penyusun, 2021)



*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

2021-2026

# BAB V

---

VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini disajikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Rumusan visi dan misi dalam dokumen RPJMD ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, SH, M. Hum. Sesuai pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan Janji Politik yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan memperhatikan terkait permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran. Penjelasan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa langkah strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pangandaran.

#### **5.1 Visi**

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan

dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”***

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran**

<b>Visi</b>	<b>Pokok – Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai ( <i>value</i> ) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

## 5.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan

Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026**

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal

(Sumber: Diolah penulis, 2021)

Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

### **1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama**

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar

bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

## **2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan**

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

## **3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan**

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

#### **4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal**

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

#### **5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel**

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

#### **6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan**

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai

pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Hasil telaah kesesuaian dengan visi misi kepala daerah yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya visi misi tersebut diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Perumusan tujuan menjadi salah satu tahapan yang dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang terdapat titik kritis (*critical point*) pada penyusunan RPJMD.

Pentingnya pada tahap ini dikarenakan apabila penjabaran visi misi kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dalam tujuan-tujuannya, maka akan berpengaruh pada sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini, rumusan dari tujuan-tujuan merupakan turunan yang lebih operasional dari pada misi pembangunan daerah, serta menggambarkan kondisi yang akan dicapai dan sebagai pendukung dalam pencapaian misi daerah. Tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan paradigma dari penganggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu ditekankan pada target kinerja yang meliputi hasil akhir (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun



kegiatan. Pelaksanaan perumusan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya perumusan tujuan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka rencana strategis perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026:

1. Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur yang tangguh bencana

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kependidikan Dan Kesehatan Secara Komprehensif

5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
6. Melambatnya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
9. Meningkatnya Permukiman Layak Huni
10. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja
11. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
12. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif
14. Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Daerah
15. Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah
16. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas maka, perlu menjabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran tersebut ke dalam beberapa indikator dan perangkat daerah yang akan mengampu tujuan dan sasaran tersebut. Berikut ini akan dilampirkan *cascading* kinerja (visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja)

**Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran 2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal		Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
			Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048
				Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770
2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal		Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata	N/A	20	30	40	50	60	60
			Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000
3	Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
				Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48
				Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24
			Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	N/A	5	7,5	10	12,5	15	15
			Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,76%	0,74%	0,73%	0,72%	0,71%	0,71%	0,71%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	
					2020	2022	2023	2024	2025	2026		
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61	
4	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50	
				Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,33	6,75	6,17	5,58	5,00	5,00	
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520	
				Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38	
				Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50	
				Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5	
				Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	73	74	74	74	74	75	75
				Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50
	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77			
5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A	
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82	
				Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	
				Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	
				Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06-3,15
6	Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84
			Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865
				Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64
			Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135
				Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	66,43

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Perumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD merupakan salah satu tahapan yang penting. Karena tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari misi-misi pembangunan daerah. Tujuan juga perlu menggambarkan kondisi ideal yang akan dicapai dalam misi daerah. Sedangkan sasaran perlu mendukung serta menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan dijadikan sebuah landasan bagi perangkat daerah dalam menyusun berbagai program, kegiatan dan indikator secara menyeluruh lima tahun ke depan.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada RPJMD, maka perlu adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan sasaran RPJMD yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 5.4 Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih**

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
1.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program penguatan kehidupan kerukunan beragama</li><li>- Peningkatan sarana keagamaan</li><li>- Menyelenggarakan Gerakan Maghrib ke masjid</li><li>- Mengembangkan dan memperkuat Pendidikan keagamaan (RA/Madrasah dan TPQ)</li><li>- Bantuan Pesantren</li></ul>
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat</li><li>- Penguatan LPM</li><li>- Mendorong Bumdes Juara</li><li>- Kenaikan insentif perangkat desa, RT, RW, Linmas, BPD</li></ul>
3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beasiswa untuk santri yang berprestasi</li><li>- Peningkatan insentif guru honor</li><li>- Ajengan Masuk Sekolah Plus</li><li>- Melanjutkan serta meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan gratis</li><li>- Memperluas beasiswa sampai perguruan tinggi</li><li>- Melanjutkan Pendidikan gratis</li><li>- Penguatan sistem Kesehatan daerah melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru</li><li>- Penyelenggaraan layanan kesehatan dasar gratis</li></ul>

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu sehat untuk lansia</li> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan berbasis pariwisata</li> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan gratis dan beasiswa untuk lulusan SMA/SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi</li> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan karakter</li> <li>- Beasiswa bagi tenaga pendidik</li> </ul>
4.	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sport center</li> <li>- Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan minat dan bakat pemuda</li> </ul>
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan petani melalui intervensi pupuk/pakan, bibit, teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, dan penciptaan pasar</li> <li>- Mempermudah investasi, mulai dari perizinan dan lainnya</li> <li>- Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil</li> <li>- Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru</li> <li>- Pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan</li> <li>- Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan era industry 4.0 bagi Angkatan kerja</li> <li>- Membuat toko Pangandaran Juara</li> <li>- Tambahan untuk subsidi pupuk</li> <li>- Penajaman PKH</li> <li>- Percepatan pengentasan kemiskinan</li> <li>- Memperluas kepesertaan BPJS dan Kartu Kertawaluya serta memberikan asuransi jiwa bagi penderes kelapa, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat mempunyai risiko tinggi</li> <li>- Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif</li> <li>- Gerakan kelapa hibrida</li> <li>- Mendorong BUMD sehat dan Bumdes juara</li> <li>- Revitalisasi pasar tradisional</li> <li>- Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil</li> </ul>
6.	Meningkatnya permukiman layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedah rumah tiap tahun</li> <li>- Pangandaran bebas rumah tak layak huni</li> <li>- Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil</li> </ul>
7.	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi</li> <li>- Pelatihan calon CPNS asal Pangandaran</li> </ul>
8.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik</li> <li>- Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar PD</li> </ul>
9.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi sistem terintegrasi</li> </ul>
10.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbangan masuk pangandaran</li> </ul>

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB VI

---

STRATEGI,  
ARAH KEBIJAKAN  
DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada periode 2021-2026.

#### **6.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi sebagai upaya pencapaian visi dan misi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan teknik perencanaan untuk mengetahui strategi yang tepat berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yang dilakukan untuk menghasilkan strategi disajikan dalam bentuk matriks daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta persilangan diantaranya yang kemudian menjadi strategi pembangunan.

Faktor analisis ini dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) sedangkan faktor eksternal terdiri dari *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman). Daftar yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Analisis SWOT dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran**

No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy			
1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	1. Jumlah kejadian konflik yang cenderung rendah pada tahun 2016-2020	1. Meningkatkan jumlah penyelesaian konflik dan K3	1. Menurunnya jumlah cakupan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan	1. Optimalisasi pendataan dan kemampuan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	1. Meningkatkan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1. Menurunnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan negara	1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan negara melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1. Masih kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dan penyelenggaraan ketertiban, keamanan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban dan keamanan melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan optimalisasi Linmas dalam masyarakat			
		2. Menurunnya jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	2. Optimalisasi peran Linmas di Masyarakat guna meminimalisir pelanggaran K3	2. Menurunnya jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan negara	2. Optimalisasi pengelolaan wawasan kebangsaan							2. Meningkatkan Pembinaan kerukunan antar suku	2. Menurunnya ketertiban dan ketertaman Umum serta perlindungan masyarakat	2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
		3. Penurunan K3 yang terselesaikan		3. Belum optimalnya pengelolaan wawasan kebangsaan	3. Optimalisasi peran dan jumlah Linmas di Kabupaten/Kota							3. Meningkatkan pengembangan demokrasi berdasar pancasila		
				4. Masih fluktuatifnya jumlah Linmas di Kabupaten/Kota tahun 2016-2020								4. Meningkatkan Peran dan jumlah Linmas di Kabupaten/Kota		
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Meningkatnya jumlah desa kategori swasembada tahun 2019-2020	1. Meningkatkan jumlah desa kategori swasembada	1. Belum terdapatnya klasifikasi kategori dari desa swasembada	1. Pembuatan klasifikasi kategori dari desa swasembada	1. Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Terhambatnya kemandirian desa	1. Meningkatkan kemandirian desa	1. Perlu peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung			



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
		2. Meningkatnya lembaga ekonomi desa yang aktif tahun 2017-2020	2. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa	2. Tidak terdapat peningkatan jumlah PKK aktif	2. Meningkatkan jumlah PKK yang aktif	2. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi desa yang berdaya		2. Penurunan kualitas pembangunan desa	2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa	dalam mendukung pengembangan ekonomi	pengembangan ekonomi
		3. Meningkatkan persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik tahun 2016-2020	3. Meningkatkan kualitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa			3. Meningkatnya peran dan kualitas pembangunan desa					
3	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	1. Tingginya persentase kelompok budaya aktif pada tahun 2020	1. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelompok budaya aktif	1. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesenian	1. Meningkatkan kuantitas SDM kesenian	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal	1. Menurunnya kualitas SDM kesenian yang terdampak Covid-19	1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan setiap SDM kesenian secara online dengan seminar online dan pameran online	1. Belum optimalnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku kesenian melalui optimalisasi cagar budaya dan peningkatan pembinaan serta pelatihan setiap SDM kesenian
				2. Kurangnya karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi	2. Meningkatkan karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi			2. Kurang optimalnya dinas teknis dalam pengelolaan cagar budaya	2. Menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi dari Covid-19	2. Menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi dari Covid-19	
				3. Belum optimalnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3. Meningkatkan pendataan kelompok budaya aktif						
				4. Kurangnya pendataan kelompok budaya aktif	4. Meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu						

No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
4	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang direncanakan atau tidak direncanakan	1. Mengoptimalkan potensi daerah sektor pariwisata daerah dengan melakukan promosi pariwisata	1. Tidak adanya peningkatan jumlah destinasi wisata daerah dari tahun 2016 - 2020	1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata daerah 2. Mengembangkan citra obyek pariwisata	1. Meningkatnya PAD sektor pariwisata Kab. Pangandaran	1. Optimalisasi pengelolaan retribusi obyek wisata	1. Menurunnya jumlah wisatawan akibat Covid-19	1. Kembali melakukan promosi pariwisata dengan meningkatkan jumlah destinasi pariwisata	Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata guna menciptakan perekonomian inklusif
5	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli bidang kesehatan	1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat	1. Kurangnya dokter spesialis	1. Penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui sosialisasi advokasi dan capacity building.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan yang diterima oleh masyarakat	1. Meningkatkan jaminan pelayanan masyarakat	1. kurang optimalnya pelayanan kesehatan	Memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat	1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan tindakan tenaga ahli kesehatan
		2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat atau melahirkan di RS/Tenaga Kesehatan Terlatih	2. Mencegah dan melindungi masyarakat dari masalah kesehatan;	2. Tingginya angka kesakitan diare	2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebersihan dan gizi seimbang	2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga ahli kesehatan	2. Memberikan edukasi bahwa Kab. Pangandaran mempunyai tenaga Kesehatan yang memadai	2. kurang optimalnya edukasi kesehatan dan kebersihan lingkungan		2. Rasio balita per satuan posyandu menurun	2. Meningkatkan jumlah posyandu dan pelaksanaan edukasi pentingnya vaksin balita
		3. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke tempat layanan kesehatan yang seharusnya	3. Tingginya angka gizi buruk							

No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
6	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	1. Meningkatnya jumlah klub olahraga pada tahun 2020 menjadi 146 klub 2. Meningkatnya jumlah gedung olahraga dari 2018-2019 3. Melimpahnya sumber daya manusia usia produktif	1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana penunjang minat bakat dalam bidang keolahragaan maupun dalam bidang lain	1. Masih dominannya penduduk dengan tingkat pendidikan SD	1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata daerah 2. Meningkatkan akses pendidikan 3. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan	Terfasilitasinya minat bakat masyarakat	Meningkatkan prestasi dan minat bakat masyarakat terhadap bidang keolahragaan	Jumlah peraih prestasi stagnan atau menurun akibat kurangnya sumberdaya manusia yang potensial	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang minat bakat dalam bidang keolahragaan maupun dalam bidang lain 2. Optimalisasi pembinaan dan pelatihan sumberdaya potensial	1. Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan	1. Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan
7	Menurunkan laju partum buhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan program KB	1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program keluarga berencana 2. Masih rendahnya prevalensi peserta KB aktif 3. Belum optimalnya rasio petugas lapangan KB/PKB	1. Meningkatkan sosialisasi program KB 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan KB	Optimalnya program KB	1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya program KB 2. Meningkatkan petugas lapangan program KB	1. Tidak optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) 2. Pemahaman masyarakat mengenai KB masih rendah	Meningkatkan angka prevalensi peserta KB aktif melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas lapangan program KB
8	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan HLS dan RLS bagi kalangan perempuan	1. Masih kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan	1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan	Meningkatnya IPM Perempuan	Meningkatkan kesejahteraan perempuan	Masih adanya pemahaman masyarakat terkait ketidaksetaraan gender	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender	1. Masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan	Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dengan memberikan edukasi keterampilan

No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
				2. Kurang optimalnya Indeks Pemberdayaan Gender	2. Mengoptimalkan ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 3. Mengurangi praktik-praktik diskriminasi gender di lapangan pekerjaan					2. Kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah	
9	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatkan produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2016 - 2020 2. Meningkatkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2016 - 2020 3. Meningkatkan Transportasi dan Pergudangan 2016 - 2020	1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan petani 3. Optimalisasi kebijakan kemudahan dalam ber usaha	1. Menurun nya presentase koperasi aktif 2. Menurun nya presentase KSP/USP yang naik klasifikasi 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian	1. Meningkatkan infrastruktur penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Optimalisasi pengawasan koperasi 3. Pemerataan akses wisata	1. Optimalisasi peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional	1. Menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya	1. Menurun nya ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat 2. Menurunnya PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3. Menurun nya pendapatan dari sektor pariwisata	1. Meningkatkan ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat 2. Meningkatkan akses dan infrastruktur produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3. Pemerataan akses infrastruktur pariwisata	1. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah 2. Akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim 3. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi	1. Meningkatkan akses penunjang perekonomian melalui penyediaan modal koperasi/UMKM, sarana prasarana teknologi dan pemasaran, promosi investasi, dan peningkatan serapan tenaga kerja



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
		4. Meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun	4. Meningkatkan kualitas perizinan	4. Belum optimalnya infrastruktur penunjang produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4. Optimalisasi pelatihan usaha bagi usaha baru			4. Menurunnya pendapatan dari sektor usaha	4. Meningkatkan keberagaman usaha dan usaha naik kelas	4. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal	
		5. Meningkatkan jumlah destinasi wisata dari tahun	5. Meningkatkan kepastian hukum untuk investor		5. Menentukan standarisasi produk usaha					5. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil	
		6. Meningkatkan jumlah restoran dan hotel dari tahun	6. Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal		6. Optimalisasi informasi untuk investor mengenai OSS					6. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata	
					7. Meningkatkan akses pemasaran produk lokal					7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata	
										8. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha	
										9. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada	

VI-7



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
										perusahaan/kegiatan PMA/PMDN	
10	Meningkatnya permukiman layak huni	1. Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik sebesar 104 pada tahun 2020	1. Meningkatkan pemeliharaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik 2. Meningkatkan pengembangan kawasan permukiman layak huni	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi sangat minim	1. Meningkatkan sanitasi pada rumah tinggal melalui kegiatan kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU permukiman 2. Meningkatkan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1. Meningkatnya permukiman layak huni	1. Mewujudkan permukiman layak huni bagi masyarakat	1. Meningkatnya kawasan kumuh	1. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak	1. Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	1. Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas permukiman
11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	1. Menurunnya angka pengangguran pada tahun 2017-2019 2. Meningkatnya lapangan pekerjaan mulai tahun 2017-2020	1. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja 2. Maksimalisasi acara <i>job fair</i>	1. Masih fluktuatifnya rasio penduduk yang bekerja 2. Menurunnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	1. Meningkatkan kualitas masyarakat siap kerja 2. Meningkatkan lapangan pekerjaan 3. Optimalisasi infrastruktur pelatihan tenaga kerja	1. Menurunnya jumlah pengangguran di Kab. Pangandaran 2. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan pengangguran pada usia kerja akibat kurangnya jumlah lapangan pekerjaan 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Meningkatkan kuantitas lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1. Masih kurangnya kuantitas lapangan kerja 2. Masih kurangnya kapabilitas calon tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kuantitas lapangan pekerjaan serta sarana, prasarana penunjang
12	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	1. Meningkatnya jumlah PPKS penerima bansos tahun 2019-2020	1. Meningkatkan bantuan dan perlindungan sosial terhadap PPKS	1. Masih fluktuatifnya jumlah PPKS yang tertangani	1. Optimalisasi peran PSKS	1. Meningkatnya kesejahteraan PPKS	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS	1. Rendahnya kesejahteraan PPKS	1. Meningkatkan bantuan dan penanganan terhadap PPKS	1. Perlunya peningkatan sistem perlindungan dan	1. Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
			2. Meningkatkan bantuan pangan non tunai							kesejahteraan sosial	sosial
13	Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) sebagai lembaga kearsipan daerah (LD)	1. meningkat nya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola kearsipan	1. Peningkatan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola kearsipan	1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip tidak mengalami kenaikan yaitu stagnan di angka 18% setiap tahunnya	1. Meningkatkan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah melalui pelatihan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan	1. Meningkatkan pemahaman tata kelola kearsipan di perangkat daerah	1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah	1. Masih terbatasnya jumlah pengelola arsip perangkat daerah	1. Optimalisasi pengelolaan arsip di perangkat daerah	1. Belum optimal nya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah	1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan kearsipan
14	Meningkatkan kualitas dan Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Survey kepuasan masyarakat berpredikat baik	1. Optimalisasi kualitas layanan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan	1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Kurangnya sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi serta implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Peningkatan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	1. Meningkatnya masyarakat yang terlayani dengan baik 2. Meningkatnya mutu tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan naiknya predikat indeks kepuasan masyarakat 2. Peningkatan mutu tata kelola pemerintahan	1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan secara efektif	1. Peningkatan efektivitas Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah 2. Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai	1. Pembangunan mall pelayanan publik 2. Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan
15	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	1. Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	1. Meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat	1. Menurunnya Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	1. Meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat	1. Meningkatnya masyarakat yang telah terdata dalam kependudukan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat	1. Tidak optimalnya proses pembangunan di desa	1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa	1. Belum optimalnya pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis sistem



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
		2.Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	2.Meningkatkan proses validasi database kependudukan	2.Masih rendahnya Cakupan Perekaman KTP Elektronik	2.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru	2.Terjaminannya identitas dan pelayanan publik untuk masyarakat	2.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD	2.Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD	2.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru	2.Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap database kependudukan	informasi dan peningkatan pembinaan serta pelatihan SDM aparatur desa dengan optimalisasi reses DPRD
		3.Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	3.Meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi database kependudukan	3.Masih rendahnya Penduduk yang memiliki KK	3.Meningkatkan pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa	3.Meningkatnya pembangunan di desa		3.Kurang optimalnya pendataan dokumen kependudukan	3.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD	3.Belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi database kependudukan	
		4. Meningkatkan Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian									
		5.Meningkatnya Persentase validasi database kependudukan	4.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD	4.Rendahnya proses validasi database kependudukan	4.Optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari DPRD						
			5.Meningkatkan kualitas pendataan kepada keluarga baru	5.Rendahnya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	5.Meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi database kependudukan						
16	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	1.Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	1.Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sarana prasarana perhubungan	1.Belum optimalnya jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk peningkatan budidaya pertanian	1.Meningkatkan jaringan irigasi penunjang produksi pertanian	1.Meningkatnya mobilitas perekonomian masyarakat	1.Mewujudkan permukiman layak huni bagi masyarakat	1.Menurunnya jumlah produksi pertanian	1.Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan	1.Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan	1. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah melalui peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, pemenuhan kualitas permukiman layak huni, dan peningkatan kualitas sarana prasarana
		2.Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi mantap	2.Meningkatkan pengembangan kawasan lingkungan layak huni	2.Masih kurangnya luas lahan budidaya pertanian	2.Meningkatkan kualitas permukiman layak huni	2.Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat	2.Meningkatkan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat	2.Tidak optimalnya infrastruktur jalan	2.Meningkatkan kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan	2.Masih minimnya perumahan dan permukiman yang berkelanjutan	



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
											perhubungan
		3.Meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik	3.Meningkatkan jumlah trayek angkutan umum yang saling terintegrasi	3.Masih kurangnya jumlah tempat ibadah	3.Meningkatkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	3.Meningkatnya layanan angkutan umum yang terintegrasi	3.Meningkatkan layanan sarana prasarana perhubungan	3.Meningkatnya kawasan kumuh	3.Mewujudkan sistem drainase yang terpadu	3.Masih kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung lintas sektor	
		4.Meningkatnya luas saluran irigasi		4.Masih rendahnya pendataan terhadap jumlah jembatan yang terbangun	4.Meningkatkan kualitas pemeliharaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana perhubungan	4.Meningkatnya penduduk yang memiliki akses air minum	4.Meningkatkan kemudahan mobilitas perekonomian masyarakat	4.Meningkatnya kejadian laka lantas	4.Pembangunan embung untuk irigasi pertanian		



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
		5. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air minum		5. Masih rendahnya persentase rumah tinggal ber sanitasi		5. Optimalnya layanan perhubungan bagi masyarakat					
17	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	1. Meningkatnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana	1. Optimalisasi desa/kelurahan tangguh bencana yang ada	1. Menurunnya persentase desa/kelurahan yang memperoleh informasi peringatan dini bencana	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatnya penduduk yang mendapatkan pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah kerugian materi atau kejadian bencana	1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana	1. Masih minimnya desa/kelurahan tangguh bencana	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana dengan membentuk dan meningkatkan pelatihan serta pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana
		2. Meningkatnya persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan	2. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	2. Masih rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana	2. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana	2. Meningkatkan desa/kelurahan tangguh bencana	2. Optimalisasi desa/kelurahan tangguh bencana yang ada	2. Rendahnya pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	2. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan informasi peringatan dini bencana		
		3. Tingginya jangkauan luas WMK	3. Optimalisasi wilayah manajemen kebakaran	3. Masih rendahnya persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan	3. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan informasi peringatan dini bencana	3. Meningkatnya korban selamat dari bencana					
		4. Menurunnya jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	4. Rendahnya indeks kapasitas daerah	4. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana						
		5. Meningkatnya nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana		5. Belum optimalnya kasus kebakaran di WMK yang tertangani							



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
18	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		1.Meningkatkan pemahaman kebersihan dan pola hidup sehat di masyarakat	1.Meningkatnya volume produksi sampah	1.Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat	1.Meningkatnya kualitas pola hidup sehat	1. Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat	1.Penampungan sampah atau TPS yang overload	1.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah		1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat melalui pemahaman pola hidup sehat kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM serta sarana prasarana pengelolaan sampah
		1.Meningkatnya volume sampah yang tertangani	2.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah	2.Menurunnya nilai indeks kualitas air	2.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R	2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat		2.Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	2.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup		
		2.Meningkatnya persentase penanganan sampah	3.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R	3.Menurunnya nilai indeks kualitas udara	3.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah			3.Meningkatnya polusi	3.Optimalisasi pengelolaan sampah 3R	Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan	
		3.Meningkatnya nilai indeks kualitas vegetasi	4.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas vegetasi	4.Kurang optimalnya jumlah daya tampung TPS	4.Meningkatkan sosialisasi/ penyuluhan terkait perizinan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup						
		4.Meningkatnya sampah 3R		5.Kurang optimalnya pelaku usaha dalam ketaatan izin	5.Meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan kualitas air dan udara						
				6.Kurang optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup	6.Optimalisasi pemberian penghargaan terhadap pemeliharaan lingkungan hidup						
				7.Belum optimalnya pengaduan masyarakat yang ditangani dan terdata							



No.	Sasaran	Strength	Build on Strength	Weakness	Overcome Weakness	Opportunity	Exploit Opportunities	Threats	Block Threats	Strategic Issues/Problems	Strategy
				8. Belum optimalnya timbunan sampah yang tertangani							
				9. Belum optimalnya sampah yang tertangani							

(Sumber: Diolah penyusun, 2021)

Dengan menggunakan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada tabel diatas, dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan daerah. Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT sebagai alat untuk mendapatkan strategi mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO (*strength- opportunities*), WO (*weakness- opportunities*), ST (*strength- threat*) dan WT (*weakness- threat*). Hasil persilangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada tabel di atas kemudian disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Strategi yang dianggap sesuai dengan kemudian menjadi strategi atas upaya pencapaian masing-masing sasaran. Strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pangandaran**

Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama</b>		
Tujuan 1: Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi
	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Revitalisasi pasar tradisional Pemda
		Mengoptimalkan kelembagaan
Pembangunan lumbung pangan baru		
	Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya)	

<b>Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan</b>		
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal	Sasaran 2.1: Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada
		Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada
		Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek
		Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi)
		Penetapan ciri khas tata bangunan/arsitektur gedung dan bangunan
		Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC
		Peningkatan pelayanan pariwisata
		Mengundang investor penyelenggaraan wisata
<b>Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan</b>		
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Sasaran 3.1: Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi dokter PNS
		Pembentukan Perda
		Integrasi/perluasan cakupan JKN
		Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas
	Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia	
	Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan
	Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana
	Sasaran 3.4: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan
<b>Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal</b>		
Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat
	Sasaran 4.2: Meningkatnya permukiman layak huni	Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah
	Sasaran 4.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1
	Sasaran 4.4: Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS



<b>Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel</b>		
Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) sebagai lembaga kearsipan daerah (LD)	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan kearsipan
	Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pembangunan mall pelayanan publik
		Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan
	Sasaran 5.3: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Implementasi OSS
<b>Misi 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan</b>		
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni
		Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan
		Membangun sarana dan prasarana perkantoran
		Meningkatkan akses air minum dan sanitasi
	Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Menyelenggarakan pelatihan
		mitigasi kebencanaan
	Sasaran 6.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menyusun dan melaksanakan RPPLH, mengawasi pelaksanaan izin lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan adiwiyata pada lingkungan pemerintah.
Meningkatkan cakupan layanan persampahan		
	Pembentukan hutan kota	

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

## 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama periode perencanaan. Berikut merupakan arah kebijakan untuk masing-masing strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran daerah.

**Tabel 6.3 Perumusan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal	<b>1.1:</b> Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas	Tahun Pertama: Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal
	<b>1.2:</b> Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi	
		Revitalisasi pasar tradisional Pemda	
		Mengoptimalkan kelembagaan	
		Pembangunan lumbung pangan baru	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.3: Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya)	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal	Sasaran 2.1: Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada	
		Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada	
		Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek	
		Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi)	
		Penetapan ciri khas tata bangunan/ arsitektur gedung dan bangunan	
		Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC	
		Peningkatan pelayanan pariwisata	
		Mengundang investor penyelenggaraan wisata	
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Sasaran 3.1: Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi dokter PNS	Tahun Keempat: Peningkatan Daya Saing Daerah
		Pembentukan Perda	
		Integrasi/ perluasan cakupan JKN	
		Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas	
		Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia	
Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan	
		Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana	
Sasaran 3.4: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat	
	Sasaran 4.2: Meningkatnya permukiman layak huni	Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah	
	Sasaran 4.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1	
	Sasaran 4.4: Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS	
Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan	Tahun Kelima: Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi
	Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Implementasi OSS	
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Tahun Ketiga: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
		Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan	
		Membangun sarana dan prasarana perkantoran	
		Meningkatkan akses air minum dan sanitasi	
	Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Menyelenggarakan pelatihan mitigasi kebencanaan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 6.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menyusun dan melaksanakan RPPLH, mengawasi pelaksanaan izin lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan adiwiyata pada lingkungan pemerintah.	
		Meningkatkan cakupan layanan persampahan	
		Pembentukan hutan kota	

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah merumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik tahun pelaksanaan. Dalam satu periode perencanaan ditetapkan tema pembangunan yang menjadi fokus pembangunan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Pentahapan pembangunan berdasarkan arah kebijakan dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangandaran**

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi



Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program pembangunan secara konsisten dan spesifik. Oleh karena itu, implementasi dari setiap visi dan misi akan dihubungkan dengan program pembangunan dengan capaian tahunannya. Secara konseptual, program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022-2026 menjadi pernyataan program kepala daerah Kabupaten Pangandaran yang berisi program prioritas bersifat strategis. Program pembangunan berdasarkan pencapaian visi misi dan pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pangandaran**

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama															
	Tujuan 1: Memperkuat nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal	Indeks Kesalehan Sosial														
	Sasaran 1.1: Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani														
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	n.a	100%	5.906.901.962,00	100%	5.965.000.000,00	100%	6.175.000.000,00	100%	6.495.600.000,00	100%	6.695.000.000,00	100%	6.695.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa														
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	3.500.000,00	100%	3.850.000,00	100%	4.325.000,00	100%	4.658.500,00	100%	5.124.350,00	100%	5.124.350,00	Kecamatan Cigugur
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	890.000,00	100%	979.000,00	100%	1.076.900,00	100%	1.184.590,00	100%	1.303.049,00	100%	1.303.049,00	Kecamatan Cijulang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	7.691.000,00	100%	8.460.100,00	100%	9.306.110,00	100%	10.236.721,00	100%	11.260.393,00	100%	11.260.393,00	Kecamatan Cimerak
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	3.000.000,00	100%	3.300.000,00	100%	3.630.000,00	100%	3.993.000,00	100%	4.392.300,00	100%	4.392.300,00	Kecamatan Langkaplancar
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	3.235.000,00	100%	3.283.525,00	100%	3.332.778,00	100%	3.382.770,00	100%	3.433.511,00	100%	3.433.511,00	Kecamatan Mangunjaya
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	7.000.000,00	100%	7.700.000,00	100%	8.470.000,00	100%	9.317.000,00	100%	10.248.700,00	100%	10.248.700,00	Kecamatan Padaherang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	1.000.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.210.000,00	100%	1.331.000,00	100%	1.464.100,00	100%	1.464.100,00	Kecamatan Parigi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	890.000,00	100%	979.000,00	100%	1.076.900,00	100%	1.184.590,00	100%	1.303.049,00	100%	1.303.049,00	Kecamatan Pangandaran
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	3.235.000,00	100%	3.558.500,00	100%	3.914.350,00	100%	4.305.785,00	100%	4.736.364,00	100%	4.736.364,00	Kecamatan Sidamulih
	Program Koordinasi	Persentase koordinasi		100%	3.460.000,00	100%	3.806.000,00	100%	4.186.600,00	100%	4.605.260,00	100%	5.065.786,00	100%	5.065.786,00	Kecamatan Kalipucang



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum															
	Sasaran 1.2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun															
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.996.110,00	100%	4.395.721,00	100%	4.835.293,10	100%	5.318.822,41	100%	5.850.704,65	100%	5.850.704,65		Kecamatan Langkaplancar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	2.795.000,00	100%	3.074.500,00	100%	3.381.950,00	100%	3.720.145,00	100%	4.092.160,00	100%	4.092.160,00		Kecamatan Cijulang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	3.633.500,00	100%	3.996.850,00	100%	4.396.535,00	100%	4.836.189,00	100%	5.319.807,00	100%	5.319.807,00		Kecamatan Cimerak
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.235.000,00	100%	3.283.525,00	100%	3.332.778,00	100%	3.382.770,00	100%	3.433.511,00	100%	3.433.511,00		Kecamatan Mangunjaya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	10.000.000,0 0	100%	11.000.000,0 0	100%	12.100.000,0 0	100%	13.310.000,0 0	100%	14.641.000,0 0	100%	14.641.000,0 0		Kecamatan Padaherang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.500.000,00	100%	3.850.000,00	100%	4.235.000,00	100%	4.658.500,00	100%	5.124.350,00	100%	5.124.350,00		Kecamatan Parigi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	2.795.000,00	100%	3.074.500,00	100%	3.381.950,00	100%	3.720.145,00	100%	4.092.160,00	100%	4.092.160,00		Kecamatan Pangandaran
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.633.500,00	100%	3.996.850,00	100%	4.396.535,00	100%	4.836.189,00	100%	5.319.807,00	100%	5.319.807,00		Kecamatan Kalipucang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.500.000,00	100%	3.850.000,00	100%	4.235.000,00	100%	4.658.500,00	100%	5.124.350,00	100%	5.124.350,00		Kecamatan Cigugur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.235.000,00	100%	3.558.500,00	100%	3.914.350,00	100%	4.305.785,00	100%	4.736.364,00	100%	4.736.364,00		Kecamatan Sidamulih
	Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan																
	Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai- nilai kearifan lokal	Persentase peme-nuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata															
	Sasaran 2.1: Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan															
	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	74,50%	78,50 %	39.401.733.8 19,00	82,50 %	39.985.707.1 81,00	87,50 %	42.144.564.1 74,00	89,50 %	44.707.852.5 99,00	95,40 %	46.624.332.8 11,00	95,40 %	46.624.332.8 11,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata





Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Ruang
	Misi 3 Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan															
	Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia														
		Indeks Pembangunan Gender														
	Sasaran 3.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan														
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat		90%	5.739.011.000,00	90%	6.949.543.720,00	90%	6.918.498.420,00	90%	7.618.407.550,00	90%	8.389.919.935,00	90%	8.389.919.935,00	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan		90%	694.441.698,00	90%	291.918.000,00	90%	321.509.800,00	90%	353.260.000,00	90%	389.286.000,00	90%	389.286.000,00	Dinas Kesehatan
		Indeks Pendidikan														
	Program Pengembangan Kurikulum	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi		50%	4.600.000.000,00	52%	4.600.000.000,00	54%	5.120.000.000,00	56%	5.100.000.000,00	58%	5.400.000.000,00	58%	5.400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		50%	37.421.800.000,00	52%	37.421.800.000,00	54%	37.421.800.000,00	56%	37.421.800.000,00	58%	37.421.800.000,00	58%	37.421.800.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat														
	Program Pembinaan Peustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	687.501.629,00	19,16	641.776.980,00	19,61	569.568.845,00	19,95	671.555.924,00	20,24	671.281.031,00	20,24	671.281.031,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	-	10	194.229.980,00	10	181.312.050,00	10	160.912.121,00	10	189.725.068,00	10	189.647.407,00	10	189.647.407,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan														
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional		80%	16.487.669.486,00	80%	16.650.919.212,00	80%	18.507.811.356,00	80%	20.333.103.498,00	80%	22.177.195.080,00	80%	22.177.195.080,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
	Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk														
	Program Pengendalian	Persentase laporan	20%	100%	324.166.425,	100%	310.629.718,	100%	314.111.746,	100%	318.246.082,	100%	350.294.431,	100%	350.294.431,	Dinas Keluarga



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Penduduk	pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)			00		00		00		00		00		00		Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Prevalensi peserta KB aktif	75,78%	75,64 %	2.953.121.096,00	75,69 %	3.019.149.636,00	75,74 %	3.179.719.573,00	75,79 %	3.304.929.358,00	75,84 %	3.330.904.535,00	75,84 %	3.330.904.535,00		Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Sasaran 3.4: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberda-yaan Gender															
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	01,09,4	01,11 ,3	86.806.437,00	13,14	92.945.267,00	14,98	101.577.593,00	16,79	109.900.000,00	18,55	118.100.000,00	18,55	118.100.000,00		Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		2. Persentase kelembagaan PUG aktif	0,1458	03,32 ,3	56.689.628,00	93,85	57.598.502,00	94,62	58.000.000,00	95,38	59.398.496,00	96,15	59.980.483,00	96,15	59.980.483,00		
Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal																	
	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi															
		Persentase Penduduk Miskin															
	Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)															
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian		1	3,150,000,000	1,2	3,457,257,663	1,5	2,649,513,877	2	3,723,830,389	2	2,482,018,788	2	2,482,018,788		Dinas Pertanian
		Persentase Realisasi Nilai Investasi															
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	70%	75%	261.393.203,00	75%	284.264.455,00	80%	305.827.957,00	80%	332.979.280,00	85%	366.277.208,00	85%	366.277.208,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
		Rasio Kewirausahaan															
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan		60%	169.292.737,00	70%	224.763.641,00	80%	171.504.498,00	90%	210.571.481,00	100%	220.116.890,00	100%	220.116.890,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
		Indeks Ketahanan Pangan															
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang		30%	1.470.000.000,00	35%	1.484.700.000,00	40%	1.499.547.000,00	45%	1.514.542.470,00	50%	1.529.687.895,00	50%	1.529.687.895,00		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		berdaya saing															
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing		10%	1.470.000.000,00	12%	1.484.700.000,00	14%	1.499.547.000,00	16%	1.514.542.470,00	18%	1.529.687.895,00	18%	1.529.687.895,00		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	N/A	1	844.108.610,00	1	1.185.659.771,00	1	1.200.000.000,00	1	1.555.753.059,00	1	1.555.753.059,00	5	1.555.753.059,00		Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	N/A	10	750.000,000	10	795.000,000	10	795.000,000	10	855.000,000	10	895.000,000	10	895.000,000		Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		50%	385.800.000,00	50%	394.380.000,00	60%	400.000.000,00	70%	410.000.000,00	70%	421.000.000,00	70%	421.000.000,00		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		70%		70%		80%		90%		90%		90%			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel																	
	Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi															
	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP															
	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas dan cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	83	85,71	2.928.987.330,00	88,57	3.061.055.180,00	91,42	3.301.851.728,00	94,28	3.466.592.452,00	97,14	3.532.002.394,00	97,14	3.532.002.394,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat Maturitas SPIP															
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	66,73	71,5	2.905.000.000,00	76,5	3.045.750.000,00	81,5	3.208.250.000,00	83,5	3.317.000.000,00	85	3.415.000.000,00	85	3.415.000.000,00		Inspektorat
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,03	3,05		3,1		3,15		3,25		3,3		3,3			Inspektorat



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pemerintah (SPIP) OPD															
		Indeks SPBE															
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	tingkat kematangan tata kelola spbe		rintisan 3,1	1.630.000.00	terkelola 3,2	1.575.000.00	terkelola 3,3	1.612.000.00	terstandarisasi 3,4	1.980.000.00	Terintegrasi 3,5	1.970.000.00	Terintegrasi 3,5	1.970.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	80%	85%	309.718.970.000,00	90%	318.037.404.000	100%	346.943.845.500	100	378.834.709.750,00	100	414.059.070.000,00	100%	414.059.070.000,00		Badan pengelola Keuangan Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN															
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan	100%	100%	4.373.703.000,00	100%	4,517,624,000,00	100%	4,499,475,000,00	100%	4,594,260,000,00	100%	4,630,521,000,00	100%	4,630,521,000,00		Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
	Sasaran 5.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik															
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		100	232.846.775,00	100	234.259.614,00	100	239.482.655,00	100	245.684.160,00	100	250.320.805,00	100	250.320.805,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik		100	151.453.624,00	100	152.348.422,00	100	155.656.348,00	100	159.583.968,00	100	162.520.510,00	100	162.520.510,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan																	
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur															
	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah															
	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	74.50%	78,50 %	39.401.733.819	82,50 %	39.985.707.181	87,50 %	42.144.564.174	89,50 %	44.707.852.599	95,40 %	46.624.332.811	95,40 %	46.624.332.811		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur															
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		55%	5.767.031.000,00	60%	5.010.590.000,00	65%	5.345.580.000,00	70%	6.081.826.000,00	75%	6.034.642.000,00	75%	6.034.642.000,00		Dinas Perhubungan



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana														
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana		100%	1.798.271.50 7,00	100%	2.325.580.71 5,00	100%	1.954.464.67 5,00	100%	2.273.933.50 4,00	100%	2.048.494.62 6,00	100%	2.048.494.62 6,00	BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	941.804.734, 00	100%	1.302.875.59 2,00	100%	1.806.579.49 4,00	100%	1.239.349.72 0,00	100%	1.128.059.35 8,00	100%	1.128.059.35 8,00	BPBD
		Indeks Kapasitas Daerah														
	Program Penanganan Bencana	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup		100%	666.000.000, 00	100%	1.192.000.00 0,00	100%	1.302.000.00 0,00	100%	1.397.000.00 0,00	100%	1.495.500.00 0,00	100%	1.495.500.00 0,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sasaran 6.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup														
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Telah Dimiliki/Disusun	N/A	42,86 %	629.000.000	57, 14 %	510.000.000	78,57 %	460.000.000	92,86 %	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	Dinas Lingkung Hidup dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ppilh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Melaksanakan Komitmen Izin Lingkungan	N/A	50,00 %	55.000.000	56,67 %	105.000.000	66,67 %	65.000.000	73,33 %	95.000.000	83,33 %	65.000.000	83,33 %	65.000.000	Dinas Lingkung Hidup dan Kebersihan

(Sumber: Diolah Penyusun, 2021)

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB VII

---

KERANGKA PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT  
DAERAH



Untuk menggambarkan keterkaitan program dalam mencapai sasaran pembangunan, program pembangunan daerah dalam RPJMD disusun melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Dalam merumuskan program pembangunan Daerah tersebut dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD. Program pembangunan yang dimaksud yaitu program yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih, dirumuskan dalam program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan prioritas yang disertai dengan pendanaan/pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tabel 7.1 berikut ini merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026:



**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 2022 – 2026 Kabupaten Pangandaran**

Kode	Kapasitas Belanja	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
2	Belanja Daerah	1.511.345.161.785,54	1.754.312.446.883,69	1.811.936.384.876,45	1.913.928.921.795,04	2.005.452.715.839,99
2.1	Belanja Operasi	726.445.161.785,54	976.510.359.774,69	1.030.049.178.972,78	1.085.163.622.032,03	1.149.537.994.746,72
2.1.1	Belanja Pegawai	407.943.945.273,72	432.461.376.384,33	458.582.043.517,94	489.307.040.433,64	523.558.533.264,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270.501.216.511,82	443.163.883.390,36	517.493.946.004,84	538.267.188.455,24	564.416.400.212,70
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	45.000.000.000,00	97.704.500.000,00	50.600.163.150,00	53.990.374.081,05	57.715.709.892,64
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.180.600.000,00	3.373.026.300,00	3.599.019.062,10	3.847.351.377,38
2.2.	Belanja Modal	581.900.000.000,00	562.692.087.109,00	553.901.209.903,67	586.097.978.343,01	596.828.007.115,31
2.2.1	Belanja Tanah	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.620.650.000,00	5.997.233.550,00	6.415.840.451,79
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	150.000.000.000,00	159.000.000.000,00	168.555.900.000,00	179.680.589.400,00	192.078.550.068,60
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	276.400.000.000,00	238.862.087.109,00	210.590.900.903,67	220.123.006.340,01	135.531.616.783,81
2.2.4	Belanja Jalan	150.000.000.000,00	159.000.000.000,00	168.571.800.000,00	179.697.538.800,00	262.160.416.840,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	530.000.000,00	561.959.000,00	599.610.253,00	641.582.970,71
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.350.000.000,00	7.732.200.000,00	8.142.006.600,00	8.589.816.963,00
2.4	Belanja Transfer	196.000.000.000,00	207.760.000.000,00	220.253.796.000,00	234.525.314.820,00	250.496.897.014,96
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.000.000.000,00	10.600.000.000,00	11.244.480.000,00	11.930.393.280,00	12.765.520.810,24
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186.000.000.000,00	197.160.000.000,00	209.009.316.000,00	222.594.921.540,00	237.731.376.204,72

(Sumber:

BPKD

Diolah,

2021)





Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Sebagai wujud kebutuhan pendanaan, adapun pagu indikatif yang mana merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, serta sumber-sumber pendanaan lainnya). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
	Urusan Wajib																
	Terkait Pelayanan Dasar																
	Pendidikan																
X	X	X	1														Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		81%	14.438.263.719,00	82%	14.635.259.289,00	83%	14.835.836.544,00	84%	14.896.036.417,00	85%	15.062.310.796,00	85%	15.062.310.796,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	91%	92%		93%		94%		95%		95%					
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	91%	92%		93%		94%		95%		95%					
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92%	93%		94%		95%		96%		96%					
1	1	2															Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal		80%	219.354.737.734,00	82%	222.699.281.057,00	84%	235.866.641.462,00	86%	252.878.609.950,00	88%	264.468.334.183,00	88%	264.468.334.183,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
		Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan	72%	74%		76%		78%		80%		80%					
		Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	86,60%	89,60%		92,85%		96,35%		100%		100%					
		Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	84%	87%		90,25%		93,75%		97,50%		97,50%					
		Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata	86,50%	89,50%		92,75%		96,25%		100%		100%					
		Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	84,25%	86,75%		89,50%		92,50%		95,75%		95,75%					



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
1	1	3																Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
1	1	4																Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
1	1	6																Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
1	2	2																Dinas Kesehatan
1	2	3																Dinas Kesehatan
1	2	4																Dinas Kesehatan
1	2	5																Dinas Kesehatan
X	X	X	1															Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		2. 90%		2. 90%		2. 90%		2. 90%		2. 90%		2. 90%		2. 90%		
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		
		<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>																
X	X X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi														
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	80%	6.044.773.577,54	98,54%	6.134.363.207,44	94,88%	6.465.561.874,16	94,27%	6.858.805.943,43	95,89%	7.152.820.643,38	95,89%	7.152.820.643,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur														
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas														
1	3	2	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	67,57%	69,57%	30.700.000.000	70,57%	24.900.000.000	71,57%	29.900.000.000	72,57%	29.900.000.000	73,57%	29.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	70,00%	72%	3.177.559.179	73%	3.224.653.805	74%	3.398.755.175	75%	3.605.471.984	76%	3.760.026.840	76%	3.760.026.840	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	74,50%	78,50%	39.401.733.819	82,50%	39.985.707.181	87,50%	42.144.564.174	89,50%	44.707.852.599	95,40%	46.624.332.811	95,40%	46.624.332.811	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	15%	38%	1.906.535.507	62%	1.934.792.283	85%	2.039.253.105	100%	2.163.283.190	100%	2.256.016.104	100%	2.256.016.104	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	53,60%	56,00%	2.542.047.343	60,00%	2.579.723.044	60,50%	2.719.004.140	61,00%	2.884.377.587	61,50%	3.008.021.472	61,50%	3.008.021.472	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50,00%	53,00%	1.906.535.507	56,00%	1.934.792.283	59,00%	2.039.253.105	62,00%	2.163.283.190	65,00%	2.256.016.104	65,00%	2.256.016.104	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17
1 3 7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	n/a	56,00%	3.177.559.179	59,00%	3.224.653.805	62,00%	3.398.755.175	65,00%	3.605.471.984	68,00%	3.760.026.840	68,00%	3.760.026.840	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	6%	28,50%	101.681.893.726	42,80%	103.188.921.757	57,10%	108.760.165.610	71,40%	115.375.103.481	85,70%	120.320.858.866	85,70%	120.320.858.866	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah	0,00%	1,00%	1.271.023.672	3,00%	1.289.861.522	6,00%	1.359.502.070	8,00%	1.442.188.794	10,00%	1.504.010.736	10,00%	1.504.010.736	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	35,04%	40,04%	635.511.836	42,54%	644.930.761	45,04%	679.751.035	47,54%	721.094.397	50,00%	752.005.368	50,00%	752.005.368	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>Sosial</b>																
1 6 2	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		50%		60%		70%		75%		80%		80%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		70%	385.800.000,00	80%	394.380.000,00	90%	400.000.000,00	95%	410.000.000,00	100%	421.000.000,00	90%	421.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 6 4	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	0,2%	8%	2.799.427.585,00	8%	2.278.191.631,00	8%	2.359.450.059,00	8%	2.494.720.175,90	8%	2.542.923.526,99	8%	2.542.923.526,99	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 6 5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik		10%	751.560.000,00	10%	797.916.000,00	10%	847.707.600,00	10%	901.278.360,00	10%	959.006.196,00	10%	959.006.196,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 6 6	Program Penanganan Bencana	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup		100%	666.000.000,00	100%	1.192.000.000,00	100%	1.302.000.000,00	100%	1.397.000.000,00	100%	1.495.500.000,00	100%	1.495.500.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17				
1	6	7			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	90	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	121.000.000,00	100%	133.100.000,00	100%	146.410.000,00	100%	146.410.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
					<b>Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>															
1	5	2			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	n.a	100	5.906.901.962,00	100	5.965.000.000,00	100	6.175.000.000,00	100	6.495.600.000,00	100	6.695.000.000,00	100	6.695.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	n.a	100%	3.615.136.529,00	100%	3.655.442.802,00	100%	3.809.227.946,00	100%	3.920.563.113,00	100%	4.044.105.777,00	100%	4.044.105.777,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	n.a	100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja				
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja		
						Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	n.a	100%		100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja		
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100%	4.850.729.864,00	100%	4.018.448.459,00	100%	4.093.248.459,00	100%	4.587.248.459,00	100%	5.108.081.943,00	100%	5.108.081.943,00	BPBD
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik														
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur														
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas														
1	5	3			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana		100%	1.798.271.507,00	100%	2.325.580.715,00	100%	1.954.464.675,00	100%	2.273.933.504,00	100%	2.048.494.626,00	100%	2.048.494.626,00	BPBD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
1 5 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	941.804.734,00	100%	1.302.875.592,00	100%	1.806.579.494,00	100%	1.239.349.720,00	100%	1.128.059.358,00	100%	1.128.059.358,00		BPBD
	<b>Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>																
1 4 3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	27%	26,39%	11.439.213.044,00	26,14%	11.608.753.698,00	25,89%	12.235.518.631,00	25,64%	12.979.699.142,00	25,39%	13.536.096.622,00	25,39%	13.536.096.622,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 4 2	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	0,00 %	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	1.250.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>																
	<b>Tenaga Kerja</b>																
2 7 2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan		60%	169.292.737,00	70%	224.763.641,00	80%	171.504.498,00	90%	210.571.481,00	100%	220.116.890,00	100%	220.116.890,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
2 7 3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat		50%	608.082.581,00	60%	556.827.308,00	70%	679.743.484,00	80%	698.432.990,00	90%	751.303.841,00	90%	751.303.841,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
2 7 4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap		50%	160.636.422,00	60%	173.461.846,00	70%	198.906.990,00	75%	241.308.884,00	85%	224.581.342,00	85%	224.581.342,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
2 7 5	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun		80%	95.000.000,00	80%	95.000.000,00	90%	100.000.000,00	90%	175.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>																
2 8 2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	01.09,4	01.11,3	86.806.437	01.13,1	92.945.267	01.15,0	101.577.593	01.16,8	109.900.000	01.18,5	118.100.000	01.18,5	118.100.000		Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		2. Persentase kelembagaan PUG aktif	0,14583333	03.32,3	56.689.628	03.33,8	57.598.502	03.34,6	58.000.000	03.35,4	59.398.496	03.36,2	59.980.483	03.36,2	59.980.483		Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17
2 8 3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	80%	83%	88.151.184	84%	87.793.076	85%	89.975.104	88%	92.809.440	90%	94.600.537	90%	94.600.537	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2 8 4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	0	20%	43.775.592	40%	44.246.538	60%	45.987.552	80%	48.054.720	100%	49.600.268	100%	49.600.268	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2 8 5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	0	60%	15.887.796	65%	28.123.269	70%	28.993.776	75%	30.027.360	80%	30.800.134	80%	30.800.134	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2 8 6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan kelompok hak anak	100%	100%	91.175.592	100%	97.646.538	100%	105.387.552	100%	113.454.720	100%	121.000.268	100%	121.000.268	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	20%	18%	70.175.592	16%	71.946.538	14%	74.987.552	12%	78.354.720	10%	81.200.268	10%	81.200.268	Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>Pangan</b>																
2 9 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	51%	8%	5.750.000.000,0	8%	1.121.419.690,0	8%	1.173.942.494,0	8%	1.246.717.235,00	8%	1.305.175.793,00	8%	1.305.175.793,00	Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan
2 9 3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Angka Kecukupan Energi	2150	2100	2.180.000.000,0	2100	56.070.984,00	2100	58.697.124,00	2100	62.335.861,00	2100	65.258.789,00	2100	65.258.789,00	Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan
		2. Angka Kecukupan Protein	57	57		57		57		57		57				
2 9 4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	5,38	5%	480.000.000,00	4%	33.642.591,00	3%	35.218.275,00	2%	37.401.517,00	1%	39.155.274,00	1%	39.155.274,00	Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan
2 9 5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	N/A	55%	150.000.000,00	60%	26.618.291,00	65%	27.864.985,00	70%	29.592.384,00	75%	30.979.971,00	75%	30.979.971,00	Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan
<b>Pertanahan</b>																
2 1 0 2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan		100%	150.000.000,00	100%	151.500.000,00	100%	153.015.000,00	100%	154.545.150,00	100%	156.090.602,00	100%	156.090.602,00	Sekretariat Daerah
2 1 0 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan		100%	770.000.000,00	100%	777.700.000,00	100%	785.477.000,00	100%	793.331.770,00	100%	801.265.088,00	100%	801.265.088,00	Sekretariat Daerah
2 1 0 5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan		100%	50.000.000,00	100%	50.500.000,00	100%	51.005.000,00	100%	51.515.050,00	100%	52.030.201,00	100%	52.030.201,00	Sekretariat Daerah





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
2	1	0	1	0	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten Pangandaran		100%	451.023.663,00	100%	455.533.900,00	100%	460.089.239,00	100%	464.690.131,00	100%	469.337.032,00	100%	469.337.032,00	Sekretariat Daerah
					<b>Lingkungan Hidup</b>															
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	N/A	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.792.300.000	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.759.550.000	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.802.445.000	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	2.213.824.543	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.880.638.887	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.880.638.887	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	2		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Telah Dimiliki/Disusun	N/A	42,86%	629.000.000	57, 14 %	510.000.000	78,57%	460.000.000	92,86%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	6		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan Yang Melaksanakan Komitmen Izin Lingkungan	N/A	50,00%	55.000.000	56,67%	105.000.000	66,67%	65.000.000	73,33%	95.000.000	83,33%	65.000.000	83,33%	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	1	0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	N/A	73,33%	35.000.000	75%	45.000.000	77,28%	50.000.000	79,17%	55.000.000	80,77%	60.000.000	80,77%	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	5		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan penghasil Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	N/A	53%	68.000.000	58%	75.000.000	63%	85.000.000	68%	95.000.000	73%	103.000.000	73%	103.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	8		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Perilaku Peduli Lingkungan	N/A	28%	115.000.000	32%	118.000.000	36%	123.000.000	40%	126.000.000	44%	130.000.000	44%	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	9		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	N/A	13%	35.000.000	17%	45.000.000	20%	50.000.000	23%	60.000.000	27%	65.000.000	27%	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	1		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan Sampah yang ditangani	N/A	20%	4.042.225.457	22%	4.082.675.420	24%	4.314.976.226	26%	4.536.200.000	28%	5.453.400.000	2%	5.453.400.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
2	1	3																Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan
2	1	4																Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan
2	1	7																Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan
X	X	X	1															Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	2																
2	1	3																Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	4																Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
X	X	X	1															Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	1	3																Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		3. 80%		3. 85%		3. 90%		3. 95%		3100%		3100%				
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		4. 100%		4. 100%		4. 100%		4. 100%		4100%		4100%				
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	55%	5.767.031.000,00	60%	5.010.590.000,00	65%	5.345.580.000,00	70%	6.081.826.000,00	75%	6.034.642.000,00	75%	6.034.642.000,00	Dinas Perhubungan	
			<b>Komunikasi Dan Informatika</b>															
X	X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91%		92%		93%		94%		95%		95%		
					2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	91%	4.489.831.000,00	92%	4.442.100.000,00	93%	4.672.738.000,00	94%	4.640.561.000,00	95%	4.855.600.000,00	95%	4.855.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
					3. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	91%		92%		93%		94%		95%		95%		
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik	55%	1.673.000.000,00	60%	1.933.000.000,00	65%	2.021.000.000,00	75%	2.170.000.000,00	80%	2.360.000.000,00	80%	2.360.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase tata kelola komunikasi publik	55%		60%		65%		75%		80%		80%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	tingkat kematangan tata kelola spbe	riintasan 3,1	1.630.000.000,00	terkelola 3,2	1.575.000.000,00	terkelola 3,3	1.612.000.000,00	terstanda risasi 3,4	1.980.000.000,00	Terintegrasi 3,5	1.970.000.000,00	Terinteg rasi 3,5	1.970.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			<b>Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>															
2	17	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0%	0	50	55,000,000	60	56,000,000	70	57,000,000	70	62,700,000	70	62,700,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM	
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang patuh	N/A	50	225,000,000	50.68	255,000,000	51.35.00	255,000,000	52	265,000,000	55	270,000,000	55	270,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat	47.62 %	50	125.000.000,00	55	155,000,000	60	155,000,000	65	165,000,000	70	170,000,000	70	170,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
2	17	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	N/A	30	80,000,000	35	80,000,000	40	80,000,000	45	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
2	1	6			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	N/A	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
2	1	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	N/A	10	750,000,000	10	795,000,000	10	795,000,000	10	855,000,000	10	895,000,000	50	895,000,000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
2	1	7			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	N/A	1	844,108,610	1	1,185,659,771	1	1,200,000,000	1	1,555,753,059	1	1,555,753,059	5	1,555,753,059	Dinas Perdagangan dan Koperasi, UMKM
<b>Penanaman Modal</b>																				
X	X	X	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	BB	BB	2.808.493.129,00	BB	2.871.368.190,00	A	2.941.283.387,00	A	3.092.836.892,00	A	3.136.475.052,00	A	3.136.475.052,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	BB	BB		BB		A		A		A				
						3. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi	77%	77%		77%		78%		78%		78%		78%		
						4. Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi	55%	55%		55%		56%		56%		56%		56%		
						5. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	17%	17%		17%		18%		18%		18%		18%		
2	1	8			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	137 Investor	166 Investor	107.874.500,00	183 Investor	109.902.141,00	201 Investor	109.902.141,00	221 Investor	114.902.141,00	243 Investor	224.804.282,00	243 Investor	224.804.282,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	8			Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	N/A	10%	2.500.000,00	10%	2.500.000,00	10%	22.612.430,00	10%	24.873.673,00	10%	27361.040,00	10%	27361.040,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	8			Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	70%	75%	261.393.203,00	75%	284.264.455,00	80%	305.827.957,00	80%	332.979.280,00	85%	366.277.208,00	85%	366.277.208,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	8			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	322,1 Milyar Rupiah	354,31 Milyar Rupiah	2.342.200,00	389,74 Milyar Rupiah	2.342.200,00	428,71 Milyar Rupiah	2.576.420,00	471,58 Milyar Rupiah	33.176.262,00	518,73 Milyar Rupiah	36.493.888,00	518,73 Milyar Rupiah	36.493.888,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	8			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	3%	3.000.000,00	3%	3.000.000,00	3%	7.000.000,00	3%	7.000.000,00	3%	7.000.000,00	3%	7.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>																				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
2	1	2			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan		80%	16.487.669.486,00	80%	16.650.919.212,00	80%	18.507.811.356,00	80%	20.333.103.498,00	80%	22.177.195.080,00	80%	22.177.195.080,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
2	1	3			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional		80%	9.047.697.700,00	80%	9.825.723.200,00	80%	10.650.059.100,00	80%	11.421.529.800,00	80%	12.222.710.500,00	80%	12.222.710.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
2	1	4			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pemuda yang Aktif Dalam Kepramukaan		80%	100.000.000,00	80%	110.000.000,00	80%	120.000.000,00	80%	130.000.000,00	80%	140.000.000,00	80%	140.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
<b>Persandian</b>																				
2	2	2			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman		20%	190.000.000,00	25%	205.000.000,00	30%	220.000.000,00	35%	240.000.000,00	40%	260.000.000,00	40%	260.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Statistik</b>																				
2	2	2			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral		55%	470.000.000,00	60%	470.000.000,00	65%	510.000.000,00	70%	550.000.000,00	75%	590.000.000,00	75%	590.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Kebudayaan</b>																				
X	X	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien		80 Persen	11.663.993.226,00	82 Persen	12.294.977.305,00	84 Persen	12.983.705.639,00	86 Persen	13.735.899.113,00	88 Persen	14.557.850.163,00	88 Persen	14.557.850.163,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	2			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan		60 Persen	2.410.000.000,00	62 Persen	2.434.100.000,00	64 Persen	2.458.441.000,00	66 Persen	2.483.025.410,00	68 Persen	2.507.855.664,00	68 Persen	2.507.855.664,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	3			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan		20 Persen	250.000.000,00	22 Persen	252.500.000,00	24 Persen	255.025.000,00	26 Persen	257.575.250,00	28 Persen	260.151.003,00	28 Persen	260.151.003,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	4			Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang dikembangkan		20 Persen	100.000.000,00	22 Persen	101.000.000,00	24 Persen	102.010.000,00	26 Persen	103.030.100,00	28 Persen	104.060.401,00	28 Persen	104.060.401,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	5			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola		10 Persen	345.000.000,00	12 Persen	348.450.000,00	14 Persen	351.934.500,00	16 Persen	355.453.845,00	18 Persen	359.008.383,00	18 Persen	359.008.383,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Perpustakaan</b>																				
X	X	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	80	90	4.619.018.266,00	91	5.008.111.072,00	92	5.554.496.151,00	93	5.863.401.065,00	94	6.281.401.123,00	94	6.281.401.123,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	2			Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	687.501.629,00	19,16	641.776.980,00	19,61	569.568.845,00	19,95	671.555.924,00	20,24	671.281.031,00	20,24	671.281.031,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
2 2 3	3				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	-	10	194.229.980,00	10	181.312.050,00	10	160.912.121,00	10	189.725.068,00	10	189.647.407,00	10	189.647.407,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					<b>Kearsipan</b>															
2 2 4	2				Program Pengelolaan Arsip	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	CC	B	233.090.000,00	BB	220.806.296,00	A	221.297.658,00	A	234.000.463,00	AA	235.894.670,00	AA	235.894.670,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 2 4	3				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	50,84	66,13	82.371.858,00	72,23	78.137.005,00	80,22	63.412.644,00	89,29	82.806.041,00	100	83.476.347,00	100	83.476.347,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>															
					<b>Kelautan Dan Perikanan</b>															
X	X X	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 90%	1. 90%		1. 90%		1. 90%		1. 90%		1. 90%		1. 90%		Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	2. 90%	2. 90%	4.212.064.013,00	2. 90%	5.122.279.752,00	2. 90%	2. 90%	2. 90%	5.694.598.111,00	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	5.961.617.753,00
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	3. 90%	3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%		3. 90%
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4. 90%	4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%		4. 90%
3 2 5	3				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	- 11,62 %	0.3%	21.713.000.000,00	0.3%	1.808.974.961,00	0.3%	1.893.700.098,00	0.3%	2.011.093.866,00	0.3%	2.105.394.036,00	0.3%	2.105.394.036,00	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan
3 2 5	5				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	N/A	5%	2.280.774.000,00	5%	194.902.742,00	5%	204.031.205,00	5%	216.679.455,00	5%	226.839.553,00	5%	226.839.553,00	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan
3 2 5	4				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	- 24,45 %	0.2%	12.580.000.000,00	0.2%	1.955.349.845,00	0.2%	2.046.930.594,00	0.2%	2.173.823.389,00	0.2%	2.275.753.944,00	0.2%	2.275.753.944,00	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan
3 2 5	6				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	N/A	90%	1.068.384.765,00	90%	325.211.710,00	90%	340.443.323,00	90%	361.547.998,00	90%	378.500.980,00	90%	378.500.980,00	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan
					<b>Pariwisata</b>															
X	X X	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien		80 Persen	11.663.993.226,00	82 Persen	12.294.977.305,00	84 Persen	12.983.705.639,00	86 Persen	13.735.899.113,00	88 Persen	14.557.850.163,00	88 Persen	14.557.850.163,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)							
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17					
3	2	2		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan		10 Persen	18.396.560.000,00	12 Persen	18.580.525.600,00	14 Persen	18.766.330.856,00	16 Persen	18.953.994.165,00	18 Persen	19.143.534.106,00	18 Persen	19.143.534.106,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
3	2	3		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan		20 Persen	3.625.000.000,00	25 Persen	3.661.250.000,00	30 Persen	3.697.862.500,00	35 Persen	3.734.841.125,00	40 Persen	3.772.189.536,00	40 Persen	3.772.189.536,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
3	2	4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi		10 Persen	1.470.000.000,00	12 Persen	1.484.700.000,00	14 Persen	1.499.547.000,00	16 Persen	1.514.542.470,00	18 Persen	1.529.687.895,00	18 Persen	1.529.687.895,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
3	2	5		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing		30 Persen	1.185.000.000,00	35 Persen	1.196.850.000,00	40 Persen	1.208.818.500,00	45 Persen	1.220.906.685,00	50 Persen	1.233.115.752,00	50 Persen	1.233.115.752,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
				<b>Pertanian</b>																	
X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Pertanian		
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Pertanian	
					Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Pertanian	
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Pertanian	
3	2	7	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Pertanaman	289	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Dinas Pertanian		
					Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pangan & Hortikultura	39	1	1,2	1,3	1,5	1,6	2	2	2,3	2,3	2	2	2,3	2,3	Dinas Pertanian	
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pertanian
					Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	105	1	1,3	1,6	1,6	1,6	2	2	2	2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	Dinas Pertanian
3	2	7	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian		1	3,150,000,000	1,2	3,457,257,663	1,5	2,649,513,877	2	3,723,830,389	2	2,482,018,788	2	2,482,018,788	Dinas Pertanian		
3	2	7	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang Asuh & Peningkatan		10	675,000,000	10	707,246,538	10	708,987,552	10	36,054,720	10	712,600,268	10	712,600,268	Dinas Pertanian		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17			
	Veteriner	Pencegahan Penyakit Menular Ternak																	
3	2 7	5		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	60	800,000,000	65	883,343,910	70	1,241,329,000	72	1,250,000,000	75	1,084,759,349	75	1,084,759,349	Dinas Pertanian	
3	2 7	7		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	10	3,128,330,761	10	3,128,330,761	10	3,163,151,035	10	3,204,463,397	10	3,235,405,368	10	3,235,405,368	Dinas Pertanian	
3	2 7	6		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	100	15.887.796,00	100	16,123,269	100	16,993,776	100	18,027,360	100	18,800,134	100	18,800,134	Dinas Pertanian	
				<b>Pedagangan</b>															
X	X X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100		100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	
					2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	2.139.156.200,00	100	2,313,871,820	100	2,414,911,471	100	2,316,380,514	100	2,126,748,043	100	2,126,748,043		
					3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100		100		100		100		100		100			
					4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100		100		100		100		100		100			
3	3 0	2		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	00.00	-	01.30	22,000,000	01.40	24,200,000	01.50	26,420,000	02.00	29,062,000	02.00	29,062,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	
3	3 0	3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	23.08%	1.320.000.000,00	26.92%	690,000,000	30.77%	930,000,000	34.62%	966,000,000	38.46%	1,357,000,000	38.46%	1,357,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	
3	3 0	4		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	61.11.00	670.000.000,00	66.67	670,000,000	72.22.00	670,000,000	77.08.00	670,000,000	83	677,500,000	83	677,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	
3	3 0	5		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	81,88 %	6,36%	169.500.000,00	6,80%	169,500,000	7,29%	169,500,000	7,86%	185,000,000	8,54%	203,500,000	8,54%	203,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
3	3 0	6		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang tertib ukur	51.28.00	300.000.000,00	52.56.00	315,000,000	53.85	315,000,000	55.12.00	335,000,000	56.41.00	351,500,000	56.41.00	351,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
3	307	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		01.00	140.000.000,00	01.50	155.000.000	02.00	155.000.000	02.50	170.000.000	03.00	187.000.000	03.00	187.000.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
		<b>Perindustrian</b>															
3	312	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		40%	504.544.910,00	60%	465.580.928,00	75%	615.000.000,00	85%	631.000.000,00	100%	734.173.170,00	100%	734.173.170,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	313	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	314	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		10%	139.000.000,00	20%	144.000.000,00	30%	169.212.073,00	40%	192.082.844,00	50%	196.000.000,00	50%	196.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
		<b>Transmigrasi</b>															
X	XX1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		80%	4.107.892.254,00	80%	4.152.892.254,00	90%	4.040.892.254,00	90%	4.027.892.254,00	100%	4.027.892.254,00	100%	4.027.892.254,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	322	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		10%	50.000.000,00	25%	50.000.000,00	50%	40.000.000,00	75%	45.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	322	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		1 Lokasi	50.000.000,00	1 Lokasi	60.000.000,00	1 Lokasi	65.000.000,00	1 Lokasi	70.000.000,00	1 Lokasi	75.000.000,00	1 Lokasi	75.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
3	322	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		25%	32.090.948,00	40%	32.974.564,00	50%	35.937.993,00	60%	44.205.923,00	70%	40.387.562,00	70%	40.387.562,00		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
		<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>															
		<b>Perencanaan</b>															
X	XX1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		91	9.037.187.347,00	92	9.729.900.325,00	93	10.308.333.935,00	94	10.248.184.630,00	95	10.696.499.287,00	95	10.696.499.287,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	12	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	83	85,71	2.928.987.330,00	88,57	3.061.055.180,00	91,42	3.301.851.728,00	94,28	3.466.592.452,00	97,14	3.532.002.394,00	97,14	3.532.002.394,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	13	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	81	83	5.349.410.153,00	86	5.246.484.779,00	89	5.900.272.393,00	91	4.777.322.958,00	93	4.931.877.815,00	93	4.931.877.815,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
		- Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	82	84		87		89		91		93		93			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<b>Keuangan</b>																	
X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90	91		92		93		94		95		95	Badan pengelola Keuangan Daerah	
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	96	97	24.942.860.000,00	98	24.217.927.000,00	100	24.595.100.000,00	100	25.009.790.000,00	100	25.465.744.000,00	100		25.465.744.000,00
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80	85		90		95		96		96		96		
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90	92		95		97		97		97		97		
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	80%	85%	309.718.970.000,00	90%	318.037.404.000,00	100%	346.943.845.500,00	100	378.834.709.750,00	100	414.059.070.000,00	100%	414.059.070.000,00	Badan pengelola Keuangan Daerah
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	85%	90%	13.826.606.000,00	95	13.998.262.000,00	100	14.705.242.000,00	100	15.475.659.000,00	100	16.215.072.000,00	100	16.215.072.000,00	Badan pengelola Keuangan Daerah
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	40	50	9.649.186.000,00	60	7.878.629.000,00	70	8.287.347.000,00	80	8.730.408.500,00	90	9.239.032.750,00	90	9.239.032.750,00	Badan pengelola Keuangan Daerah
			<b>Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Pelatihan</b>															
X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi		95%		95%		95%		95%		95%		95%	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		95%	4,462,131,248.87	95%	4,908,344,373.76	95%	4,482,778,540.13	95%	4,931,056,394.14	95%	5,424,162,033.56	95%		5,424,162,033.56
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		95%		95%		95%		95%		95%		95%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)	2022-2026												Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
5	3	2																Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
5	4	2																Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
5	5	2																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	X	X	1															Inspektorat
6	1	2																Inspektorat
																		Inspektorat
6	1	3																Inspektorat
																		Inspektorat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17
X X X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90%	29.030.232.454,00	90%	29.320.534.778,00	95%	29.613.740.126,13	95%	31.245.066.514,80	100%	32.547.976.906,19	100%	32.547.976.906,19	Sekretariat Dewan
4	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	60	14.555.847.040,00	63	15.201.374.055,00	66	16.876.703.797,90	70	18.147.520.835,88	73	19.233.996.044,24	73	19.233.996.044,24	Sekretariat Dewan
Sekretariat Daerah																
4	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Program Pemerintahan, Harmonisasi Produk Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat	87	14.831.248.709,00	89	14.979.561.196,00	90	15.129.356.808,00	95	15.280.650.376,00	95	15.433.456.880,00	95	15.433.456.880,00	Sekretariat Daerah
4	1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekonomian, Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	87	2.650.145.713,00	89	2.676.647.170,00	90	2.703.413.642,00	90	2.730.447.778,00	90	2.757.752.256,00	90	2.757.752.256,00	Sekretariat Daerah
X X X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase penunjang urusan pemerintah daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH yang difasilitasi 2. Persentase pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi kegiatan KDH/WKDH yang dilaksanakan 3. Persentase Keberhasilan Penataan Organisasi, Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	84	28.945.968.118,00	88	29.428.449.519,00	92	31.512.332.587,00	96	33.594.513.639,00	96	35.294.385.299,00	96	35.294.385.299,00	Sekretariat Daerah





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
		Pelayanan Publik															
7	1	3															
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2.795.000,00	100%	3.074.500,00	100%	3.381.950,00	100%	3.720.145,00	100%	4.092.160,00	100%	4.092.160,00		Kecamatan Cijulang
7	1	4															
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	890.000,00	100%	979.000,00	100%	1.076.900,00	100%	1.184.590,00	100%	1.303.049,00	100%	1.303.049,00		Kecamatan Cijulang
7	1	5															
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	1.730.000,00	100%	1.903.000,00	100%	2.093.300,00	100%	2.302.630,00	100%	2.532.893,00	100%	2.532.893,00		Kecamatan Cijulang
7	1	6															
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	57.247.501,00	100%	59.897.751,00	100%	65.887.526,00	100%	72.476.279,00	100%	79.723.907,00	100%	79.723.907,00		Kecamatan Cijulang
X	X	X	1														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1.979.179.275,00	100%	2.177.097.203,00	100%	2.285.228.923,00	100%	2.459.898.265,00	100%	2.683.638.477,00	100%	2.683.638.477,00		Kecamatan Cimerak
7	1	2															
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.500.000,00	100%	1.650.000,00	100%	1.815.000,00	100%	1.996.500,00	100%	2.196.150,00	100%	2.196.150,00		Kecamatan Cimerak
7	1	3															
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	74.173.852,00	100%	81.591.237,00	100%	89.750.361,00	100%	98.725.397,00	100%	108.597.937,00	100%	108.597.937,00		Kecamatan Cimerak
7	1	4															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	251.291.000,00	100%	276.420.100,00	100%	384.762.110,00	100%	334.468.321,00	100%	367.915.153,00	100%	367.915.153,00		Kecamatan Cimerak
7	1	5															
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	3.633.500,00	100%	3.996.850,00	100%	4.396.535,00	100%	4.836.189,00	100%	5.319.807,00	100%	5.319.807,00		Kecamatan Cimerak
7	1	6															
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.691.000,00	100%	8.460.100,00	100%	9.306.110,00	100%	10.236.721,00	100%	11.260.393,00	100%	11.260.393,00		Kecamatan Cimerak
X	X	X	1														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	2.220.830.592,00	100%	2.442.913.651,20	100%	2.687.205.016,32	100%	2.955.925.517,95	100%	3.251.518.069,75	100%	3.251.518.069,75		Kecamatan Langkaplancar



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17		
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik																
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur																
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas																
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	309.000.000,00	100%	13.200.000,00	100%	14.520.000,00	100%	15.972.000,00	100%	17.569.200,00	100%	17.569.200,00	Kecamatan Langkaplancar	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3.996.110,00	100%	4.395.721,00	100%	4.835.293,10	100%	5.318.822,41	100%	5.850.704,65	100%	5.850.704,65	Kecamatan Langkaplancar	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	3.000.000,00	100%	3.300.000,00	100%	3.630.000,00	100%	3.993.000,00	100%	4.392.300,00	100%	4.392.300,00	Kecamatan Langkaplancar	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	3.750.000,00	100%	4.125.000,00	100%	4.537.500,00	100%	4.991.250,00	100%	5.490.375,00	100%	5.490.375,00	Kecamatan Langkaplancar	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	76.500.000,00	100%	73.150.000,00	100%	80.465.000,00	100%	88.511.500,00	100%	97.362.650,00	100%	97.362.650,00	Kecamatan Langkaplancar	
X	X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	168.405.320,00	100%	168.405.320,00	100%	168.405.320,00	100%	168.405.320,00	100%	168.405.320,00	100%	168.405.320,00	Kecamatan Mangunjaya
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	53.513.000,00	100%	53.513.000,00	100%	53.513.000,00	100%	53.513.000,00	100%	53.513.000,00	100%	53.513.000,00		
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	92.337.200,00	100%	92.337.200,00	100%	92.337.200,00	100%	92.337.200,00	100%	92.337.200,00	100%	92.337.200,00		
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	194.874.032,00	100%	194.874.032,00	100%	194.874.032,00	100%	194.874.032,00	100%	194.874.032,00	100%	194.874.032,00		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	126.698.000,00	100%	128.598.470,00	100%	130.527.447,00	100%	132.485.359,00	100%	134.472.639,00	100%	134.472.639,00	Kecamatan Mangunjaya	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3.235.000,00	100%	3.283.525,00	100%	3.332.778,00	100%	3.382.770,00	100%	3.433.511,00	100%	3.433.511,00	Kecamatan Mangunjaya	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum		100%	3.235.000,00	100%	3.283.525,00	100%	3.332.778,00	100%	3.382.770,00	100%	3.433.511,00	100%	3.433.511,00	Kecamatan Mangunjaya
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	3.485.000,00	100%	3.537.275,00	100%	3.590.334,00	100%	3.644.189,00	100%	3.698.852,00	100%	3.698.852,00	Kecamatan Mangunjaya
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	48.660.000,00	100%	49.389.900,00	100%	50.130.749,00	100%	50.882.710,00	100%	51.645.950,00	100%	51.645.950,00	Kecamatan Mangunjaya
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%	2.214.072.451,00	100%	2.435.479.696,10	100%	2.679.027.665,71	100%	2.946.930.432,28	100%	3.241.623.475,51	100%	3.241.623.475,51	Kecamatan Padaherang
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	191.160.000,00	100%	210.276.000,00	100%	231.303.600,00	100%	254.433.960,00	100%	279.877.356,00	100%	279.877.356,00	Kecamatan Padaherang
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.100.000,00	100%	13.310.000,00	100%	14.641.000,00	100%	14.641.000,00	Kecamatan Padaherang
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum		100%	7.000.000,00	100%	7.700.000,00	100%	8.470.000,00	100%	9.317.000,00	100%	10.248.700,00	100%	10.248.700,00	Kecamatan Padaherang
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	2.000.000,00	100%	2.200.000,00	100%	2.420.000,00	100%	2.662.000,00	100%	2.928.200,00	100%	2.928.200,00	Kecamatan Padaherang
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	79.560.000,00	100%		100%	96.267.600,00	100%	105.894.360,00	100%	116.483.796,00	100%	116.483.796,00	Kecamatan Padaherang
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100%	1.641.675.766,00	100%	1.894.343.343,00	100%	2.066.127.677,00	100%	2.251.990.445,00	100%	2.470.739.489,00	100%	2.470.739.489,00	Kecamatan Parigi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas															
7	1	2															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%	219.500.000,00	100%	220.000.000,00	100%	301.250.000,00	100%	221.155.000,00	100%	302.520.500,00	100%	302.520.500,00		Kecamatan Parigi
7	1	3															
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100%	3.500.000,00	100%	3.850.000,00	100%	4.235.000,00	100%	4.658.500,00	100%	5.124.350,00	100%	5.124.350,00		Kecamatan Parigi
7	1	4															
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%	1.000.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.210.000,00	100%	1.331.000,00	100%	1.464.100,00	100%	1.464.100,00		Kecamatan Parigi
7	1	5															
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	2.500.000,00	100%	2.750.000,00	100%	3.025.000,00	100%	3.327.500,00	100%	3.660.250,00	100%	3.660.250,00		Kecamatan Parigi
7	1	6															
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	51.000.000,00	100%	50.600.000,00	100%	100.660.000,00	100%	61.226.000,00	100%	67.348.600,00	100%	67.348.600,00		Kecamatan Parigi
X	X	X	1														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	2.043.238.764,00	100%	2.288.177.640,00	100%	2.541.921.904,00	100%	2.742.020.545,00	100%	2.993.732.985,00	100%	2.993.732.985,00		Kecamatan Pangandaran
7	1	2															
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%	185.040.000,00	100%	203.544.000,00	100%	304.598.400,00	100%	246.288.240,00	100%	270.917.064,00	100%	270.917.064,00		Kecamatan Pangandaran
7	1	3															
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100%	2.795.000,00	100%	3.074.500,00	100%	3.381.950,00	100%	3.720.145,00	100%	4.092.160,00	100%	4.092.160,00		Kecamatan Pangandaran
7	1	4															
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%	890.000,00	100%	979.000,00	100%	1.076.900,00	100%	1.184.590,00	100%	1.303.049,00	100%	1.303.049,00		Kecamatan Pangandaran
7	1	5															
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	1.730.000,00	100%	1.903.000,00	100%	2.093.300,00	100%	2.302.630,00	100%	2.532.893,00	100%	2.532.893,00		Kecamatan Pangandaran



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)									
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17							
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	57.247.501,00	100%	59.897.751,00	100%	65.887.526,00	100%	72.476.279,00	100%	79.723.907,00	100%	79.723.907,00	Kecamatan Pangandaran						
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100%	2.357.627.738,00	100%	2.593.390.512,00	100%	2.852.729.563,00	100%	3.138.002.519,00	100%	3.451.802.771,00	100%	3.451.802.771,00	Kecamatan Sidamulih						
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			100%			100%				100%				100%				100%		100%		
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100%			100%				100%				100%				100%		100%		100%
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100%			100%				100%				100%				100%		100%		100%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	185.040.000,00	100%	203.544.000,00	100%	223.898.400,00	100%	246.288.240,00	100%	270.917.064,00	100%	270.917.064,00	Kecamatan Sidamulih						
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.235.000,00	100%	3.558.500,00	100%	3.914.350,00	100%	4.305.785,00	100%	4.736.364,00	100%	4.736.364,00	Kecamatan Sidamulih						
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum		100%	3.235.000,00	100%	3.558.500,00	100%	3.914.350,00	100%	4.305.785,00	100%	4.736.364,00	100%	4.736.364,00	Kecamatan Sidamulih						
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	3.485.000,00	100%	3.833.500,00	100%	4.216.850,00	100%	4.638.535,00	100%	5.102.389,00	100%	5.102.389,00	Kecamatan Sidamulih						
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	55.906.000,00	100%	61.496.600,00	100%	67.646.260,00	100%	74.410.886,00	100%	81.851.975,00	100%	81.851.975,00	Kecamatan Sidamulih						
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100%	2.289.012.030,00	100%	2.517.913.233,00	100%	2.769.704.556,00	100%	3.046.675.012,00	100%	3.351.342.513,00	100%	3.351.342.513,00	Kecamatan Kalipucang						
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			100%			100%				100%				100%				100%		100%		
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100%			100%				100%				100%				100%		100%		100%
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100%			100%				100%				100%				100%		100%		100%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	190.560.000,00	100%	209.616.000,00	100%	230.577.600,00	100%	253.635.360,00	100%	278.998.896,00	100%	278.998.896,00	Kecamatan Kalipucang						



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	3.633.500,00	100%	3.996.850,00	100%	4.396.535,00	100%	4.836.189,00	100%	5.319.807,00	100%	5.319.807,00	Kecamatan Kalipucang
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum		100%	3.460.000,00	100%	3.806.000,00	100%	4.186.600,00	100%	4.605.260,00	100%	5.065.786,00	100%	5.065.786,00	Kecamatan Kalipucang
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	10.180.000,00	100%	11.198.000,00	100%	12.317.800,00	100%	13.549.580,00	100%	14.904.538,00	100%	14.904.538,00	Kecamatan Kalipucang
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	75.510.310,00	100%	83.061.341,00	100%	91.367.475,00	100%	100.504.223,00	100%	110.554.645,00	100%	110.554.645,00	Kecamatan Kalipucang
					<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>															
X	X	X	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%	7.424.106.899,00	100%	8.213.289.399,00	100%	8.887.719.899,00	100%	9.594.827.096,00	100%	10.249.673.399,00	100%	10.249.673.399,00	Bakesbangpol
8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan		80%	647.151.842,00	80%	699.619.316,00	80%	775.444.172,00	80%	864.550.298,00	80%	967.808.843,00	80%	967.808.843,00	Bakesbangpol
8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etia Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri		90%	2.757.879.000,00	91%	44.148.920.000,00	92%	3.175.420.000,00	93%	3.201.920.000,00	94%	3.228.420.000,00	94%	3.228.420.000,00	Bakesbangpol
8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas		90%	364.000.000,00	91%	1.174.000.000,00	92%	1.385.000.000,00	93%	1.597.000.000,00	94%	1.809.000.000,00	94%	1.809.000.000,00	Bakesbangpol
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		75%	383.038.300,00	78%	421.068.813,00	81%	491.763.600,00	84%	564.592.140,00	87%	648.344.961,00	87%	648.344.961,00	Bakesbangpol
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Persentase Pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan Daerah		70%	1.822.536.710,00	75%	2.001.102.180,00	80%	2.163.677.685,00	85%	2.404.747.037,00	90%	2.614.433.542,00	90%	2.614.433.542,00	Bakesbangpol



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Kinerja Awal RPJMD (2021)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	17	
	Konflik Sosial																
	<b>TOTAL</b>				1.511.345.161. 785,54		1.754.312.446. 883,69		1.811.936.384. 876,45		1.913.928.921. 795,04		2.005.452.71 5.839,99		2.005.452.715.8 39,99		

(Sumber: BPKD Diolah, 2021)

*RPJMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB VIII

---

KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTA DAERAH,

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Sebagai sebuah daerah yang otonom, Kabupaten Pangandaran diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Target pencapaian ini adalah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama disajikan dalam tabel berikut

#### VIII-1

**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026  
Pemerintah Kabupaten Pangandaran**

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048
Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90
Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770
Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	N/A	20	30	40	50	60	60
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000
Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48
Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24
Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan	N/A	38	38	40	40	45	45
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59
Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50
Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520
Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38
Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50
Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	73	74	74	74	74	75	75
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50
Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3
Nilai LAKE Kabupaten/Kota	CC	B	BB	A	A	AA	AA
Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00



Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42
Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61- 2,65	2,66- 2,75	2,86- 2,95	2,96- 3,05	3,06- 3,15	3,06- 3,15
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84
Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865
Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64
Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135
Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	66,43

(Sumber: Penyusun Diolah, 2021)

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup seluruh perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dengan melihat pencapaian keberhasilan melalui indikator – indikator yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh perangkat daerah terkait. Untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah sesuai dengan aspek pembangunan Kabupaten Pangandaran maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



## 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2.2</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	N/A	4,0-4,5	4,5-5,0	5,0 -5,5	5,5-6,0	6,0-6,5	6,0-6,5
2.2.1.2	Indeks Gini	N/A	0,338-0,330	0,330-0,326	0,326-0,318	0,318-0,310	0,310-0,302	0,310-0,302
2.2.1.3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0
2.2.1.4	Laju Inflasi	1,61	1,06	0,86	0,69	0,56	0,45	0,45
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
2.2.2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50
2.2.3.1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	N/A	6	8	8	8	8	8
2.2.3.1	Jumlah Cabang Olahraga	30	30	31	32	33	34	30
<b>2.3</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>							
<b>2.3.1</b>	<b>Pelayanan Umum Wajib Dasar</b>							
<b>2.3.1.1</b>	<b>Pendidikan</b>							
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	96 %	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	98 %	98,50	98,60	98,70	98,82	99,00	99,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91 %	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69 %	69,50	70,00	70,50	71,00	72,00	72,00
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	3.735	3.795	3.850	3.910	3.975	4.035	4.035
<b>2.3.1.2</b>	<b>Kesehatan</b>							
	Prevalensi Balita Stunting	5,01%	5,0%	4,7%	4,4%	4,1%	3,8%	3,8%
	Angka Harapan Hidup	71,4%	71,96%	72,24%	72,52%	72,80%	73,08%	73,08%
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokter	56	62	68	75	82	90	90
	Dokter Gigi	13	14	16	17	19	21	21
	Bidan	396	436	479	527	580	638	638
	Ners	213	234	258	284	312	343	343
	Perawat Terampil	280	308	339	373	410	451	451
	Perawat Gigi	29	32	35	39	42	47	47



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pranata Labkes	47	52	57	63	69	76	76
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	22	24	27	29	32	35	35
	Tenaga Gizi	15	17	18	20	22	24	24
	Sanitarian/Kesling	11	12	13	15	16	18	18
	Kesehatan Masyarakat	61	67	74	81	89	98	98
	Fisioterapis	28	31	34	37	41	45	45
	Apoteker	34	37	41	45	50	55	55
	Asisten Apoteker	51	56	62	68	75	82	82
	Analisis Obat dan Makanan	1	1	1	1	1	2	2
	Dokter Spesialis	21	23	25	28	31	34	34
	Radiografer	8	9	10	11	12	13	13
	Teknisi Elektromedis	2	2	2	3	3	3	3
	Asisten Penata Anestesi	3	3	4	4	4	5	5
	Fisikawan Medis Ahli Pertama	1	1	1	1	1	2	2
	Ahli Teknik Laboratorium Medik Terampil	11	12	13	15	16	18	18
	Analisis Patologi Anatomi	1	1	1	1	1	2	2
	Dietisien	1	1	1	1	1	2	2
	Nutrisionis Terampil	7	8	8	9	10	11	11
	Sanitarian Ahli Pertama	5	6	6	7	7	8	8
	Analisis Kebijakan Kesehatan	1	1	1	1	1	2	2
	Penyuluh Kesehatan Ahli	3	3	4	4	4	5	5
	Petugas CSSD/Perawat	3	3	4	4	4	5	5
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2.3.1.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	67.57	69.57	70.57	71.57	72.57	73.57	73.57
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	70%	71%	72%	73%	74%	75%	76%
	Persentase Jalan Baru yang Terbangun	0,000	1,262	36,297	75,855	84,692	91,583	100,000
	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	69,990	74,500	78,500	82,500	87,500	89,500	95,400
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	15%	15%	38%	62%	85%	100%	100%
	Proporsi Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50%	50%	53%	56%	59%	62%	65%
	Persentase Sarana Pemerintahan yang Terbangun	6%	15%	29%	43%	57%	71%	86%
	Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas	0%	1%	1%	3%	6%	8%	10%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah							
	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	35,04%	37,54%	40,04%	42,54%	45,04%	47,54%	50,00%
<b>2.3.1.4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							
	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	0%	53%	56%	59%	62%	65%	68%
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	27%	27%	26,39%	26,14%	25,89%	25,64%	25,39%
<b>2.3.1.5</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>							
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	12	12	10	9	8	6	6
	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	5	10	10	11	12	13	13
<b>2.3.1.6</b>	<b>Sosial</b>							
	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	0,2%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator spm)	87.55%	88%	88.50%	89.%	89.50%	90 %	90 %
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	98.03%	98.50%	98.75%	99%	99.50%	100%	100%
<b>2.3.2</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non-Dasar</b>							
<b>2.3.2.1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	98	60	70	75	80	90	90
	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	80	70	75	80	85	90	90
	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	24,70	25,09	25,49	25,89	26,29	26,69	26,69
<b>2.3.2.2</b>	<b>2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	24,70	25,09	25,49	25,89	26,29	26,69	26,69
<b>2.3.2.3</b>	<b>Pangan</b>							
	Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	83,0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Skor PPH Konsumsi	94,5	75	80	85	90	95	95
<b>2.3.2.4</b>	<b>Pertanahan</b>							
	Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan	N/A	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	N/A	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten Pangandaran	N/A	100	100	100	100	100	100
<b>2.3.2.5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
	Volume produksi sampah	62129	64639	65932	67250	68595	69595	69595
	Persentase Penanganan sampah	16,84%	20%	22%	24%	26%	28%	28%
	Indeks Kualitas Air	51,67	51,75	51,8	51,85	51,9	51,95	51,95
	Indeks Kualitas Udara	77,79	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	65,25	65,25	65,37	65,45	65,64	65,82	65,82
<b>2.3.2.6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	96,95	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	26,78	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	3,29	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	45,26	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	74,3	78	80	82	84	85	85
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	59,54	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	67,25	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	39,13	17	35	57	78	100	100
<b>2.3.2.7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
<b>2.3.2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
	TFR / Total Fertility Rate	2,29	2,23	2,20	2,18	2,16	2,16	2,16
	CPR / Contraceptive Prevalenci Rate (%)	60,25	61,45	61,96	62,43	62,86	62,86	62,86
	Unmet Need	17,33	15,95	15,40	14,93	14,52	14,52	14,52
	LPP / Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ratio Akseptor KB (%)	60,25	61,45	61,96	62,43	62,86	62,86	62,86
	ASFR / <i>Age Spesific Fertility Rate</i>	37	33	32	31	30	30	30
<b>2.3.2.9</b>	<b>Perhubungan</b>							
	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	76,9	56,03	75,08	93,31	100	100	100
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum (%)	60	50	72,22	88,89	100	100	100
<b>2.3.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik (%)	n/a	79	82	85	88	90	90
	Persentase Penyebaran Informasi Publik (%)	n/a	55	60	65	70	75	75
<b>2.3.2.11</b>	<b>Usaha Mikro Kecil Menengah</b>							
	Persentase koperasi aktif	89,02	89,15	89,28	89,41	89,53	89,65	89,65
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)	5,18	15	15	15	15	15	75
<b>2.3.2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
	Jumlah Investor PMDN/PMA	123	166	183	201	221	243	243
<b>2.3.2.14</b>	<b>Statistik</b>							
	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral (%)	N/A	25	30	35	40	45	45
<b>2.3.2.15</b>	<b>Persandian</b>							
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah (%)	N/A	60	65	70	75	80	80
<b>2.3.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (festival)	N/A	6	8	8	8	8	8
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (%)	N/A	60	62	64	66	68	68
	Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan (objek)	N/A	3	3	3	3	3	3
<b>2.3.2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A	10	10	10	10	10	10
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun (Orang)	5,978	16,560	16,560	27,720	33,840	39,960	39,960
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (Eksemplar)	10,794	11,211	11,628	12,184	12,879	13,713	13,713



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai (Orang)	224	306	346	386	427	467	467
	Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi/promosi per tahun (Orang)	5,978	7,178	8,078	9,278	10,778	12,578	12,578
	Jumlah Total Perpustakaan (Perpustakaan)	627	637	642	648	654	654	654
	Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di suatu wilayah (Perpustakaan)	168	228	258	288	318	348	348
	Jumlah Anggota Perpustakaan (Orang)	3,009	3,573	3,993	4,533	5,193	5,873	5,873
<b>2.3.2.18</b>	<b>Kearsipan</b>							
	Kebijakan Kearsipan (%)	71,33	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734
	Pembinaan Kearsipan (%)	34,17	13,166	13,166	13,166	13,166	13,166	13,166
	Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun (%)	80	4	4	4	4	4	4
	Pengelolaan Arsip Statis (%)	25,6	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
	Sdm Kearsipan (%)	31,3	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74
	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	50,84	66,13	72,23	80,22	89,29	100	100
<b>2.3.3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>							
<b>2.3.3.1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	13,19	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>2.3.3.2</b>	<b>Pariwisata</b>							
	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)	N/A	2	4	6	8	10	10
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Rp)	13.786.568.250,00	17.500.000.0000	20.000.000.0000	22.000.000.0000	25.000.000.0000	27.500.000.0000	27.500.000.0000
	Persentase Tingkat hunian Akomodasi (%)	6	7	8	9	10	11	11
	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)	45	50	55	60	65	70	70
<b>2.3.3.3</b>	<b>Pertanian</b>							
	PDRB sektor Pertanian (Rp)	n/a	1.776.308.750.000	1.802.321.770.000	1.833.461.950.000	1.872.619.630.000	1.914.096.010.000	1.914.096.010.000
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	n/a	15	15	15	15	15	15



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	23,96	20	20	20	20	20	20
	Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	27,34	25	25	25	25	25	25
<b>2.3.3.4</b>	<b>Perdagangan</b>							
	Nilai ekspor daerah (Milyar Rupiah)	108,82	111,00	118,55	127,20	137,19	148,91	148,91
	Prosentase peningkatan nilai ekspor perdagangan (%)	81,88	6,36	6,80	7,29	7,86	8,54	36,85
	Nilai PDRB sektor perdagangan (Milyar Rupiah)	2.243,97	2.243,97	2.454,37	2.585,97	2.717,57	2.849,16	2.849,16
<b>2.3.3.5</b>	<b>Perindustrian</b>							
	Jumlah Industri Baru	13	20	20	25	25	30	30
	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	0,004	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	0,052	0,059	0,059	0,064	0,067	0,069	0,069
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	4,78	4,80	4,83	4,85	4,90	4,95	4,95
	Nilai PDRB Sektor Industri (Rp)	594.570.910.000	575.187.458.659	594.201.920.102	617.201.920.102	647.462.862.646	682.911.703.213	682.911.703.213
<b>2.3.3.6</b>	<b>Transmigrasi</b>							
	Persentase Transmigran Swakarsa	0	3	3	5	5	5	5
<b>2.3.4</b>	<b>Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>							
<b>2.3.4.1</b>	<b>Perencanaan</b>							
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)	22,40	22,55	22,70	22,85	23,00	23,15	23,15
	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Bappeda (%)	A 89,90	A 89,95	A 90,00	AA 90,05	AA 90,10	AA 90,15	AA 90,15
	Persentase Nilai SAKIP PD Unsur Perencanaan di atas 26% (%)	65,71	68,57	71,29	74,29	71,14	80,00	80,00
<b>2.3.4.1</b>	<b>Keuangan</b>							
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,35	1,49	1,29	1,55	1,46	1,14	1,14
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	28,49	21,15	21,30	21,55	21,75	22,00	22,00
	Persentase Belanja Pendidikan (10%)	24,96	11,25	11,50	11,74	11,82	12,00	12,00





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (BL)	70 : 30	60 : 40	60 : 40	60 : 40	60 : 40	60 : 40	60 : 40
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	1,96	0,75	0,68	0,87	0,87	0,73	0,73
<b>2.3.4.2</b>	<b>Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan</b>							
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	2%	8%	14%	20%	27%	34%	34%
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	17%	24%	31%	40%	48%	57%	57%
<b>2.3.4.3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	65-85%	65-85%	65-85%	65-85%	85-100%	85-100%
<b>2.3.4.4</b>	<b>Pengawasan</b>							
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	7,39	7,60	7,80	7,95	8,20	8,40	8,40
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	89,5	90	90	90	90	90	90
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase OPD yang mengimplementasikan Manajemen Risiko (%)	23	23	26	29	31	34	34
	Persentase OPD yang membuat Kebijakan dan Pengendalian Korupsi	30	32	35	40	45	50	50
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
<b>2.3.4.5</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>							
	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	N/A	75%	78%	82%	83%	85%	85%
	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	N/A	90%	91%	92%	93%	94%	94%
	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	A	A	A	A	A	A
<b>2.3.4.6</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (52.06)	B	B	BB	BB	A	A
	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61 - 2,65	2,66 - 2,75	2,86 - 2,95	2,96 - 3,05	3,06 - 3,15	3,06 - 3,15
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	166.67	80	85	90	95	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2.3.4.7</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>							
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	83%	60%	63%	66%	70%	73%	73%
<b>2.3.4.1</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>							
	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	68,8	69,3	70,2	71,6	72,8	74	74
	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2.4</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>.4.1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
	Pengeluaran Konsumsi per Kapita	9.084.000	9,585.238	9,758.190	9,931.143	10.104.095	10.277.048	10.277.048
<b>2.4.2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	48.150	35.000	37.500	40.000	45.000	47.500	47.500
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	12	10	15	20	25	35	35
<b>2.4.3</b>	<b>Fokus Iklim Investasi</b>							
	Jumlah Investor PMDN/PMA	123	166	183	201	221	243	243
	PMDN/PMA (Nilai Investasi) (Milyar Rupiah)	292,82	354,31	389,74	428,71	471,58	518,73	518,73
<b>2.4.4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
	Lulusan S1	224	270	320	370	420	470	470
	Lulusan S2	0	15	20	25	30	35	35
<b>2.4.5</b>	<b>Fokus Daya Saing Pariwisata</b>							
	Jumlah Kunjungan Wisata	2.842.022	3.570.286	4.083.289	4.628.571	5.154.286	5.671.429	5.671.429
	PAD sektor pariwisata	13.786.568.250,00	17,5 M	20 M	22,5 M	25 M	27,5 M	27,5 M

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)



Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Selain itu, indikator kinerja suatu Kabupaten/Kota juga harus selaras dengan provinsi dan nasional guna mendukung rencana pembangunan kedepan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tanggal 16 Juni 2021. Keselarasan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8.3 Penyeragaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

No	Indikator Pembangunan	RPJMN			RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kabupaten Pangandaran				
		2022	2023	2024	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	6,10	6,20	5,20 -5,20	5,50 -5,50	4,0-4,5	4,5-5,0	5,0 -5,5	5,5-6,0	6,0-6,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,00	8,55	8,15	6,39-6,06	5,77-5,42	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80	3,40	3,10	9,46-7,81	8,03-6,21	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			74,60-84,23	72,38-72,79	73,14-73,56	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00
5.	Rasio Gini			0,360-0,474	0,39-0,40	0,38-0,39	0,338-0,330	0,330-0,326	0,326-0,318	0,318-0,310	0,310-0,302
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			27,3	n/a	n/a	62,91	64,91	66,91	66,91	70,01

(Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2021)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan target pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional. Pada indikator pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nasional menargetkan pada tahun 2024 TPT sebesar 6,70%. Selaras dengan hal tersebut, Kabupaten Pangandaran menargetkan TPT sebesar 4,80-4,00% pada tahun 2024. Angka tersebut lebih kecil nilainya, yang berarti target nasional secara otomatis dapat tercapai ketika target daerah telah tercapai. Hal tersebut, dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pangandaran telah selaras dan mendukung pembangunan secara nasional.

*RP JMD*

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

---

2021-2026

# BAB IX

---

PENUTUP

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMN.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027.

#### **9.1 Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Selain itu, RPJMD Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati Pangandaran dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangandaran

- Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
  4. Bupati Pangandaran berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
  5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## **9.2 Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pangandaran, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta RPJMPN.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.



Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan dan mengawal terwujudnya Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

**BUPATI PANGANDARAN,**

**ttd**

**H. JEJE WIRADINATA**





Pemerintah  
Kabupaten Pangandaran